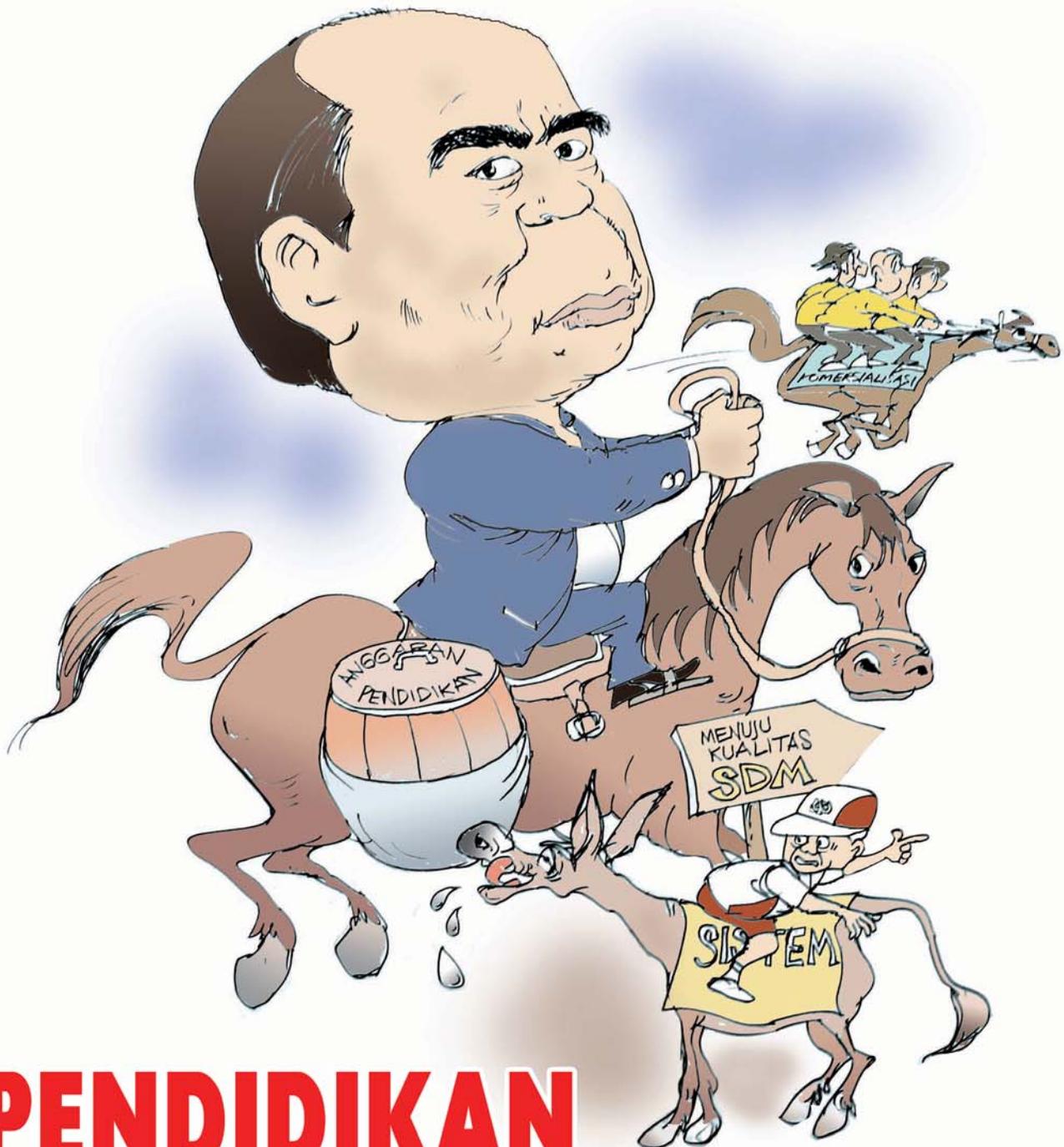


SYAYKH AL-ZAYTUN, PEMBAWA DAMAI DAN TOLERANSI

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 46 TAHUN III ★ 07 - 20 SEPTEMBER 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



PENDIDIKAN DAN AMANAT KONSTITUSI

ISSN 1907-977X



Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganya pun menawan tinggi. Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimport banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya. Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya. Bumi Indonesia memberi cita rasa Beras Basmati yang spesifik. Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205

Protein : 4.2g

Carbohydrate : 44.5g

Total Fat : 0.44g

Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg

Selenium : 11.8mcg

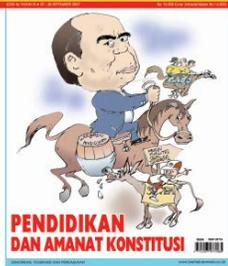
Thiamine : 0.26mg

Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The Truestar Health Encyclopedia

SYAYKH AL-ZAYTUN, PEMBAWA DAMAI DAN TOLERANSI

BERITA INDONESIA



PENDIDIKAN DAN AMANAT KONSTITUSI

Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 46/Th.III/ 06 - 20 September 2007

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 SURAT PEMBACA 6
 BERITA TERDEPAN 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

**ANGGARAN PENDIDIKAN 2008
 IRONI, JIKA DIKNAS KEHILANGAN
 ORIENTASI PENDIDIKAN**

Betul-betul menjadi sebuah ironi nasional sekaligus tragis manakala seluruh komponen bangsa "sepakat" untuk sama-sama melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam konstitusi, yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. Semakin ironis lagi setelah mengetahui fakta bahwa Depdiknas sendirilah yang telah kehilangan orientasi pendidikan. 14



LENTERA

SYAYKH AL-ZAYTUN

**TOKOH PEMBAWA DAMAI
 DAN TOLERANSI**

Syaykh Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang adalah tokoh pendiri sekaligus personifikasi Ma'had Al-Zaytun. Dia seorang tokoh pendidikan (pembawa) budaya toleransi dan perdamaian. Ketua Alumni Institut Agama Islam Negeri (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Ciputat, ini memiliki wawasan kebangsaan dalam keberagaman yang menembus sekat agama, suku dan golongan, bahkan sekat bangsa dan negara34

BERITA TOKOH

Mardiyanto 44
 Effendi Gozali 44
 Akbar Tandjung 45
 Iskandar Alisjahbana 45

BERITA DAERAH

Lokakarya Nasional di KRI Makassar 46
 Kukar Sehat 2008 46

LINTAS TAJUK

Sekelumit Maaf dari Negeri Jiran 47



BERITA MEDIA

Bangkitnya Komik Indonesia 48

BERITA MANCANEGERA

Belajar dari Turki 51

BERITA KESEHATAN

Harapan Baru Bagi Kaum Perempuan 52

BERITA PROFIL

Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi 54

BERITA IPTEK

Sepuluh Software Windows Mobile Terbaik 56

BERITA Hiburan

Anak Sulung yang Terbuang 58

BERITA BUKU

Legenda Kehebatan Pola Pikir 59

BERITA FEATURE

Dari Baju Sultan Sampai Topi Schummi 60

BERITA LINGKUNGAN

Melelang Jati ke Negeri Big Ben 61

BERITA BUDAYA

Mengawal Karya Leluhur 62
 Mengajak Tertawa dan 63



Pemerintah Belum Penuhi Konstitusi 18
 Ketika Masyarakat Bayar Sendiri 20
 Terpaksa Sekolah di Bawah Pohon 22
 Pendidikan Bagus Tak Ada yang Gratis 23
 Melawan Komersialisasi Pendidikan 24
 "Kami Ini Melanggar Undang-Undang Dasar" 25

BERITA KHAS

Industri Pulp dan Kertas Belum Mandiri 28

BERITA PENDIDIKAN

Skema Baru Untuk Beasiswa 30

BERITA NASIONAL

Kerja Sebentar, Pensiun Seumur Hidup 31

BERITA POLITIK

PAN Ingin Prorakyat 32

BERITA EKONOMI

Konversi Minyak Tanah Tetap Berlanjut 33

BERITA HUKUM

Brankas yang Dipertanyakan 42
 Dua Aksi Pemberantas Korupsi 43



Masjid Mutiara Tanah Jawa 64

BERITA PEREMPUAN

Pentingnya Memberdayakan Perempuan 65

LINTAS MEDIA

Memasuki Masa Pensiun Yang Berkualitas 66

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi

Retno Handayani

Redaktur:

Suryo Pranoto
Haposan Tampubolon

Staf Redaksi:

Samsuri
Nawawi
Ikhwani Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:

Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak

Marjuka Situmorang
Mangatur Lorieclide Paniroy

Desainer:

ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:

Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana,
Bernard Sihite, Prana Citra, Tarakan: Sudirman
Leonard Pohan

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publikitas Indoadprint

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto
Herni Dewi Farida

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 83787235

E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X



Wawancara Berita Indonesia dengan Anwar Arifin.

foto: berindo amron

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Sekecil apapun harapan haruslah kita tetap optimis untuk dapat mewujudkan. Demikian pula dengan bunyi Pidato Kenegaraan dan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2008, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis 16 Agustus 2007 lalu. Kita sangat percaya bakal terjadi perbaikan ekonomi di masa depan.

Tetapi ada fakta yang tak terbantahkan dalam pidato tersebut. Yakni, pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan di tahun 2008 yang kendati naik angka absolutnya tetapi secara persentase justru menurun dibanding APBN tahun 2007.

Berita Utama kita kali ini mengangkat pengebirian anggaran sektor pendidikan di tahun 2008, yang sekaligus pula merupakan pengingkaran atas mandat yang tertuang dalam konstitusi, yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan terpilih. Dari sudut pandang konstitusi, apapun alasannya, termasuk karena lemahnya kinerja Depdiknas, tidaklah elok bernegara dengan menginjak-injak konstitusi sebagai sebuah kesepakatan bersama. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, perbaikilah mutu pendidikan nasional dan tingkatkan kinerja aparat birokrasi pendidikan. Para pengambil keputusan cobalah selalu bertindak di atas jalur hukum dan konstitusi, dengan menjadikannya sebagai pegangan tertinggi.

Sidang Pembaca,

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto akhirnya dipercaya menduduki kursi Menteri Dalam Negeri definitif. Kita sambut gembira dan ucapkan selamat atasnya, mudah-mudahan dia mampu bekerja ekstra keras mempersiapkan segudang agenda politik dalam waktu dekat ini. Selamat pula kepada Akbar Tandjung yang berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu politik. Pengaruh politiknya yang masih tergolong besar semoga berguna menenteramkan bangsa ini.

Rubrik *Lentera* kali ini mengangkat sosok Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang sebagai tokoh sekaligus simbol pembawa damai dan toleransi.

Peristiwa-peristiwa aktual tetap disajikan di rubrik-rubrik yang kami miliki. Insiden pemukulan wasit karateka Indonesia di Malaysia (*Lintas Tajuk*), yang karena kearifan semua pihak, isunya dapat segera mereda. Demikian pula kenaikan tarif tol yang tanpa basa-basi (*Berita Terdepan*).

Ada banyak kiat untuk dapat bertahan hidup. Selama ini dua perusahaan pulp dan bubur kertas raksasa di Riau dan Jambi dengan mencuri kayu dari hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Ketika aparat melingkari arealnya dengan garis polisi, patut diduga merekalah rupanya yang selama ini pelaku *illegal logging* yang sulit terjajah.

Ada banyak rubrik menarik lain yang kami sajikan kali ini. Selamat menikmati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pendidikan dan Amanat Konstitusi

Pendidikan berkualitas adalah syarat utama untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing sebuah bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan akan berakibat tertinggalnya suatu bangsa dibanding bangsa-bangsa lain. Rendahnya kualitas pendidikan suatu bangsa juga akan menyebabkan bangsa tersebut sering kali diremehkan bangsa lain.

Sementara untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Sangat sulit mengharapkan adanya pendidikan bermutu tanpa biaya yang relatif besar. Dalam hal ini, sesungguhnya bangsa dan negara ini sudah menyadari bahwa pendidikan bermutu tersebut membutuhkan biaya besar. Sehingga dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4) dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah diamanatkan (mewajibkan) pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, di luar gaji guru dan pendidikan ke-dinasan.

Konstitusi ini mengamanatkan bahwa biaya besar pendidikan berkualitas itu adalah kewajiban negara (pemerintah) untuk memenuhinya. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (bermutu). Bermakna, bahwa sesungguhnya adalah kewajiban negara (pemerintah) untuk menyediakan biaya pendidikan bagi rakyatnya, terutama rakyat yang kurang mampu.

Dalam konteks ini, pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain berniat menyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun dan mulai mengampanyekan pendidikan gratis bagi rakyat. Tapi kehendak baik ini, belum terimplementasikan dengan baik dan benar. Wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai. Begitu pula pendidikan bebas biaya (gratis) belum dilakukan dengan benar. Tampaknya pendidikan gratis itu masih salah kaprah. Seolah-olah pendidikan bebas biaya (gratis) itu dimaknai sebagai pendidikan murah, atau tanpa biaya.

Sebagian rakyat kecil memang sudah memperoleh pendidikan bebas biaya (gratis), tapi masih terbatas pada pendidikan tanpa memperhatikan mutu. Dalam hal ini, pemerintah (Depdiknas) tampaknya menjadi sebuah ironi jika masih kehilangan orientasi. Jika keadaan ini terus dilanjutkan (dibiarkan), pastilah rakyat yang memperoleh pendidikan bebas biaya (gratis) itu akan tetap terpinggirkan, tidak punya daya saing memadai.

Kurang tercerahkannya orientasi pemerintah terhadap pendidikan bermutu yang bebas biaya khususnya kepada rakyat tidak mampu, tercermin dalam RAPBN 2008 yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan 10,9 persen. Turun dari APBN 2007 yang sudah mencapai 11,3 persen.

Bandingkan dengan anggaran pendidikan di negara Asean lainnya, Malaysia sudah 23 persen dari anggaran tahunannya, Singapura 19 persen, Thailand 22 persen dan Filipina 20 persen. Karena itu jangan kaget apabila mengetahui fakta

yang lebih buruk lagi. Hasil penelitian yang dilansir oleh PERC (*The Political and Economics Risk Consultancy*), sebuah lembaga konsultan berbasis di Singapura pada September 2001 lalu menunjukkan, kualitas sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 12 negara Asia yang diteliti.

Sebuah ironi, juga terungkap bahwa Depdiknas sendiri tampaknya tidak siap untuk menampung alokasi anggaran yang lebih besar. Departemen yang gedung perkantornya terlihat mewah hingga lebih mirip pusat perbelanjaan atau mall, seperti dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terbukti tak mampu menyerap dana triliunan rupiah yang sudah disiapkan. Wakil Ketua Komisi X DPR Prof. Anwar Arifin mengungkapkan, tahun 2007 dari total pagu anggaran Rp 44 triliun, yang tak terserap mencapai Rp 4 triliun. Bahkan terdapat ratusan miliar rupiah dana untuk tunjangan sertifikasi guru terpaksa hangus, sehingga harus direalokasikan kembali ke tahun anggaran berikutnya. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan *grand design* atau cetak biru pendidikan nasional.

Barangkali orientasi pendidikan bebas biaya yang seolah dipahami sebagai pendidikan berbiaya murah, ikut memengaruhi pemerintah (Depdiknas) dalam memaknai pengalokasian anggaran pendidikan. Terlihat dari kebijakan Depdiknas yang hanya mengalokasikan biaya pendidikan sebesar Rp 235 ribu per siswa per tahun untuk jenjang SD dan sederajat. Padahal menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana diutarakan oleh Ade Irawan, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW kepada *Berita Indonesia*, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa yang terkait langsung dengan kegiatan belajar-mengajar di 10 daerah yang diteliti rata-rata mencapai Rp 1,5 jutaan. Itu berarti, dana bantuan operasional sekolah yang sebesar Rp 235 ribu per siswa per tahun itu amat kecil.

Untuk menyikapi hal ini, kita menyarankan agar pemerintah lebih membuka diri, mempertajam visi dan memperluas jangkauan mengajak dan mendayagunakan semua potensi lembaga pendidikan di negeri ini. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberi pemahaman luas bahwa pendidikan bebas biaya (gratis) bukan berarti pendidikan murah atau tanpa biaya. Melainkan pendidikan membutuhkan biaya besar. Namun, untuk memberi kesempatan memperoleh pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin, pemerintah (negara) menanggung biaya besar tersebut.

Jadi, rakyat miskin harus juga diberi kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dengan biaya besar yang ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya membiayai mereka untuk bersekolah di sekolah-sekolah bermutu, baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam hal ini, pemerintah juga harus mendorong dan mendukung pihak swasta yang mengelola pendidikan bermutu, yang sudah barang tentu (mau tidak mau, mesti) berbiaya relatif besar. Untuk itulah, antara lain, diperlukan anggaran pemerintah yang besar untuk pendidikan. ■





Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http ://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840

Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736

Isinya Lengkap

Majalah Berita Indonesia isi beritanya sangat bagus, cocok untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Kalau bisa terbit seminggu 3x karena di samping isinya lengkap juga ada ilmu pengetahuannya. Saya berharap majalah Berita Indonesia tetap eksis dan dibaca oleh semua orang Indonesia.

Imus Lim
srimoes@yahoo.co.id

Kesal dengan Malaysia

Saya dan banyak teman-teman di Malaysia merasa kesal, marah dan malu dengan aksi ganas polisi yang memukuli Saudara Donald di Nilai. Semoga mereka yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Kami berdoa agar Donald cepat sembuh dan mendapat kekuatan kembali. Sebenarnya keganasan

polisi di Malaysia bukanlah perkara baru. Kami juga kesal dan tidak mengerti mengapa Malaysia tidak mau meminta maaf kepada bangsa dan negara Indonesia. Bagaimanapun marilah kita tetap meneruskan jalinan persaudaraan yang kita miliki selama ini.

William Lo
williamloh63@yahoo.com

Indonesia Punya Harga Diri

Membaca berita bahwa pemerintah Malaysia menolak minta maaf atas kasus pemukulan polisi Malaysia terhadap wasit karate Indonesia, saya sangat kecewa terhadap Malaysia dan pemerintah RI. Kecewa terhadap Malaysia karena tampaknya menganggap enteng kasus ini. Mereka tidak mengerti perasaan kita sebagai bangsa Indonesia yang selalu diinjak-injak. Mereka terkesan arogan. Pemerintah RI sendiri terkesan lembek. Dan begitulah pemerintah kita selalu lembek jika dihadapan Malaysia, dari urusan TKI, perbatasan, dan sekarang wasit karate dipukul. Kenapa sih harus takut dengan Malaysia? Betul, banyak masalah di dalam negeri dan itu merupakan kesalahan sendiri dan harus diperbaiki. Betul bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Tapi kita harus menunjukkan ke negara lain khususnya Malaysia bahwa kita punya harga diri. Ayo Pak SBY jangan

lembek. Kita rakyat Indonesia mendukung kok. Apa kalau perlu kita demo? Saya pikir tidak perlu kalau kita tegas sejak awal.

L. Rinto Nugroho
rinto708@yahoo.com

Kenaikan Tarif Tol Mbingungkan

Saya membaca banyak berita tentang kenaikan tarif jalan tol dan kaget melihat kenaikan tarif menjadi Rp 6.000. Sebenarnya sangat mbingungkan, bukankah jalan tol dibuat dari jalan milik negara/rakyat sebelumnya. Kenapa tarif jalan tol semakin lama semakin mahal dan masuk ke PT Jasa Marga (private company) lagi. Bukankah itu yang dinamakan monopoli, kolusi atau korupsi? Kenaikan ini juga tidak didukung dengan fasilitas atau kondisi yang ada seperti daya beli masyarakat yang semakin menurun, transport yang tidak memadai, dan kemacetan dan service yang buruk selama di jalan tol.

Shiryu Lee
lee_shiryu@yahoo.com.sg

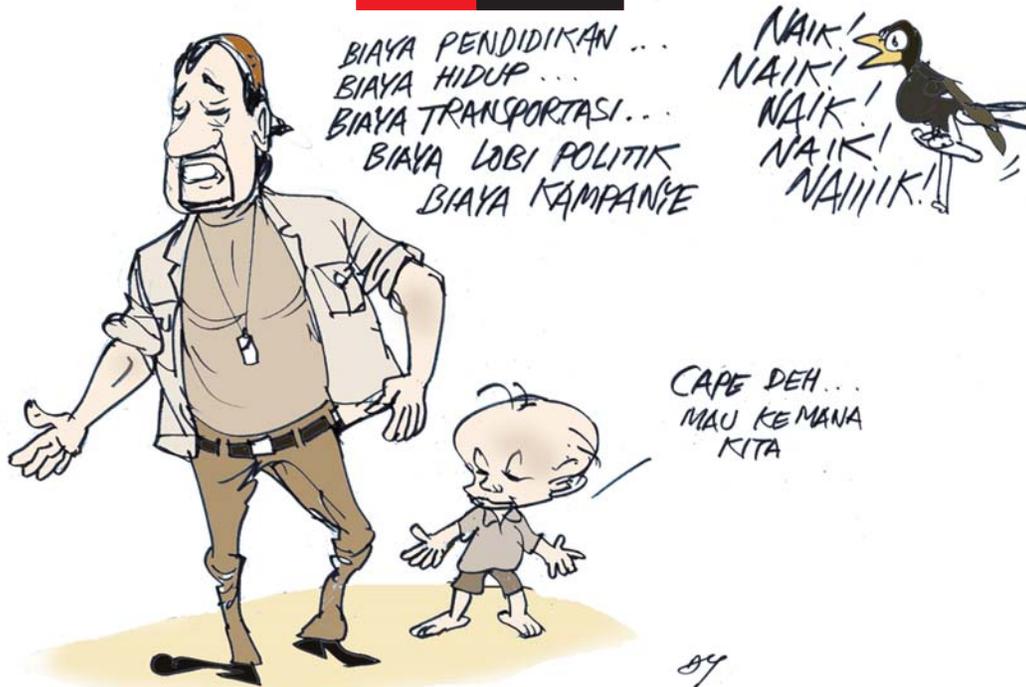
Rakyat Berhak Dapat Subsidi

Saya sedih akan rencana pemerintah yang akan menghapus minyak tanah. Seperti yang kita tahu bersama bahwa minyak tanah adalah konsumsi rakyat Indonesia sejak lama, harganya murah, untuk itulah minyak tanah mendapat subsidi oleh pemerintah. Tapi kenapa

PASTIKAN BERITAINDONESIA®

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 – Fax.(021) 8293113, 9101871



SURAT KOMENTAR

http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/

kok pemerintah tiba-tiba mau menghapus minyak tanah dan mengantinya dengan gas, padahal sekarang saja untuk mendapatkan gas yang dianjurkan pemerintah susah, ibarat jual motor tapi tidak menyediakan suku cadangnya. Rakyat berhak mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal kebutuhan primer. Kalau alasan bahwa minyak tanah banyak diselewengkan, bagaimana hasil pemasukan pemerintah, apa aman dari penyelewengan. Kalau subsidi dialihkan buat yang lain akan aman juga dari penyelewengan? Saya mohon agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Jadikanlah kepentingan rakyat di atas segalanya. Kalau pengambil kebijakan negara ini kan tidak pernah antre minyak atau hidup dengan makan nasi aking, karena semuanya sudah ditanggung pemerintah, gaji utuh, listrik kebutuhan pokok, kesehatan bahkan sekolah anak, pemerintah yang tanggung. Jadi tidak punya rasa susah.

Indra Moelyono
indramoelyono@yahoo.com

Hukuman Berat Bagi Pemalsu KTP dan Paspor

Saya mengamati, cukup banyak kasus pelanggaran hukum di Indonesia selalu bertalian dengan urusan pemalsuan KTP dan Paspor. Dari urusan pelarian tahanan, calon tersangka hingga TKI-TKW berdokumen

palsu yang pada gilirannya menyebabkan kerugian negara dalam bentuk proses penanganan TKI-W bermasalah. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, sudah saatnya Pemerintah bersikap tegas dalam penerapan hukum bahwa siapapun yang terlibat pemalsuan data diri mulai dari KTP hingga penerbitan paspor ASPAL (asli tetapi palsu) diancam hukuman kurungan 25 tahun penjara plus kerja bakti sosial (penghijauan, membersihkan kali, dan sebagainya). Sudah saatnya Pemerintah menata kembali kehidupan masyarakat yang baik dan benar berlandaskan law and order yang tampak semakin kabur dan merendahkan/tidak menghormati hukum.

S. Sitorus
ssitoruss@hotmail.com

Penggunaan HP di Pesawat Memprihatinkan

Tiap kali saya harus bepergian dan menggunakan transportasi udara, sungguh saya sangat khawatir akan keselamatan diri. Belum lagi genap satu tahun kejadian Adam Air berlalu, tapi tingkah dan kedisiplinan pengguna angkutan udara sungguh memprihatinkan. Berulang kali diperingatkan mengenai urusan ponsel atau HP yang tidak boleh digunakan selama berada di kabin tidak digubris sama sekali. Ke-

jadi pesawat yang nyasar sampai jauh dari tujuan yang pernah terjadi juga sungguh tidak terlintas dalam benak kita lagi. Siapa sih di negeri ini yang tidak punya barang yang satu ini? Saya rasa hampir semua orang tahu bahwa anda juga memiliki satu, dua, bahkan lebih dari dua HP. Hanya menunggu hingga kita keluar dari kabin saja seakan-akan sudah sangat tidak sabar lagi. Belum lagi pesawat berhenti, bunyi HP aktif saling bersahut-sahutan. Sebaiknya hal-hal yang membahayakan dan merugikan orang lain segera dikampanyekan dan diberi sanksi supaya kita bisa belajar disiplin dan taat akan setiap hal yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Lilis M
lst_lilis@yahoo.com

Ralat

Pada penerbitan Majalah Berita Indonesia Edisi 45, terdapat kesalahan teknis dalam pemuatan berita di halaman 65. Termuat Berita Kesehatan, seharusnya Berita Resensi. Oleh karena itu, pada edisi 46 ini kami memuat Berita Buku tersebut. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, kami mohon maaf.

Redaksi

Akhir Agustus lalu, para pengguna jalan tol lingkaran Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) terusik kenyamanannya. Arus lalu lintas di gardu tol macet karena terjadi dialog antara pengemudi dan petugas pintu tol pada saat transaksi. Kebanyakan pengguna jalan tol itu cuma bisa terkaget-kaget dan marah karena dipaksa membayar tarif tol lebih mahal dari hari-hari sebelumnya. Harian Kompas (31/8) menulis secara khusus 'keributan' di gerbang tol ini dalam berita berjudul "Gaji Sudah Kecil, Eh Dimaki-maki Sepanjang Hari...". Di situ dikisahkan pengalaman para personel penerima uang tol yang cuma digaji di bawah satu juta itu, saat dimaki-maki oleh pengguna jalan tol.

Kata-kata makian tidak cuma datang dari mulut orang awam, tetapi juga keluar dari mulut profesor, pejabat, bahkan orang kaya yang merasa tidak pernah diberitahu soal kenaikan tarif tersebut. Saking marahnya, bahkan ada di antara mereka yang melemparkan uang tol ke jalan sambil mengeluarkan kata-kata kotor atau meludahi uang tol itu lebih dahulu. "Saya ini profesor doktor, S-3. Pejabat yang menetapkan tarif tol enggak becus. Tak bisa hitung tarif tol dengan benar," umpat seorang pengguna tol dengan nada tinggi. Ada juga yang nyeletuk, "Jasa Marga perampok." Nada makian lainnya mengarah kepada pejabat negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, merampas duit rakyat, ataupun hanya bisa korupsi.

Kegusaran dan protes pengguna jasa jalan tol ini memang beralasan. Selain merasa tidak pernah diberitahu sebelumnya, diberlakukannya sistem terbuka pembayaran tarif tol lingkaran Jakarta, Rabu (29/8), membuat pengguna tol jarak dekat harus membayar tarif yang sama dengan pengguna jarak jauh. Tarif untuk golongan I, misalnya, sebesar Rp 6.000 untuk jarak terjauh 45 kilometer. Namun, walaupun pengguna hanya melintas sejauh 1 kilometer di ruas JORR, mereka tetap dikenai

Menggugat Arogansi Pemerintah

Penerapan tarif sistem terbuka dan penyesuaian tarif 13 ruas jalan tol di Indonesia yang diberlakukan pemerintah mulai 4 September membuat pengguna jalan tol (masyarakat) menghela napas. Ongkos angkutan umum menjadi naik dan gugatan class action terhadap keputusan pemerintah itu digulirkan. Pemerintah, malah menjawab enteng.



tarif Rp 6.000. Dengan sistem lama (sistem tertutup), pengguna tol yang biasanya hanya membayar Rp 3.000, misalnya, untuk jarak yang sama dalam sistem baru mereka terpaksa membayar Rp 10.500. Itu karena adanya perpindahan antartol. Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif 13 ruas tol (4/9) dengan kenaikan rata-rata 20% kecuali tol JORR, Jakarta-Cikampek, dan tol Cengkareng.

Kalangan pengusaha mempunyai hitung-hitungannya sendiri tentang tarif tol ini. Angka Rp 6.000 yang dipungut dari pengguna tol didapat dari penghitungan tepat hasil perkalian antara average length trip (ALT) atau jarak rata-rata yang ditempuh pengguna tol dan tarif dasar tol Rp 430 per km. Menurut Siswono Yudo Husodo, salah seorang pengusaha nasional yang saat ini mengelola Jalan Tol Cawang-Cikampek dan tengah membangun ruas jalan tol dari Kebon Jeruk ke Bandara Soekarno-Hatta, untuk membangun jaringan jalan tol yang berada di atas tanah berkonsentrasi tiang beton berbiaya Rp

200 miliar per km. Untuk jaringan jalan tol yang dibangun di atas tanah, investasinya sekitar Rp 50 miliar per km bergantung pada kondisi di lapangan. Investasi itu hampir sama nilainya dengan pembangunan jaringan tol di negara lain. Namun, tarif tol di Indonesia masih tetap yang paling rendah di Asia, yaitu terendah Rp 180 per km dan tertinggi Rp 600 per km. Adapun tarif tol terendah di Malaysia berkisar Rp 900 per km dan di China Rp 1.100 per km.

Hitung-hitungan kalangan pengusaha ini cuma semakin menunjukkan bahwa jalan tol semakin hari semakin nyata dibuat bukan untuk rakyat, bukan untuk publik, melainkan untuk mereka yang punya uang dan mereka yang punya usaha. Padahal, di sejumlah negara maju, jalan tol itu gratis (hanya di titik-titik tertentu harus membayar) sebab rakyatnya sudah membayar pajak dan pemerintah berkomitmen menyediakan jalan tol. Sedangkan di Indonesia, ada ruas jalan tol yang telah lama melampaui titik impas, yang telah bertahun-tahun menghasilkan

keuntungan berlipat, malah terus memungut bayaran, bahkan terus naik. Bukannya dibikin gratis dan dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat.

Masyarakat (khususnya pengguna tol) melihat bahwa perubahan sistem dan penyesuaian tarif tol itu membuktikan kesewenang-wenangan dan arogansi pengelola jalan raya karena dilakukan tanpa diskusi, konsultasi, dan sosialisasi layak dengan masyarakat. Mereka abaikan begitu saja hak-hak konsumen. Hingga tulisan ini diturunkan, sedikitnya 1.000 pengguna tol di Jakarta dan sekitarnya akan mengajukan gugatan bersama atau *class action*. Gugatan itu, menurut mereka, bukan karena tidak mampu membayar tol, tetapi gerakan ini dinyatakan sebagai kesadaran kelas menengah menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah, menaikkan tarif tol. Mereka menggunakan haknya agar pemerintah tidak suka-sukanya mengeluarkan keputusan. Sebab pelayanan masih buruk namun tarif dinaikkan begitu saja. Contoh buram pelayanan itu diantaranya, meski jalan tol sudah macet, pengelola jalan tol masih membiarkan mobil-mobil lain masuk ke jalan tol - pengelola cuma peduli uangnya. Pengguna jalan tol pun tidak dilindungi dari pemsaran mobil derek liar yang bebas berkeliaran di jalan tol.

Menanggapi adanya kemungkinan *class action* dari masyarakat, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan siap menghadapi gugatan *class action* dari kelompok mana pun. Protes dan kecaman meluas, namun pemerintah tetap cuek. Pejabat pemerintah pun dengan enteng menjawab protes masyarakat itu. Mengutip pernyataan Wapres Jusuf Kala, "Kalau tidak bisa membayar (jalan tol) tentu lewat jalan biasa saja." Kalau jawabannya sudah begitu, kasihan bagi mereka yang tidak punya uang harus lewat jalan biasa yang macet. Yah, inilah Indonesia, presiden, gubernur, DPR cuma manis saat kampanye. Setelah itu? ■ MLP

Bagir Manan dan Mafia Peradilan

21/8 - Pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan bahwa Mahkamah Agung sudah mulai berubah dan tidak lagi sarat mafia peradilan memicu protes. Sejumlah kalangan berpendapat sebaliknya, yakni praktik mafia peradilan justru lebih marak pascareformasi atau semasa kepemimpinan Bagir. Pernyataan tersebut antara lain diungkapkan oleh mantan hakim agung yang juga Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Purnabhakti Hakim Agung (KKPHA) Benjamin Mangkoedilaga dan anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, Selasa (21/8). Menurut Benny, pernyataan Bagir tersebut menunjukkan bahwa Bagir sudah termakan dalam sistem. Ia khawatir Ketua MA sudah tidak dapat melihat atau membedakan mana yang termasuk mafia peradilan atau mana yang bukan.

Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Taufik Basari menambahkan, dari 14 kantor LBH di Indonesia, semua pernah menerima pengaduan praktik mafia peradilan. Bahkan, selama tahun 2005, Kantor LBH Semarang menangani tujuh kasus mafia peradilan. Sedangkan di tingkat MA, praktik mafia peradilan dapat dilihat dari adanya tiga pegawai MA yang pada Juni lalu diberhentikan dengan tidak hormat karena dinilai bersalah telah "menjual" draf putusan hasil musyawarah hakim agung kepada pihak yang berperkara.

Pengusuran Seputar Tol di Jakarta

22/8 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berketetapan mengusur hunian, tempat usaha liar di kolong tol, termasuk semua bangunan di sisi atau ruang milik jalan tol. Untuk me-

nampung masyarakat yang tergusur, pemerintah sudah menyediakan 1.980 rumah susun dan memberikan biaya kontrak rumah setahun bagi yang belum mendapat jatah rumah susun. "Warga yang diprioritaskan mendapat jatah rusun adalah mereka yang secara administratif nyata-nyata penduduk DKI Jakarta. Status rusun itu disewa dan diberi harga khusus," kata Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas. Oleh

sebab itu, semua warga DKI Jakarta yang bakal tergusur dari kolong tol Tanjung Priok-Penjarangan, Jakarta Utara, sejauh 13 kilometer, diimbau tidak perlu risau soal tempat tinggal yang baru. Pengusuran yang dilakukan akhir Agustus ini membuat sekitar 6.000 keluarga dengan jumlah tanggungan hampir 14.000 orang, harus pindah. Di antara mereka yang tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta hanya sekitar 24 persen.

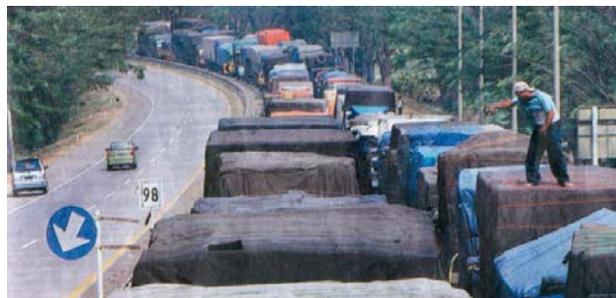


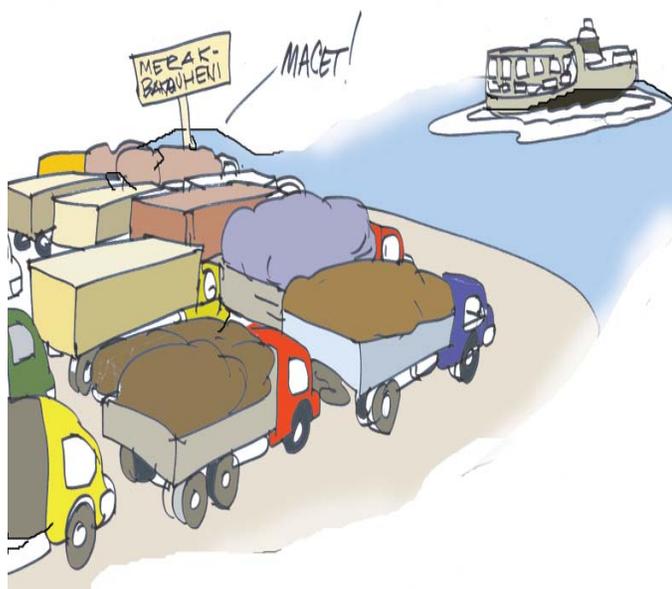
foto: repro kompas

Pelabuhan Merak Macet Lagi

23/8 - Pelabuhan Penyeberangan Merak di Cilegon, Banten kembali padat. Hingga Jumat (31/8) antrean

truk bertambah panjang hingga lebih kurang 15 kilometer dari pintu masuk pelabuhan. Penumpukan

Karikatur Berita



kendaraan yang terjadi di Merak dan Bakauheuni akibat kurangnya kapal penyeberangan yang beroperasi. Setidaknya ada enam kapal yang secara bersamaan diperbaiki. Dalam kondisi normal, lintasan penyeberangan Merak-Bakauheuni minimal harus dilayani 18 kapal. Namun, jumlah kapal yang melayani di lintasan tersebut hanya 12 kapal. Perbaikan kapal yang dilakukan secara

bersamaan ini, terkait dengan upaya peningkatan perbaikan faktor keselamatan pelayaran yang menjadi kebijakan pemerintah. Sayangnya, penerapan kebijakan pemerintah tersebut tidak dibarengi dengan usaha mengantisipasi kekurangan kapal penyeberangan. Akibatnya, para sopir truk yang terjebak kemacetan mengeluhkan muatan mereka yang mulai membusuk.



foto: berindo wilson

Pemukulan Wasit Karate Indonesia di Malaysia

24/8 - Seorang ketua delegasi wasit karate Indonesia Donal Peter Luther Kolopita dikeroyok dan dipukuli empat polisi Malaysia hingga babak belur di sela-sela kejuaraan karate internasional di Negeri Sembilan. Akibat insiden ini, Indonesia akhir-

nya menarik diri dari keikutsertaan di kejuaraan tersebut, sebagai bentuk solidaritas dan protes atas pemukulan Donal yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ulah polisi Malaysia yang semena-mena itu membuat masyarakat Indonesia marah.

Mereka merasa harga diri Indonesia diinjak-injak dan meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara terbuka. Setelah aksi protes makin memans, pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi akhirnya secara resmi meminta maaf (29/8) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono via telepon. Presiden meminta agar kasus ini diselesaikan menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Malaysia.

Penculik Raisya Ditangkap

24/8 - Drama penculikan Raisya Ali Said (5) berakhir bahagia. Bocah perempuan lucu ini akhirnya dibebaskan lima penculiknya, Jumat (24/8) pagi dengan kondisi tidak terluka. Raisya diculik sejak Kamis (9/8) lalu oleh sekelompok orang bermobil Suzuki APV dalam perjalanan pulang dari sekolahnya, TK Al Ikhlas Jatiwaringin. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jendral Adang Firman kepada pers menegaskan, penculikan anak pengurus Himpunan Peng-

usaha Muda Indonesia (HIPMI) Ali Said ini bermotif ekonomi. Kelima penculik berniat minta uang tebusan untuk membayar utang mereka sebesar Rp 150 juta. Para penculik, YP dan Ang adalah alumni SMA Negeri 35, sedang BS, J, dan SA masih siswa SMA tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla mengucapkan selamat dengan telah ditemukannya Raisya dalam keadaan sehat dan meminta masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

Gus Dur Bekukan 40 Cabang PKB

25/8 - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB membekukan kepengurusan 40 cabang dari total 400 cabang PKB di Indonesia. "Hari ini (Sabtu), saya bekukan 40 cabang dari 400 cabang yang ada. Sepuluh persen dibekukan. Karena dengan pembekuan ini, kita bebas merombak kepemimpinan," ujar Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketika menjadi pembicara

Karikatur Berita



kunci dalam acara seminar yang diadakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) di Jakarta. Ketua DPP PKB Hermawati Taslim mengatakan, alasan pembekuan 40 cabang itu bervariasi, di antaranya, cabang yang menolak hasil muktamar Semarang terbukti melakukan politik transaksional pada saat pilkada, dan pengurus cabang yang sudah dikenai proses hukum terkait perkara pidana.

PAN Mereposisi Diri

26/8 - Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menjadi partai yang prorakyat dengan mereposisi diri sebagai partai bebas dan kritis terhadap pemerintah. Sikap itu disampaikan ketua umumnya, Soetrisno Bachir, kepada wartawan di sela-sela kegiatan gerak jalan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta (26/8) dalam rangka memperingati hari jadi ke-9 PAN. Menurut Soetrisno, PAN tidak akan mendukung kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Manuver PAN ini agaknya tidak terlepas dengan kepentingan partai ke depan. Selama ini, PAN yang

memiliki dua kader di Kabinet Indonesia Bersatu (Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mensesneg Hatta Rajasa), merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan SBY-JK. Apa pun kebijakan yang diambil pemerintah sepenuhnya didukung PAN. Misalnya saja dalam kebijakan menaikkan harga BBM dan impor beras yang sempat menimbulkan polemik karena dianggap membebankan rakyat.

Kotak Hitam AdamAir Ditemukan

27/8 - Kotak hitam pesawat AdamAir dengan nomor penerbangan KI-574 yang hilang di Selat Makassar dalam penerbangan dari Surabaya ke Manado, 1 Januari 2007 ditemukan di kedalaman 1.400-2.000 meter dari permukaan laut Majene, Sulawesi Barat. Selain kotak hitam itu yakni Flight Data Recorder (FDR), juga ditemukan Cockpit Voice Recorder (CVR). Kotak hitam itu segera dibawa ke Amerika Serikat untuk dianalisa secepatnya. Penemuan kotak hitam AdamAir ini diharap-

kan dapat mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan AdamAir. Sebab sampai saat ini belum bisa disimpulkan penyebab hilang dan jatuhnya AdamAir di Selat Makassar. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Tatang Kurniadi, menjelaskan bahwa upaya pengambilan kotak hitam dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari perusahaan Phoenix, AS menggunakan kapal *off-shore tug supply vessel* berbendera Cyprus dengan peralatan deep sea recovery robot yang dikendalikan dari kapal tersebut.

ORI Seri 3 Sangat Diminati

28/8 - Sehari setelah diluncurkannya obligasi negara ritel ORI Seri 003 (27/8), minat masyarakat untuk memilikinya rupanya masih cukup tinggi. Ini dilihat dari adanya beberapa agen penjual yang telah mencapai target mereka dalam dua hari penawaran. "Beberapa agen sudah mencapai target mereka, padahal penawaran masih akan berlangsung hingga 7 September. Jadi,

minat masyarakat untuk membeli ORI003 masih besar," kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, di Jakarta. ORI Seri 003 yang diterbitkan pemerintah (negara) untuk membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan kelanjutan dari ORI Seri 001 dan 002 yang masing-masing diterbitkan 9 Agustus 2007 dan 26 Maret 2007. Bagi investor yang ingin memiliki (membeli) ORI Seri 003 minimal pesanan senilai Rp 5 juta dan kelipatannya sedangkan maksimal pemesanan Rp 3 miliar, atau lebih rendah dibanding maksimal pemesanan ORI Seri 002 yang mencapai Rp 5 miliar. Bunga ORI Seri 003 yang mencapai 9,4% cukup menarik dibandingkan produk perbankan lainnya di antaranya deposito atau tabungan yang terus menurun.

Mardiyanto Mendagri Baru

29/8 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Mardiyanto sebagai Mendagri baru. Penunjuk-



kan Gubernur Jawa Tengah itu menggantikan Mohamad Ma'arif yang masih menjalani terapi penyembuhan penyakitnya. Presiden bersama Wapres Jusuf Kalla sempat mendiskusikan tiga nama calon Mendagri yang akan menggantikan posisi Ma'arif. Selain Gubernur Jateng Mardiyanto, juga Sekjen Dewan Ketahanan Nasional M Yasin, dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Pelantikan Mardiyanto dilaksanakan Rabu (29/8) pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Saat pelantikan, Mardiyanto berjanji tidak akan melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara, termasuk tindakan KKN dalam menjalankan tugasnya. Nampak hadir dalam acara tersebut, Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

UGM Masuk 100 Besar 'Webometric' Asia

30/8 - Website Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta kembali masuk

dalam 100 besar webometric Asia dan menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia yang terpilih dalam peringkat itu. Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tahun lalu juga mampu menembus 100 besar, tahun ini keluar dari daftar. Pengukuran yang dilakukan oleh webometric didasarkan pada besarnya materi digital yang dimiliki sebuah website PT, besarnya materi digital dalam format *rich content*, dan banyaknya website yang mengutip atau memuat *link* ke sumber-sumber data di website PT tersebut. Website UGM, ugm.ac.id berhasil menaikkan peringkat dari tahun lalu yang hanya peringkat 100 Asia menjadi peringkat 95 Asia. Website yang mendominasi peringkat webometric Asia adalah website PT dari Jepang dan Singapura, beberapa website PT di Thailand dan Filipina juga berhasil meraih peringkat. Kenyataan bahwa hanya ada satu PT di Indonesia yang masuk 100 besar webometric Asia merupakan hal yang memprihatinkan, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 3.000 PT.



foto: berindo wilson

Tarif Tol JORR Diprotes

31/8 - Sehari setelah diberlakukannya sistem terbuka pembayaran tarif tol lingkaran luar Jakarta, Rabu (29/8), protes keras masyarakat muncul di mana-mana. Pasalnya, pengguna tol jarak dekat harus membayar tarif yang sama dengan pengguna jarak jauh. Tarif untuk golongan I, misalnya, sebesar Rp 6.000 untuk jarak terjauh 45 kilometer. Namun, walaupun pengguna hanya melintas sejauh 1 kilometer di ruas JORR, mereka tetap dikenai tarif Rp 6.000. Dengan sistem lama (sistem tertutup), pengguna tol yang biasanya hanya membayar Rp 3.000, misalnya, untuk jarak yang sama dalam sistem baru mereka terpaksa membayar

Rp 10.500. Itu karena adanya perpindahan antartol. Protes ini membuat sedikitnya 1.000 pengguna tol di Jakarta dan sekitarnya akan mengajukan gugatan bersama atau *class action*. Gugatan itu, menurut mereka, bukan karena tidak mampu membayar tol, tetapi mereka menggunakan haknya agar pemerintah tidak suka-sukanya mengeluarkan keputusan.

Presiden Korsel Ucapan Terima Kasih Kepada SBY

1/9 - Ucapan syukur alhamdulillah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesaat setelah mengakhiri pembicaraan

Karikatur Berita



dengan Presiden Korea Selatan Roh Moo-yun melalui telepon genggam di Bandar Udara Halim Perdana-kusuma, Jakarta, Sabtu (1/9). Dalam pembicaraan tujuh menit itu, Presiden Korsel berterima kasih atas dukungan diplomat Indonesia di Kabul, Afganistan, dalam proses pembebasan 19 sandera warga Korsel. Para sandera ini sudah kembali ke negaranya melalui Dubai. Presiden Korsel menekankan, salah satu isu mengganjal dalam proses pembebasan adalah soal observer. Menurut Roh Moo-yun, Indonesia berhasil memecahkan masalah itu dengan partisipasi diplomat RI di Kabul. Pemerintah Seoul menyatakan, mereka telah sepakat menarik 200 prajurit Korea Selatan dari Afghanistan, yang sudah diputuskan sebelum drama penculikan tersebut, sebelum akhir tahun ini. Mereka juga berjanji tidak mengirim lagi "misionaris Kristen" ke negara itu.

Menjelang Ramadan, Harga Barang Terus Naik

2/9 - Menjelang bulan

puasa, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mulai melonjak. Kenaikan terjadi akibat berkurangnya pasokan, kendala distribusi, serta psikologi masyarakat yang cenderung berbelanja lebih banyak dibanding biasanya. Di sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur misalnya, harga kebutuhan pokok naik hingga 40 persen dari harga biasa. Marwoto, pedagang di Pasar Induk Banyuwangi mengatakan, lonjakan harga juga terjadi pada beras yang naik rata-rata Rp 200 per kilogram. Sedangkan minyak goreng naik rata-rata Rp 1.500 per kilogram. Sedangkan di Pasar Pa-baeng-Baeng dan Sambungjawa, Makassar misalnya, bawang merah yang sebelumnya Rp 7.000, sudah dijual Rp 8.000 per kilogram, demikian pula bawang putih. Harga ayam potong juga naik, dari Rp 12.000 jadi Rp 15.000-Rp 17.000 per kg. Di Medan dan Padang, harga telur juga terus naik, sementara harga barang lainnya cenderung stabil. Di Pasar Pringgan, harga mentega per 15 kg naik dari Rp 98.000 menjadi Rp

107.000. Di Palu, Sulawesi Tengah, para pedagang memperkirakan harga akan terus naik sampai satu hari menjelang Ramadhan.

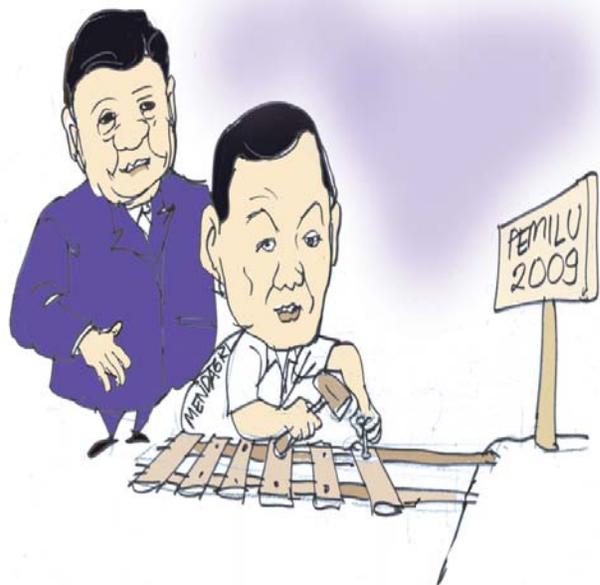
Kejagung Di-"disclaimer"

3/9 - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini *disclaimer* atau tidak menyatakan pendapat terhadap neraca Kejaksaan Agung. Sebab pencatatan neraca belum mengikuti ketentuan sistem akuntansi instansi yang ditetapkan Departemen Keuangan. Kejagung juga belum dapat mengklasifikasi umur piutang uang pengganti. Sampai dengan 31 Desember 2006, posisi piutang uang pengganti yang tercatat di neraca Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,314 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 85 persen total neraca Kejaksaan Agung. Demikian disampaikan Imran, anggota I BPK yang membawahkan audit terhadap Kejaksaan Agung dalam jumpa pers di Kantor BPK, Senin (3/9). Menurut Imran, persoalan uang pengganti di media massa sim-

pang siur. Untuk meluruskan data uang pengganti, BPK mengundang Kejaksaan dan Departemen Keuangan.

PT DI Dipailitkan Pemerintah Kasasi

4/9 - Dirgantara Indonesia atau PT DI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT DI dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada eks karyawannya yang diberhentikan sejak 2003. Atas putusan itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara langsung mengajukan kasasi melalui kuasa hukumnya, Puguh Wirawah, ke Mahkamah Agung. Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, aset negara tidak bisa disita. BUMN merupakan aset negara, untuk melakukan sesuatu terhadap aset itu harus melalui persetujuan menteri dan DPR.



Anggaran Pendidikan 2008

IRONI, JIKA DIKNAS KE

Betul-betul menjadi sebuah ironi nasional sekaligus tragis manakala berbagai komponen bangsa “sepakat” untuk sama-sama melanggar konstitusi tentang anggaran pendidikan. Konstitusi, yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. Semakin ironis lagi setelah mengetahui fakta bahwa Depdiknas sendirilah yang telah kehilangan orientasi pendidikan. Depdiknas belum mampu menyerap pagu anggaran kendati persentasenya masih jauh dari ketentuan dan amanat konstitusi.

Departemen yang gedung perkantoran terlihat mewah hingga lebih mirip pusat belanja atau mall, ini terbukti tak mampu menyerap dana triliunan rupiah yang sudah disiapkan. Wakil Ketua Komisi X DPR Prof. Anwar Arifin mengatakan, tahun 2007 dari total pagu anggaran Rp 44 triliun, yang tak terserap mencapai Rp 4 triliun. Bahkan terdapat ratusan miliar rupiah dana untuk tunjangan sertifikasi guru terpaksa hangus, sehingga harus direalokasikan kembali ke tahun anggaran berikutnya. Ketidakjelasan *grand design* atau cetak biru sistem pendidikan nasional semakin memperburuk citra pendidikan sebab anggaran yang dikelola menjadi dinilai belum benar-benar sesuai target, tak tepat sasaran, maupun tak tepat jumlahnya.

Kelemahan kinerja Depdiknas ini kemudian dijadikan sebagai sasaran empuk sekaligus kambing hitam oleh para penentu dan pengambil keputusan anggaran, untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak konstitusional. Sebab keputusan mereka itu nyata-nyata sudah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4), dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Keduanya bicara soal alokasi anggaran pendidikan.

Memang, secara absolut, anggaran untuk sektor pendidikan pada tahun 2008 mengalami peningkatan. Namun secara persentase justru menurun dari 11,3 persen tahun 2007, menjadi 10,9 persen tahun 2008.

Ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun 2008 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI Kamis 16 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa untuk sektor pendidikan anggarannya mencapai Rp 61,4 triliun, atau 10,9 persen dari total belanja pemerintah pusat yang besarnya Rp 564,6 triliun. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) direncanakan memperoleh alokasi anggaran Rp 48,2 triliun. Anggaran pendidikan lainnya terdapat di Departemen Agama.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2007 total belanja pemerintah pusat untuk sektor pendidikan Rp 52,4 triliun, atau 10,6 persen dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 493,9 triliun. Dengan demikian setelah dihitung-hitung terbukti rancangan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2008 justru menurun dibanding tahun 2007. Pada tahun 2007 anggaran untuk Depdiknas Rp 44,9 triliun, dan Departemen Agama Rp 11 triliun. Berarti, anggaran pendidikan tahun 2007 mencapai Rp 55,9 triliun, atau 11,3 persen dari total belanja pemerintah pusat tahun 2007 sebesar Rp 493,9 triliun.

Ketidakpedulian menyediakan pendidikan bermutu yang bisa diakses semua warga telah menenggelamkan citra bangsa ini di forum internasional. Sebuah penelitian Program Pembangunan PBB (UNDP) menunjukkan, kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia berada di peringkat ke-109 dari seluruh 174 negara di dunia yang diteliti. Posisi Indonesia ini berbeda jauh dengan negara tetangga



Singapura yang berada di peringkat ke-24, Malaysia (61), Thailand (76), dan Filipina (77).

Hal termudah mencari penyebab keterpurukan itu tentu saja adalah alokasi anggaran pendidikan yang minim. Lagi-lagi sebagai gambaran, Malaysia sudah menganggarkan 23 persen dari anggaran tahunannya untuk sektor pendidikan, Singapura 19 persen, Thailand 22 persen, dan Filipina 20 persen. Karena itu jangan kaget apabila mengetahui fakta yang lebih buruk lagi. Hasil penelitian yang dilansir oleh PERC (*The Political and Economics Risk Consultancy*), sebuah lembaga konsultan berbasis di Singapura pada September 2001 lalu menunjukkan, kualitas sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 12 negara-negara Asia yang diteliti oleh PERC.

Padahal *grand design* sistem pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya

KEHILANGAN ORIENTASI



ilustrasi: denny

sudah diarahkan kepada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tetapi tujuan mulia sistem pendidikan nasional itu rasanya masih seperti menara gading yang tak bisa tersentuh. Bukan hanya karena hasil akhirnya masih menempatkan Indonesia di bagian nomor buncit Asia. Tetapi, cetak biru sistem pendidikan itu ternyata tak mudah untuk diterjemahkan ke dalam program-program pendidikan yang baik dan berkualitas.

Janji Kampanye Adalah Hukum

Di era pemerintahan Presiden Mega-

wati Soekarnoputri pernah muncul kesepakatan di antara DPR dengan tujuh orang menteri, untuk memproyeksikan kenaikan anggaran secara gradual hingga akhirnya dicapai penuh sebesar 20 persen pada tahun 2009. Pada saat itu Menteri Keuangan dijabat oleh Boediono, yang kini Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu.

Caranya, sejak tahun 2004 pemerintah berkomitmen meningkatkan persentase anggaran pendidikan secara progresif. Sehingga pada tahun 2009, sesuai skenario, anggaran pendidikan akan mencapai 20,1 persen dari belanja pemerintah pusat, atau diperkirakan sebesar Rp 85,2 triliun.

Tetapi komitmen nyata pemerintah rupanya tak seprogresif dalam proyeksi. Antara proyeksi dengan realisasi jauh panggang dari api.

Banyak pihak bukannya tak mengkhawatirkan komitmen pemerintah yang le-

mah ini. Bahkan, menjawab *judicial review* terhadap UU No. 18/2006 Tentang APBN 2007, yang diajukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Dr. H. Mohammad Surya, dalam putusannya pada 1 Mei 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) jelas-jelas mengingatkan supaya pemerintah mentaati Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

Yang menarik, ketika sidang *judicial review* digelar pada Selasa 13 Februari 2007. Salah seorang Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, menanyakan bagaimana cara menghitung anggaran berdasarkan angka atau presentase, serta apakah Depdiknas kurang begitu memperjuangkan pemenuhan anggaran 20 persen. Achmad Rochjadi, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan yang bersama Dodi Nandika hadir mewakili pemerintah, menjawab bahwa dasar penentuan prioritas rencana kerja pemerintah didasarkan pada janji kampanye Presiden SBY. Dari setiap poin prioritas, tak selalu suatu program yang menjadi prioritas selalu membutuhkan dana yang lebih besar. "Semua itu tergantung dari adanya rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. *Money follow function*," ucap Rochjadi.

Saat itu Anwar Arifin Wakil Ketua Komisi X DPR yang turut hadir segera memberikan komentarnya. Selama belum ada *good will* dari pemerintah dan tidak ada prioritas berdasarkan payung konstitusi, maka setiap tahun akan ada *judicial review* terhadap UU APBN supaya anggaran pendidikan terpenuhi sebesar 20 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah belum mampu memenuhi anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat konstitusi. Kalla berkali-kali mencoba menenangkan kegelisahan hati para pemangku kepentingan pendidikan dengan mengungkap fakta bahwa, anggaran pendidikan tahun demi tahun selalu naik. Dari Rp 29,3 triliun pada tahun 2005, naik menjadi Rp 52,4 triliun di APBN tahun 2007, dan meningkat lagi di RAPBN 2008 menjadi Rp 61,4 triliun.

Kalla jelas-jelas tak mungkin lupa bahwa yang diamanatkan UUD adalah persentasenya, bukan kenaikan angka absolutnya. Karena itu kalau pemerintah mau

nekat, ujar Kalla, pemerintah bisa saja memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. "Tapi kita harus memotong anggaran kesehatan, subsidi BBM dan anggaran PU. Sekarang ini masih sulit (memenuhi 20 persen), karena kita juga harus membayar hutang," ucapnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini masih punya jurus jitu lain untuk mengelak dari kewajiban memenuhi konstitusi. Menurutnya, pemerintah sudah berupaya meningkatkan persentase anggaran pendidikan 20 persen di APBN 2008, dengan memasukkan gaji guru sebagai komponen anggaran pendidikan. Untuk itu pemerintah akan mengajukan revisi terhadap UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas ke DPR.

UU Sisdiknas yang dibentuk pada saat Kalla sedang menjabat sebagai Menko Kesra pada Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati, dikritiknya sebab poin komponen anggaran hanya berorientasi pada peningkatan fisik gedung sekolah, kurikulum, serta peningkatan keterampilan dan kemampuan guru.

UU tersebut tidak memasukkan anggaran peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. "Karena itu harus kita revisi. Sudah semestinya gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan, sehingga ketika anggaran pendidikan meningkat, kesejahteraan guru juga ikut meningkat. Kalau (gaji guru) tidak masuk (anggaran pendidikan), nanti tidak seimbang. Gedung sekolahnya mewah tapi gaji gurunya kecil," kata Kalla.

Senada dengan Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan anggaran pendidikan. Sri yang pernyataannya kerap kali sejalan dengan Jusuf Kalla, juga mengatakan pemerintah memang berniat menaikkan anggaran pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Diknas Gamang

Kinerja Depdiknas selalu saja menjadi batu sandungan dalam upaya mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, hingga menggiring bangsa ini seolah-olah tak memedulikan amanat konstitusi. Kemampuan Depdiknas sangat diragukan untuk mengelola anggaran yang semakin besar. Sebab setiap kenaikan anggaran pasti akan mengandung risiko lemahnya efisiensi, efektivitas, serta kemungkinan dijadikan sebagai alat bersama untuk memperkaya para pejabat birokrasi Diknas.

Sampai saat ini misalnya, Depdiknas masih belum bisa menetapkan standar minimal pembiayaan yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. Demikian pula standar minimal biaya untuk kebutuhan operasional se-



foto: berindo amron

Sebuah penelitian Program Pembangunan PBB (UNDP) menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada di peringkat ke-109 dari seluruh 174 negara di dunia yang diteliti

kolah, pemenuhan fasilitas, dan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak. Kalkulasi alokasi unit *cost* ini penting sekali untuk menuntaskan jenjang wajib belajar, mengurangi beban biaya orangtua siswa, dan menghindarkan pancaplokan anggaran oleh birokrasi pendidikan.

Bagaimanapun untuk mendapatkan pendidikan bermutu dibutuhkan biaya mahal pula. Sayangnya Depdiknas hanya bisa mengalokasikan biaya pendidikan sebesar Rp 235 ribu per siswa per tahun untuk jenjang SD dan sederajat. Padahal menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana diutarakan oleh Ade Irawan, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW kepada *Berita Indonesia*, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa yang terkait langsung dengan kegiatan belajar-mengajar di 10 daerah yang diteliti rata-rata mencapai Rp 1,5 jutaan. Itu berarti, dana bantuan operasional sekolah yang sebesar Rp 235 ribu per siswa per tahun itu cukup kecil.

Data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas juga mengakui telah terjadi ketimpangan dalam proporsi pembiayaan pendidikan. Dodi Nandika yang kini menjabat Sekjen Depdiknas, saat masih menjabat Kepala Balitbang Depdiknas mengatakan kalau pemerintah hanya menanggung 26,13 persen hingga 46,26 persen dari biaya total pendidikan (BTP).

Karena itu, kata Dodi, situasi alokasi anggaran pendidikan yang tak menyentuh 20 persen sangat berdampak negatif terhadap pemerataan dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Demikian pula terhadap program wajib belajar.

Kegamangan Departemen Pendidikan

Nasional dalam menyediakan dan mengolah sistem pendidikan nasional yang bermutu dijamin oleh Prof. Dr. Anwar Arifin saat diwawancarai oleh Haposan Tampubolon dan Amron Ritonga dari *Berita Indonesia*. Menurut Anwar, ia pernah dua kali mengajukan pertanyaan dalam dua kali kesempatan rapat kerja (Raker) berbeda yang berlangsung secara terbuka, kepada Mendiknas Bambang Sudibyo tentang apa yang akan dilakukan Depdiknas seandainya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dipenuhi semua.

Kata Anwar, Depdiknas yang diwakili Menteri tak bisa menjawab atau memaparkannya, kecuali berkelit dengan mengatakan 'saya akan tanya bos saya dulu'. Padahal, pertanyaan yang diajukan, kata Anwar, justru merupakan pertanyaan titipan dari Wapres Jusuf Kalla yang menjadi salah satu bosnya para Menteri di Kabinet.

Dengan demikian jelas sekali terlihat dua persoalan gelap yang sedang melingkupi dunia pendidikan nasional kita saat ini. Yakni, secara substansial Diknas sudah kehilangan orientasi kependidikan karena tak memiliki *grand design* pendidikan berikut program-programnya yang bermutu yang bisa menyerap pagu anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah bersama DPR. Kedua, persentase anggaran sektor pendidikan yang belum memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas berpotensi menimbulkan implikasi politik yang serius.

Apabila mengacu kepada jawaban Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi di persidangan Mahkamah Konstitusi, bahwa janji kampanye Presiden merupakan produk hukum tertinggi yang bisa mengesampingkan konstitusi, maka sia-

sialah mengharap pemerintah mau menaikkan persentase anggaran pendidikan. Kecuali pemerintah tiba-tiba memperoleh hidayah dan kemurahan hati seperti dikatakan oleh Ade Irawan, yang juga Sekretaris Koalisi Pendidikan Indonesia.

Tetapi sekecil apa pun harapan tetaplah berharga untuk diperjuangkan. Ketika Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (28/8/2007) sepakat untuk setuju menesahkan RUU APBN Perubahan 2007 menjadi UU APBN-P 2007, sebanyak 256 anggota DPR yang masih memiliki hati nurani terlihat ngotot menyampaikan nota keberatan atau *minderheids nota* atas APBN 2007 yang baru disahkan itu.

“Kami keberatan karena APBN tidak mengalokasikan 20 persen di luar gaji pendidik untuk sektor pendidikan,” kata Agung Sasongko, mewakili ke-256 teman-

tepat bagi DPR untuk menindaklanjuti masalah ini,” kata Hakam.

Ketua DPR Agung Laksono juga mengatakan DPR adalah lembaga yang berwenang membuat anggaran belanja negara. Hanya, usulan itu datangnya dari pemerintah. Karena itu usulan tersebut seharusnya dari awal sudah mencerminkan asas-asas ketaatan kepada konstitusi. Kalau taat konstitusi Agung yakin tidak akan timbul persoalan seperti ini. Diakui Agung, untuk memenuhi konstitusi untuk anggaran pendidikan 20 persen memang sulit. Tetapi yang dipersoalkannya adalah ketidakseriusan pemerintah untuk berupaya memenuhinya, sebab belum sekali pun muncul usulan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari pemerintah.

Agung berpendapat pemerintah selaku

Presiden. “Secara hitam dan putih, pemerintah telah melanggar konstitusi. Tapi APBN tidak memungkinkan. Maka perlu pemaafan nasional,” ujar Amien kepada *Republika* di Bandung, Senin (27/8).

Yang sangat serius mengkritisi kenekatan pemerintah mengebiri anggaran pendidikan nasional tetap jauh di bawah 20 persen adalah PDI Perjuangan. Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo mengancam tidak akan membahas anggaran pendidikan 20 persen dalam rapat Panitia Anggaran (Panggar). “DPR harus berani mengingatkan pemerintah supaya anggaran pendidikan 20 persen tahun ini. Kalau tidak, enggak usah dibahas Panggar,” ujar Tjahjo dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Sementara Ikatan Pelajar Nahdlatul



foto: presidensby.info

Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2008 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI (16/8).

temannya. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan tidak terpenuhinya anggaran 20 persen bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945, sekaligus menunjukkan kemauan politik pemerintah dan DPR lemah. “Itu sebabnya pemegang otoritas anggaran mesti mengubah APBN 2007,” ucap Sasongko.

Rekan Sasongko dari Fraksi PAN Hakam Naja, yang juga Wakil Ketua Komisi X mengakui fraksinya dan anggota DPR lain lebih memilih *minderheids nota* daripada menolak pengesahan. Dengan langkah ini maka akan ada tindak lanjut dari DPR terhadap persoalan ini, seperti mengusulkan hak bertanya (interpelasi). “Sejauh ini belum ada *political will* dari pemerintah terhadap persoalan ini. Karena itu, hak bertanya menjadi pilihan

penyelenggara negara yang mengusulkan alokasi anggaran pendidikan telah melanggar sumpah jabatan. “Kalau DPR sudah bertobat dengan menyatakan *minderheids nota*, kami meminta pemerintah juga bertobat dengan merealisasikan alokasi 20 persen anggaran pendidikan itu,” kata Agung.

Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd, pakar pendidikan yang juga dosen pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), malah menyebut semua pihak sudah mengkhianati undang-undang dan konstitusi. Mantan Ketua MPR Amien Rais berpendapat senada dengan menyebutkan Presiden bisa dimakzulkan (*diimpeachment*) bila anggaran pendidikan 20 persen dari APBN belum direalisasikan. Bedanya Amien masih memberi maaf kepada

Ulama (IPNU) sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Samarinda yang berlangsung pada 22-25 Agustus, berencana akan menggugat pemerintah dengan menempuh langkah hukum mengajukan gugatan kelompok atau *class action*. “Kami akan menggugat pemerintah jika anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak segera direalisasikan,” kata Ketua Umum PP IPNU, Idy Muzayyad, di Jakarta. Organisasi pelajar berbasis santri ini memberi batas waktu realisasi 20 persen anggaran pendidikan hingga awal 2008.

Koalisi Pendidikan yang beranggotakan berbagai LSM yang peduli pendidikan juga berencana akan bergerak menekan pemerintah supaya menyediakan pendidikan bermutu yang bisa diakses semua warga. ■ HT

Upaya pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi tidak dibarengi dengan menutup kebocoran anggaran pendidikan.

Ada kado istimewa di Hari Pendidikan Nasional, 1 Mei lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan oleh pemerintah sebesar 11,8% sebagai batas tertinggi bertentangan dengan UUD.

Itu adalah putusan ketiga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak dipenuhinya 20% anggaran pendidikan. Pemerintah tetap bergeming karena putusan tersebut tidak mempunyai sanksi hukum tegas bila tidak dilaksanakan (*lex imperfecta*).

Selain tidak dipatuhinya dua kali putusan Mahkamah Konstitusi, lemahnya komitmen ditunjukkan pula dengan terjadinya perubahan skenario anggaran secara sepihak terhadap kesepakatan yang pernah dibuat antara Pemerintah dan Komisi X DPR RI. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD RI berdasarkan Keputusan No. 26/DPD/2006 agar pemerintah berupaya menggunakan sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp 57 triliun untuk anggaran pendidikan tidak juga direspons dengan baik.

Begitu pula dengan surat khusus yang disampaikan oleh Sekjen *Education International* (EI) Fred van Leuwen, kepada Presiden yang sengaja "menyentil" kebijakan pemerintah dengan membandingkan anggaran pendidikan negara tetangga yaitu Malaysia (20%) dan Thailand (27%), belum juga berbuah hasil.

Seperti diberitakan koran *Seputar Indonesia*, 3 Mei 2007, indikasi lemahnya komitmen ini juga dirasakan oleh



Anggaran pendidikan sebagian untuk program wajib belajar.

Pemerintah Belum Penuhi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal.

Dalam keterangannya 16 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarkan Rp 48,3 triliun atau 11,8 persen dari APBN untuk pendidikan. Dia mengakui, pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20 persen anggaran pusat untuk bidang pendidikan, karena kebutuhan lain yang mendesak. Namun, program-program yang sudah berjalan, seperti bantuan operasional sekolah, dan pemberian beasiswa tetap dilanjutkan. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar, sudah sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan bantuan APBN melalui Dana Alokasi Khusus.

Alokasi sebesar itu diprioritaskan untuk tunjangan, sertifikasi, dan penyaluran bantuan operasional sekolah 2007 bagi 41,9 juta siswa. Presiden

mengklaim, jumlah itu justru naik dua kali lipat dibandingkan RAPBN Perubahan 2007 yang hanya Rp 23,1 triliun.

Prioritas

Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, upaya pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan sudah maksimal. Meski belum memenuhi amanat konstitusi, kenaikan bertahap selama tiga tahun ini secara signifikan telah mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Misalnya, untuk memperbaiki fasilitas pendidikan seperti ruang kelas.

Pada 2004, jumlah ruang kelas yang rusak 603.900 unit atau 49,5% dari jumlah kelas yang ada. Sekarang tinggal 213.000 atau 19%. Untuk 2007, dana alokasi khusus sebesar Rp 6,9 triliun akan digunakan untuk memperbaiki setengah lagi dari jumlah kelas yang rusak, yakni 138.000 unit. Sehingga tahun 2009 diharapkan sudah tidak ada lagi kelas SD atau madrasah

yang rusak.

Dalam kesempatan lainnya, usai pembukaan kegiatan pameran pendidikan, Selasa (22/8), Mendiknas mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen atau hampir Rp 20 triliun dari total rancangan anggaran pendidikan 2007 dialokasikan untuk wajib belajar. "Untuk BOS (bantuan operasional pendidikan) saja sudah Rp 12 triliun. Sementara untuk anggaran guru cukup signifikan, terutama untuk membayar tunjangan profesi, fungsional, dan tunjangan khusus," katanya.

Sekjen Depdiknas Dodi Nandika menambahkan, untuk anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 pihaknya telah mengajukan tiga skenario kepada DPR. Tiga skenario tersebut mulai dari jumlah ideal Rp 85 triliun, Rp 65 triliun, hingga angka minimum Rp 45 triliun.

Dodi mengakui bahwa anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 belum ideal dan masih jauh dari tuntutan per-



foto-foto: berindo wilson

mempertimbangkan jumlah perguruan tinggi yang ada. Agar adil, pemilihan perguruan tinggi harus selektif dan mampu menjangkau guru di kabupaten dan kota.

Ada Kebocoran

Namun sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam Kaukus Anggota DPR untuk Anggaran Pendidikan 20 Persen berpendapat pernyataan Presiden soal kenaikan dua kali lipat itu hanya ilusi pemerintah. Secara keseluruhan angka nominalnya pada RAPBN 2008 memang naik. Namun jika dipersentasikan dengan total RAPBN, tak terjadi kenaikan dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, menurut Rama Pratama, anggota Panitia Anggaran DPR RI, upaya pemerintah merealisasikan apa yang menjadi amanat Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak dibarengi dengan menutup kebocoran anggaran pendidikan.

Dalam situs *Fraksi-PKS Online*, Rama mengungkapkan, fraksinya di Komisi X menemukan sejumlah keborosan dalam alokasi anggaran pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Berdasarkan *review* APBN Depdiknas tahun 2006 ditemukan tumpang tindih antara kegiatan dan anggaran dalam satu program, antar program dan antar satuan kerja.

Dia memaparkan, pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikdasmen diketahui subsidi untuk alat teknologi dasar, berupa biaya *workshop* pengembangan mata pelajaran sebesar Rp 630 juta, dan untuk ruang *workshop* teknologi dasar sebesar Rp 1,05 miliar tidak digabung.

Pada Inspektorat Jenderal, ada tumpang tindih antara anggaran pengawasan dan pemeriksaan sebesar Rp23,547,605,000 dengan biaya pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sebesar Rp7,078,180,000. Selain itu, kegiatan tim independen dalam program BOS sebesar Rp 4 miliar juga belum tepat sasaran dan tidak efisien.

Sementara itu, di Sekretariat

Jenderal Depdiknas alokasi anggaran kegiatan pembangunan operasional Pustekom Pendidikan sebesar Rp 20,5 miliar dinilai terlalu besar. Alasan Rama, masih banyak kegiatan yang seharusnya bisa diprioritaskan seperti pengembangan materi, model-model dan teknologi pembelajaran.

"Di Ditjen Dikti, kami temukan anggaran yang tidak efisien pada belanja barang operasional (keperluan sehari-hari perkantoran) sebesar Rp 1,1 miliar dan belanja pemeliharaan (gedung dan bangunan) sebesar Rp 1,347 miliar, pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp 0,695 miliar serta pengadaan inventaris kantor sebesar Rp 1,198 miliar," ungkapnya



Mendiknas Bambang Sudibyo mengungkapkan, upaya pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan sudah maksimal.

Untuk itu, Rama mengusulkan sejumlah langkah yang mesti ditempuh pemerintah agar 20 persen anggaran pendidikan dapat terpenuhi. Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan sektor pendapatan negara. Langkah yang paling realistis untuk mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. "Kalau sumber penerimaan bukan pajak sangat fluktuatif, tergantung dinamika faktor eksternal," terangnya.

Kedua, melakukan pengetatan sektor pembelanjaan negara. Terkait hal ini, Rama mengakui pengetatan belanja negara merupakan hal yang sangat sulit dilakukan meng-

ingat sebagian besar beban pengeluaran negara bersifat non-*discretionary* (kaku). Tapi tindakan revolusioner harus ditempuh.

Ketiga, dengan melakukan langkah menggunakan kelebihan pembiayaan. Ini bisa dilakukan dengan menerbitkan SUN (surat utang negara), menggunakan anggaran pinjaman luar negeri, merestrukturisasi utang luar negeri, *debt swap*, atau mengajukan pemotongan utang.

Ketua Kaukus DPR untuk Anggaran Pendidikan Slamet Effendy Yusuf menilai, kecilnya kenaikan anggaran Depdiknas dalam RAPBN 2008 sangat menyedihkan. "Ini menunjukkan pemerintah tak memiliki komitmen mendasar

undangan. Akan tetapi, pemerintah berusaha meningkatkan anggaran dalam proses negosiasi dengan DPR nanti. Dalam APBN 2006, anggaran sektor pendidikan Rp 43,3 triliun.

Dengan skenario penggunaan anggaran pas-pasan tersebut, menurut Dodi, penekanan penggunaan anggaran tetap sama, tetapi volume yang diatur dan disesuaikan dengan anggaran. Penekanan anggaran pendidikan tetap untuk wajib belajar, guru, dan perbaikan prasarana yang rusak.

Salah satu yang telah dialokasikan oleh Depdiknas dalam penyusunan rancangan anggaran pendidikan 2007 ialah pemberian tunjangan bagi guru. Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Fasli Jalal, pemerintah akan membantu para guru yang belum S1 untuk menempuh pendidikan agar sesuai kualifikasi yang dituntut oleh UU Guru dan Dosen. Terhadap guru yang telah sesuai kualifikasinya akan difasilitasi ikut ujian sertifikasi.

Semua guru yang mengajar sesuai dengan persyaratan, baik negeri maupun swasta akan diberikan tunjangan fungsional. Untuk tahap awal, menurut Fasli, paling tidak sekitar 25.000 guru sudah dapat disertifikasi. Upaya sertifikasi

untuk meningkatkan sumber daya manusia rakyat Indonesia," ujarnya.

Dia mengingatkan, anggaran pendidikan yang rendah menyebabkan sumber daya manusianya rendah dan hanya bisa masuk ke lapangan kerja yang rendah pula. Kemiskinan dan kebodohan hanya bisa diatasi dengan pendidikan yang baik dan terjangkau rakyat banyak.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah menghitung kembali anggaran pendidikan yang tersebar di beberapa departemen, kementerian, dan lembaga negara. ■ RH



foto-foto: berindo wilson

Mahal: MBS hanya alasan pemerintah untuk lepas tanggung jawab.

Ketika Masyarakat Bayar Sendiri

Jangankan pendidikan gratis. Kenyataannya, siswa masih dikenai berbagai pungutan, baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Sriatun (15), gadis remaja yang tinggal di pemukiman kumuh, di bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, cuma tersenyum saat ditanya mengapa pagi itu dia berdiri saja di pinggir kali, tidak berada di sekolah seperti kawan-kawan sebayanya. Dia sudah lulus SMP, te-

tapi tidak melanjutkan ke SMA karena tak ada biaya. Ayahnya bekerja sebagai pemulung, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga biasa yang mengurus empat adiknya yang masih kecil-kecil.

Nasib yang sama dialami Hanah (7), gadis cilik asal Ciawi, Bogor. Mestinya tahun

ini dia masuk sekolah dasar. Namun karena ayahnya yang bekerja sebagai pedagang asongan tak punya biaya, dia terpaksa harus menunda keinginannya memakai seragam putih merah.

Sesungguhnya, kasus anak-anak tidak bisa sekolah karena masalah biaya sangat banyak, jumlahnya mungkin mencapai jutaan, hanya saja tidak terpantau.

Para orangtua pun bukannya tak merasa sedih saat tak bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Banyak keluarga dari golongan bawah terbentur biaya yang tak terjangkau. Bahkan biaya pendidikan taman kanak-kanak pun seringkali tak realistis. Akhirnya, orangtua miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Di sisi lain, siswa yang naik kelas pun dipungut biaya daftar ulang. Beberapa kasus lainnya, ada siswa yang lulus sekolah tapi tak bisa menebus ijazahnya karena tak ada uang. SLTP/SLTA negeri tidak otomatis lebih murah dibandingkan sekolah swasta. Semua amat tergantung kebijakan sekolah masing-masing.

Makin mahal biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Di negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat yang lebih dulu menjalankan MBS, memaknai MBS sebagai proses demokratisasi pengambilan keputusan di sekolah. Bila semula keputusan dilakukan secara tunggal oleh negara, dengan adanya MBS, proses pengambilan keputusan dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat (*multistakeholder*), termasuk orangtua murid dan murid sendiri. MBS sama sekali tidak berkaitan dengan masalah biaya karena pembiayaan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara.

Tidak Transparan

Di Indonesia, MBS dimaknai terutama untuk melakukan mobilisasi dana, bukan sebagai proses demokratisasi pengam-

bilan keputusan pendidikan. Karena itu, pembentukan Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.

Pada akhirnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu dialasi sesuai keputusan Komite Sekolah. Namun, sebenarnya diputuskan tidak transparan. Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah, persis seperti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di masa lalu. Dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap masalah pendidikan warganya.

Keluhan masyarakat dalam hal pendidikan, terutama golongan miskin, karena dari soal seragam sekolah, tas, sepatu, buku pelajaran, buku tulis, uang gedung, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), tabungan, dan sejenisnya harus diusahakan dalam waktu amat singkat dan bersamaan, tidak otomatis mendapat respons dari Komite Sekolah. Sebaliknya, pihak sekolah melalui Komite Sekolah justru menegakan, jadi ini terjadi karena MBS, jadi semua harus diusahakan oleh sekolah.

Dengan kata lain, MBS menjadi kependekan dari 'Masyarakat Bayar Sendiri'. Kondisinya akan lebih buruk lagi bila kelak RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) disahkan menjadi UU BHP. Berubahnya status lembaga pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah dengan mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas.

Kehadiran UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang semula diharapkan dapat melindungi warga, ternyata malah mengaburkan hak-hak warga ne-



Subsidi Pemerintah: Tidak serta merta menjadi gratis.

gara untuk memperoleh akses pendidikan dari negara. Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 menyatakan "Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya". Namun, bunyi ayat ini dianulir oleh Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat".

Adanya dua pasal kontradiktif itu memperlemah posisi warga. Warga yang menuntut pelayanan pendidikan secara gratis dapat dituntut balik dengan kata-kata "bukankah pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat?"

Pasal 46 UU Nomor 20 Tahun 2003 inilah yang lalu menjadi cantolan pelaksanaan MBS.

Program Mengecewakan

Cara pemerintah melempar tanggung jawab pembiayaan

pendidikan ke MBS itu lalu ditiru pengelola sekolah swasta. Meski masyarakat sudah tahu kalau sekolah-sekolah swasta itu sejak dulu mendapat subsidi kecil dari pemerintah, para pengelola sekolah swasta selalu melegitimasi pengutannya pada MBS.

Selain itu, pemberian subsidi biaya oleh pemerintah tidak serta-merta menggratiskan pendidikan bagi warga. Di Jawa Timur, misalnya, pemerintah provinsi dan kabupaten memberi subsidi sebesar Rp 15.000 untuk SD-MI (sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah) dan Rp 20.000 untuk SLTP-MTs (madrasah tsanawiyah).

Ini berarti di sekolah-sekolah yang membiayai penyelenggaraan pendidikan lebih dari Rp 15.000 dan Rp 20.000 per siswa, ada kemungkinan besar orangtua atau wali murid harus menanggung kekurangan biaya. Padahal, ada banyak sekolah (baik negeri mau-

pun swasta) yang menganggarkan *unit cost* di atas Rp. 15.000 dan Rp. 20.000.

Program pemberian subsidi biaya minimal pendidikan dasar bisa menimbulkan dua macam kekecewaan. *Pertama*, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun akan kecewa karena ternyata orangtua atau wali murid masih harus membayar iuran pendidikan.

Kedua, orangtua siswa dari kalangan miskin terkendala dengan berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, *study tour*, dan sebagainya. Dalam proyek pengadaan buku pelajaran, seragam, dan sebagainya, guru dan juga kepala sekolah bahkan mengambil keuntungan.

Masalah ini akan semakin memperlebar jurang pemisah antara siswa miskin dan siswa yang kaya. Siswa-siswi dari ke-

luarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah tidak akan mampu menanggung kekurangan biaya sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang fasilitasnya minimal, di mana biaya operasional per anak tidak melebihi *unit cost* yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, siswa-siswi dari kelas sosial menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana memadai. Karena sekolah-sekolah ini mendapat iuran pendidikan memadai dari para siswanya, sekolah-sekolah mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan.

Meskipun harus diakui pula, besarnya anggaran tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah. Namun, kekurangan anggaran hampir pasti amat menghambat peningkatan mutu pendidikan. ■ RH



foto: dok. Al-Zaytun

Salah satu gedung sekolah di Desa Cibanoang Jawa Barat, yang tak tersentuh pembangunan.

Potret Buram Dunia Pendidikan

Terpaksa Sekolah di Bawah Pohon

Selain minimnya jumlah sekolah, kondisi sekolah-sekolah di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Banyak ruang kelas yang rusak. Rehabilitasi ruang kelas dan sekolah terkendala oleh terbatasnya anggaran.

Menyedihkan. Barangkali itu kata yang pas untuk melukiskan keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di tujuh pemukiman di Kecamatan Halong dan Awayan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Di usia kemerdekaan RI yang sudah mencapai 62 tahun, ternyata masih ada pemukiman penduduk yang belum memiliki gedung sekolah. Tercatat sekitar 210 anak di pemukiman itu terpaksa bersekolah di bawah pohon, di pelataran rumah atau balai desa. Mereka adalah anak warga desa Wayuwani, Libarun Sungai, Tinggar, Hampang, Nanai Ampatan, Baranam dan Rantau Paku.

Di Hampang misalnya, ada 36 anak kelas satu dan dua SD belajar bersama di bawah pohon bambu. Mereka tak dapat belajar di sekolah formal karena lokasi gedung SD jauh dari kampungnya.

Di Desa Baraum, Kecamatan Awayan,

ada 12 siswa belajar di Balai Desa yang kondisi bangunannya juga rusak berat. Atap bangunan banyak yang bocor, lantai kotor dan dindingnya berlubang-lubang. Mereka pun terkadang harus berpindah belajar ke pelataran rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Eddy Yulianto, mengakui dan membenarkan adanya ratusan anak yang terpaksa belajar di tempat-tempat seperti itu. Kondisi persekolahan seperti itu umumnya ditemui di pedalaman Kalimantan, khususnya daerah terpencil. Di Kalimantan Selatan saja ada 5.101 anak usia SD (7-12 tahun) dan 1.448 anak usia SMP (13-15 tahun) yang terpaksa bersekolah dalam kondisi seperti itu.

Ketiadaan sekolah itu hanyalah salah satu masalah di bidang pendidikan di Kabupaten Balangan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003 lalu. Persoalan lain adalah banyaknya kondisi sekolah yang

rusak. Mencapai 691 ruangan di 99 SD yang ada di kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, Humadi Sukeri, mengungkapkan, dari 29.076 ruang kelas di Provinsi Kalsel sebanyak 7.202 ruang diantaranya rusak ringan dan 5.036 rusak berat.

Ruang kelas dan sekolah yang rusak juga terdapat di berbagai daerah di tanah air. Data Depdiknas menyebutkan, sekitar 213.000 ruangan kelas SD yang rusak. Sementara data yang dihimpun dari sejumlah daerah di Jabar, Jateng, Sulsel, Kalsel, dan Sumsel saja tercatat setidaknya 88.000 ruang kelas dalam kondisi rusak.

Pusat Tidak Serius

Kekhawatiran akan tidak tuntasnya rehabilitasi ruang kelas dan sekolah yang rusak dalam tahun 2009 membayangi sejumlah daerah. Pasalnya, pemerintah pusat dianggap tidak serius mendanai program tersebut. Padahal berdasarkan role sharing peran pemerintah pusat mencapai 50 persen. Sedangkan peran provinsi 30% dan pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Wawan Arifin, sebagaimana dikutip *Kompas* (14/8) menyatakan, dana *role sharing* merupakan dana di luar dana alokasi khusus (DAK). Namun beberapa bulan setelah itu pihaknya menerima surat Mendiknas yang menyatakan *role sharing* diberikan berupa DAK. Padahal, menurut Wawan, sekitar 60 persen dari DAK itu digunakan untuk perbaikan fisik sekolah dan sisanya untuk buku serta alat peraga. DAK juga membatasi pembangunan fisik hanya tiga kelas dalam satu sekolah. Padahal ada sekolah yang semua kelasnya rusak, sehingga pembangunan fisik sekolah itu tertakung-katung.

Wawan berpendapat, kalau pemerintah pusat besikap tegas dalam pembagian peran mendanai perbaikan sekolah, sebaiknya semua DAK itu dialokasikan untuk perbaikan fisik. Sedangkan pengadaan buku dan alat peraga bisa dicukupi dari bantuan operasional sekolah (BOS) buku dan BOS reguler.

Terkait hal ini, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto ber-alasan, setelah otonomi daerah, sekolah-sekolah menjadi milik pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang baik, termasuk selesainya rehabilitasi ruang kelas atau sekolah yang rusak membutuhkan komitmen dari setiap pemerintah daerah.

Namun, tambahnya, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah pusat tetap membantu upaya percepatan rehabilitasi sekolah yang rusak, tapi pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmennya kepada pendidikan di daerahnya. ■ SP

Pendidikan Bagus Tak Ada yang Gratis

Pada era globalisasi, lembaga-lembaga pendidikan sibuk berkompetisi untuk menghasilkan *output* yang mumpuni dan handal. Maklum, persaingan yang semakin mengglobal sudah terjadi di mana-mana. Pendidikan mempunyai peranan cukup besar dalam menentukan masa depan setiap peserta didik demi memenangkan persaingan global itu. Pendidikan juga merupakan salah satu cara agar peserta didik mampu hidup mandiri.

Menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan tinggi merupakan impian semua orang tua. Tetapi hampir tiap tahun ajaran baru pula mereka dipusingkan pada masalah biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Setiap orang tua harus menyediakan dana pendidikan anak-anaknya yang tidak sedikit. Karena itu mendapatkan pendidikan yang murah bahkan gratis tetapi menghasilkan *output* yang berkualitas merupakan harapan setiap orang tua.

Sangat disayangkan, memang. Tatkala pemerintah gencar mewajibkan setiap anak mengikuti pendidikan dasar, dengan mengimprimingi biaya pendidikan gratis atau murah, pada kenyataannya tidak diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, sesungguhnya tak ada pendidikan yang gratis di dunia ini.

Makin Bermutu, Makin Mahal

Endang, seorang ibu berputra tiga, pada Juni lalu begitu pusing mencari sekolah bagi putra sulungnya, Ibnu, yang baru saja lulus SLTP. Berbagai informasi tentang SMU Negeri yang dekat dengan rumahnya tetapi berkualitas lumayan, dan murah, dikumpulkannya. Dia sibuk mencari-cari informasi kepada siapa saja, saudara, tetangga hingga relasi.

Ibu yang tinggal di Jakarta ini sangat mengundakan



foto: berindo wilson

Pendidikan bermutu berbanding lurus dengan mahalnya biaya.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru dapat dinikmati beberapa/puluhan tahun kemudian. Itu sebabnya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas siapapun rela mengeluarkan biaya mahal. Ibarat pepatah tak ada makan siang yang gratis, pendidikan bermutu pun tidak ada yang gratis.

putranya masuk SMU Negeri terbaik. Tujuannya hanya satu, supaya biaya sekolah anaknya tidak terlalu mahal namun mutu tetap ada.

Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika mendapati sekolah yang menjadi incarannya, sebuah SMU negeri yang tergolong bukan SMU unggulan, nyatanya mengenakan biaya masuk yang baginya tergolong mahal berkisar antara Rp 2 hingga Rp 4 juta. Biaya sebesar itu belum termasuk uang untuk membeli pakaian seragam, buku teks, uang olahraga, uang lab komputer, maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarnya mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Bila semua dijumlahkan angkanya sungguh fantastis mencapai Rp 5 juta lebih.

Persoalan yang dihadapi Ibu Endang bukanlah hal baru atau tergolong aneh. Sejumlah SMA terutama yang unggulan memungut dana yang jauh

lebih besar dari itu. Apalagi bila dalam uang masuk ikut dimasukkan dana pembangunan. Di Jakarta, lewat lembaga Komite Sekolah setiap orang tua murid di sekolah-sekolah favorit terbiasa diminta uang masuk pada kisaran Rp 8 juta hingga Rp 10 juta.

Demikian pula sekolah terpadu Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan swasta kategori favorit. Menggunakan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Al-Azhar mengedepankan pula sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai keagamaan, serta mengembangkan pola-pola pembelajaran *out-bound* dan *fieldtrip*.

Yayasan Al-Azhar yang mengelola 79 sekolah mulai dari TK, SD, SLTP, SMU, dan sebuah universitas yang tersebar di 18 kota, memiliki program meningkatkan *skill* sekaligus

menguatkan moral siswa. Sekolah yang bernapaskan Islam ini juga menyediakan program pesantren.

Mau tahu berapa biaya masuk? Al-Azhar mengenakan uang pangkal Rp 21 juta kepada tiap murid. Biaya itu sudah termasuk SPP satu bulan, biaya buku rapor, ijazah dan seluruh biaya perlengkapan dari kelas satu sampai kelas tiga. Biaya SPP bulanan dikenakan Rp 675 ribu.

Apabila peserta didik berkeinginan masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi maka lagi-lagi harus merogoh kocek lebih dalam. Perguruan tinggi seperti ITB, UGM, Undip dan UI memasang tarif mulai Rp 15 juta hingga Rp 250 juta untuk penerimaan siswa baru yang melalui jalur khusus.

Tak mengherankan apabila dua tahun lalu terjadi ledakan dahsyat keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah anaknya. Faktanya dipertunjukkan oleh angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan secara nasional yang cukup tinggi. Pada tingkat SMP angka putus sekolah mencapai 1.000.746 orang, untuk tingkat SMU mencapai 151.976 orang, dan lulusan SMU/SMK yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 681.361 orang.

Masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan biaya. Impian untuk mendapatkan pendidikan tinggi hanya akan jadi impian saja. Pendidikan yang harusnya menjadi hak asasi ternyata dibatasi bagi yang kaya saja.

Persoalan pendidikan memang kompleks. Pendidikan yang bermutu cuma bisa dinikmati oleh mereka yang ber-"kasta" tinggi. Namun setiap anak-anak dari keluarga yang tergolong tidak mampu mencari sekolah yang berbiaya gratis namun mutu pendidikannya ala kadarnya saja. Sebab pendidikan bermutu, berbanding lurus dengan mahalnya biaya. ■ ZAH

Koalisi Pendidikan

Soal Komersialisasi Pendidikan

Isu besar soal privatisasi dan komersialisasi pendidikan memperoleh penentangan yang luar biasa dari Koalisi Pendidikan, sebuah organisasi pemerhati pendidikan beranggotakan berbagai LSM.

Semua negara maju membangun kemakmuran melalui pendidikan. Ketika Jepang hancur lebur karena kalah dalam Perang Dunia II, negara ini lebih dahulu mencari guru. Karena Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat ulang-alik Sputnik ke ruang angkasa, yang pertamakali ditanya oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu adalah pendidikan sebab dianggap ada yang salah di sini. Bahkan, negara tetangga Malaysia bisa menyialip kemajuan kita setelah mengimpor guru-guru asal Indonesia.

Mereka menjadikan pendidikan sebagai bagian dari upaya memajukan bangsa, menganggapnya sebagai investasi jangka panjang bukan biaya.

Tetapi kondisi yang berbeda diamati oleh Koalisi Pendidikan sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Ade Irawan Sekretaris Koalisi Pendidikan kepada *Berita Indonesia* mengatakan, selain lemahnya komitmen pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD, cetak biru pendidikan nasional yang akan menjadi pondasi dan arah pendidikan kita belum juga terlihat.

Dalam rencana strategis (Renstra) Pendidikan Nasional memang disebutkan tiga tujuan pendidikan nasional yaitu memperluas akses, meningkatkan mutu, dan meningkatkan pencitraan pendidikan nasional. Ade yang juga Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik di Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, yang pertama dan kedua belum dicapai dan yang ketiga lebih parah lagi tujuannya

hanya pemborosan anggaran saja.

Janji kenaikan anggaran secara gradual hingga 2009 juga terbukti diingkari pemerintah belum mengangap penting pendidikan, karena sektor ini tak memiliki kontribusi langsung bagi kepentingan penguasa untuk mempertahankan rejim. Sayangnya, dengan anggaran yang masih terbatas, uang dipakai tidak untuk kepentingan kegiatan pendidikan. Umumnya untuk kepentingan birokrasi.

“Misalnya tahun 2007 hasil catatan kami dengan teman-teman Seknas FITRA. Dari misalnya total empat puluhan triliun rupiah anggaran tahun 2007, sekitar 20 hingga 30 persen diantaranya habis dipakai untuk kepentingan birokrasi di Departemen Pendidikan. Hanya beberapa persen saja dipakai untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar,” kata Ade Irawan.

Perilaku buruk demikian di contoh pula di tingkat daerah dan sekolah. Di tingkat sekolah, 70 hingga 80 persen uang habis untuk kepala sekolah dan Dinas. Berbagai kondisi ini menimbulkan anomali: Kuantitas anggaran pemerintah cenderung meningkat tetapi uang yang dikeluarkan masyarakat juga tambah tinggi.

Menurut Ade selain anomali, disorientasi yang kini sedang melanda Depdiknas juga mengakibatkan setiap kebijakan yang digulirkan selalu mengundang kontroversi. Ade menduga program-program yang disusun Diknas tidak didasarkan atas kepentingan publik.



Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

foto: dok

Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

Sikap pemerintah yang menyerahkan pembiayaan pendidikan kepada publik menciptakan orang kaya bersekolah dengan fasilitas yang sangat bagus dan orang miskin bersekolah dengan fasilitas seadanya.

Oleh sebab itu, menurut Ade, pemerintah harus melakukan intervensi supaya baik orang kaya maupun orang miskin punya hak yang sama menerima layanan pendidikan yang berkualitas.

Menurut Ade cara pemerintah mengelola pendidikan telah melahirkan disparitas mutu pendidikan sangat mencolok. Harus diakui telah ada kastanisasi di sekolah. Sekolah sudah menjadi institusi terbesar untuk mendorong kesenjangan sosial. Juga membuat posisi *status quo* dimana orang miskin akan tetap miskin dan orang kaya tetap kaya.

Pangkal semua persoalan kata Ade adalah ide besar komersialisasi dan privatisasi pendidikan yang sudah diusung pemerintah sejak tahun 1998, ditopang sokongan dari lembaga internasional lewat hibah dan hutang yang disalurkan. Contoh konkrit arah

privatisasi adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) di perguruan tinggi, dan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di tingkat sekolah.

Komersialisasi pendidikan dimaknai Ade sebagai pelepasan tanggungjawab pemerintah. Sebab dengan komersialisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dijadikan komoditas. Siapa yang mampu beli saja yang bisa mengakses pendidikan.

Sebagai misal kampus yang dahulu menyediakan banyak ruang untuk diskusi untuk menciptakan intelektual-intelektual, belakangan berubah menjadi warung padang, minimart, atau warung penyedia aneka makanan cepat saji.

Padahal dari perspektif Koalisi Pendidikan, kata Ade, pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga. Artinya, pemerintah tidak punya alasan untuk melepaskan tanggungjawab kepada publik kecuali pemerintah lebih dulu mengamandemen undang-undang.

“Saya kira itu sebabnya mengapa komersialisasi pendidikan, privatisasi pendidikan mesti dilawan. Upaya-upaya untuk privatisasi pendidikan mesti dilawan,” kata Ade. ■ HT



foto: berindo amron

WAWANCARA

Wakil Ketua Komisi X DPR Prof Dr. Anwar Arifin:

"Kami Ini Melanggar Undang-Undang Dasar"

Profesor Doktor Anwar Arifin terjun menjadi politisi bergabung dengan Fraksi Partai Golkar sejak tahun 1999. Menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR, pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan ini aktif mengajar, sudah menulis 33 judul buku, berceramah dimana-mana dan memimpin sejumlah Panitia Kerja (Panja) di DPR. Produk hukum yang pernah dibuahkan diantaranya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Dilantik menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 1991, Anwar Arifin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap pemajuan pendidikan nasional. Berikut petikan wawancara Anwar Arifin dengan Haposan Tambolon dan Amron Ritonga

dari *Berita Indonesia*, berlangsung Jumat (31/8) di kediamannya Jalan Bendungan Asahan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sesuai Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2008, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan belum memenuhi amanat konstitusi 20 persen. Apa yang bisa Anda jelaskan, dan bagaimana perdebatan mengenai hal ini di ruang parlemen khususnya Komisi X DPR RI yang Anda pimpin?

Dana RAPBN kita tidak menggembirakan. Seperti tiga habis membayar hutang dan bunga hutang luar negeri, ditambah subsidi listrik, minyak dan lainnya. Seperti tiga lagi untuk daerah, sisanya itulah untuk belanja pusat.

Dari belanja pusat dihitung

anggaran pendidikan kita berapa, dapatlah Diknas tahun ini kurang sedikit dari Rp 44 triliun. Prediksi Departemen Keuangan hanya bisa diserap tidak sampai Rp 40 triliun. Akhirnya dikeluarkanlah *block grant*, yang dulu ramai di media massa, *voucher* pendidikan untuk mempercepat proses penyerapan dana.

Jadi dana sebesar 20 persen belanja pusat sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu oleh Depdiknas. Tahun lalu 2006 juga ada dana hangus Rp 300 miliar karena tidak bisa dipakai. Terpaksa tahun ini tunjangan profesi guru itu di-realisasi.

Karena Pak Wapres berbicara di berbagai forum, Departemen Pendidikan tidak jelas apa yang akan mereka lakukan. Tanyalah Menteri Pendidikan di forum resmi Raker (Rapet Kerja) DPR, jika sekiranya diberikan anggaran 20

persen apa yang akan dilakukan. Dua kali pertanyaan dalam dua kali Raker dan dua kali pula tidak bisa dijawabnya.

Beliau hanya menjawab nanti saya tanya bos saya Presiden dan Wapres. Sementara sebenarnya pertanyaan ini adalah titipan dari Pak Wapres.

Kesimpulan kami Mendiknas tidak mampu menyakinkan Presiden terhadap program-programnya. Karena tidak jelas programnya kami dari DPR juga tidak mampu meyakinkan teman-teman anggota DPR lain, Komisi lain, bahwa anggaran pendidikan memang diperlukan.

Kemudian ada Kaukus Pendidikan di DPR. Kita adakan pertemuan, semua mengatakan bersedia mengalokasikan dana untuk pendidikan asal jelas peruntukannya. Jangan sampai nanti jadi (mobil) Kijang, jadi Camry atau jalan-jalan ke luar negeri.

Saya pimpinan di Komisi X, sekarang ada Panja (Panitia Kerja) Pendidikan Nonformal, di sana ditemukan inefisiensi yang besarnya sekitar 30 persen. Pemborosan itu terjadi, menurut *feeling* saya karena saya belum sempat meneliti, kira-kira mencapai 30 persen.

Saya berikan contoh yang kita temukan kemarin di Surabaya. Untuk pendidikan non-formal kursus para profesional seperti calon perawat, kita mengalokasikan dana Rp 2,8 juta per orang. Ternyata dalam RKKL jatuhnya hanya Rp 2,5 juta. Rp 300 ribu dibikin untuk berbagai kegiatan administrasi dan manajemen. Inilah yang saya maksud sebagai tidak efisien.

Jadi sampai hari ini secara pribadi dan teman-teman terus terang sudah saya umumkan, tidak bersemangat lagi mendorong (realisasi anggaran) 20 persen kalau tidak jelas apa yang akan dilakukan.

Saya kira karena Ketua Umum Golkar (Jusuf Kalla) sudah menyuarakan seperti itu, tentu fraksi saya akan mempunyai catatan seperti itu. Kami akan mendukung 20 persen asal jelas apa yang mau dilakukan.

Apa sesungguhnya yang menjadi *grand design* pendidikan kita berikut pelaksanaannya di lapangan?

Grand design pendidikan, kita cantumkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan berkembang potensi siswa untuk memiliki kekuatan ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah *grand design* dan cita-cita pendidikan kita.

Jadi pendidikan bermutu menurut UU kalau orang yang

berbakat menjadi wartawan dikembangkan betul menjadi wartawan. Orang yang berbakat menjadi dokter harus betul-betul menjadi dokter. Orang yang berbakat olahragawan betul-betullah menjadi olahragawan. Orang yang berbakat jadi seniman betul-betul menjadi seniman.

Secara normatif *pertama*, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. *Kedua*, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar tingkat SD dan SLTP. *Ketiga*, pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemajuan peradaban.

Tiga garis besar yang menjadi *grand design* pendidikan ini tidak dijabarkan secara baik oleh Menteri Pendidikan, yang ditugaskan oleh UUD melaksanakannya secara wajib.

Jadi selama ini amanat undang-undnag belum dijabarkan dalam program-program oleh Menteri?

Tidak dijabarkan. Saya selalu mendesak pemerintah dalam setiap rapat agar setiap pasal dalam UUD dan UU Sisdiknas diberi bobot anggaran. Sampai hari ini, itu dia tidak lakukan.

Jadi anggaran seharusnya mengacu kepada...?

Kepada kitab suci tidak dikarang. Dia tidak mau bikin itu karena dia memang tidak mampu, atau apa, atau dia sudah punya pandangan sendiri. Mengurus negara tidak boleh terlalu kreatif. Kalau mau kreatif di Taman Ismail Marzuki.

Itu berarti mutu pendidikan kita belum bisa terukur?

Memang tidak bisa terukur. Saya sekarang berniat menerbitkan buku namanya "Nasib Undang-Undang Sisdiknas". Saya termasuk mengawal Undang-Undang itu sampai hari ini. Secara jujur saya sampaikan kepada Anda bahwa saya frustrasi dan kecewa karena apa yang dibuat dalam UU belum ada yang berjalan secara maksimal. Birokrasi kita mesinnya tidak jalan baik.

Anda setuju kalau sektor pendidikan kita sedang mengalami disorientasi?

Setuju. Artinya tidak berjalan pada jalan yang benar.

Sebagai anggota DPR sudah selesai wacana kami untuk pendidikan. Sekarang kita mendorong untuk melaksanakan UU. Kitab sucinya sederhana UU Pasal 31, kemudian UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Guru dan Dosen.

Apa implikasi politis apabila ketentuan mengenai anggaran pendidikan minimal 20 persen tidak dipatuhi?

Artinya 20 persen kalau tidak dipatuhi menurut Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-Undang Dasar. Karena APBN disahkan bersama dengan pemerintah, kita berdua sama-sama melanggar Undang-Undang Dasar. Itu harus diakui secara jujur kami ini melanggar Undang-Undang Dasar.

Tetapi tidak bisa juga disalahkan. Komisi X bertekad untuk mendorong tercapainya 20 persen dengan catatan program Diknas jelas peruntukannya. Harus tepat waktu tepat sasaran. Karena nanti diberikan seperti tahun ini Rp 44 triliun yang bisa terserap maksimal Rp 40 triliun. Rp 4 triliun tidak terpakai, mungkin lebih karena juga ada yang hangus.

Jadi kalau menghitung wajib belajar dilaksanakan tanpa dipungut biaya, kalau teman-teman Diknas mau gampang menghitungnya kira-kira Rp 60 triliun. Tapi, yang Rp 60 triliun harus dialokasi ke daerah. Karena satu anak SD dan SLTP di DPR kita meratakan biaya pendidikan Rp 1,5 juta per tahun per anak dengan pelayanan minimum tanpa komputer. Itu saja sampai sekarang belum terpenuhi.

Jadi anggaran kembali kepada pemerintah. Artinya, kalau SBY-JK mau angka 20 persen bisa dicapai. Contoh begini. Untuk rumah sakit akademis, *teaching hospital*, kan menyangkut kesehatan, itu bisa kita letakkan di pen-



Sejumlah lembaga pendidikan memprotes RUU Badan Hukum Pendidikan.

didikan. Jadi setiap Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia kalau mau bikin *teaching hospital* bisa. Kedua, kita meletakkan pengembangan teknologi pertanian dengan membuka lahan-lahan pertanian oleh Fakultas Pertanian seluruh Indonesia. Begitu juga peternakan.

Ditambah gaji guru dan tenaga kependidikan dinaikkan bisa sampai 20 persen asal yang bersangkutan mau. Artinya itu bisa disiasati. Politik kan siasat, bukan diakal-akali, tetapi tepat sampai ke rakyat. Belum lagi kalau pendidikan penyuluhan yang selama ini di Departemen Pertanian, digeser ke Departemen Pendidikan Nasional. Demikian pula penelitian yang dilakukan LIPI dikembalikan ke Diknas. LIPI harus diintegrasikan dengan riset di universitas, demikian pula Ristek.

Sebagai anggota DPR yang mengawasi jalannya pemerintahan, bagaimana Anda menilai kinerja Depdiknas selama ini?

Saya sebutkan jalannya tidak efisien. Sama dengan mobil yang boros bensin. Harusnya kita memiliki mesin biro-

krasi yang hemat BBM. Ini boros dan sangat boros.

Ketika Gus Dur jadi Presiden mengangkat Lee Kuan Yew sebagai penasehat. Nasehat pertama Lee adalah perbaiki birokrasi pegawai negara. Sebab setiap birokrat bergerak itu pasti ada honorinya. Melangkah selangkah saja ada honorinya, dan itu tidak masuk dalam tugasnya. Mereka ada di DPR itu ada honorinya. Mereka ada tanda tangan.

Misalnya diadakan seminar dibentuk panitia adalah contoh yang termasuk tidak efisien. Melaksanakan seminar ada honorinya mulai dari rapat. Itu sudah biasa. Atau mau bikin buku panduan, rapat sepuluh kali berarti sepuluh kali ada honorinya. Ini yang saya maksud tidak efisien dan itu diakui oleh negara. Jadi bagaimana dana pendidikan bisa sampai ke peserta didik, karena di mana mereka bergerak ada honorinya. Sepuluh kali bergerak sepuluh kali ada honorinya.

Bagaimana masa depan bangsa kalau kondisi aparat birokrasi pendidikan carut-marut seperti itu? Padahal Wapres Ju-



foto-foto: berindo wilson

suf Kalla sangat peduli pendidikan sampai-sampai memaksakan harus ada Ujian Nasional untuk menentukan kelulusan siswa?

Beliau melihat ini satu paradigma bahwa, untuk membawa bangsa ini maju istilahnya jangan menjadi mental lembek. Harus belajar dan salah satunya belajar ujian. Dari segi paradigma itu saya setuju. Kalau mau membuat bangsa ini baik nasehat Lee Kuan Yew harus dipenuhi.

Sejumlah isu aktual berujung menjadi polemik yang kontroversial di Depdiknas. Yang terbaru mengenai badan hukum pendidikan (BHP). Bagaimana seharusnya menurut Anda?

Semuanya itu dalam rangka globalisasi. Tidak ada satupun negara yang mau menghindari globalisasi. Sekarang sejumlah lembaga pendidikan memprotes menganggap itu sebagai lonceng kematian. Tetapi saya melihatnya itu ada juga baiknya.

Kalau lembaga asing yang terakreditasi yang datang ke sini yang baik, dan anak-anak kita bisa masuk dengan biaya

yang katakanlah murah, kan berarti mutunya lebih bagus. Tapi kalau itu tidak ada maka dia akan pergi ke Australia. Dengan hasil yang sama tetapi biayanya akan jauh lebih mahal dan kita punya devisa tersedot. Mana lebih bagus?

Saya tidak menolak BHP tetapi itu harus mengikuti UU Pendidikan. Saya kalau ditanya ini akan membunuh, ya, akan membunuh kalau memang kualitasnya rendah. Saya kemarin mengatakan begitu. DPR melindungi siapa? Ya-yasankah, penyelenggarakah atau melindungi murid. Tentu anak didik.

Kalau yang diberikan pendidikan ala kadarnya nanti dia lulus juga akan ala kadarnya hasilnya. Kalau dia masuk di sekolah-sekolah asing yang berwawasan keindonesiaan tidak masalah. Bahwa ini mati apa boleh buat, daripada hidup merana. Sekolah kita di Indonesia hanya 10 persen yang bagus. Inilah yang mendidik orang yang ala kadarnya hasilnya. Saya tamatan SMK yang ala kadarnya hasilnya. Jadi STM saya jurusan mesin yang hanya bisa bongkar simpan mesin, tidak bisa pasang.

Tetapi ketika globalisasi masuk, pemerintah sendiri belum menyiapkan standar pendidikan minimum yang berkualitas, kan persoalannya menjadi lain?

Itulah maka kita persiapkan undang-undang badan hukum pendidikan. Sekarang dalam globalisasi semua harus berbadan hukum, kalau tidak, dianggap tidak mantap. Yang berbadan hukum bisa melakukan tindakan-tindakan hukum.

Kalau misalnya UII (Universitas Islam Indonesia) tidak berbadan hukum, yang berbadan hukum yayasannya, maka yang selalu melakukan kontak ke luar negeri hanya yayasannya. Karena UII-nya bukan badan hukum. Kalau baca *Kompas* hari ini saya punya pernyataan okelah, kita akomodasi dulu, kita berikan pilihan mau yayasannya berbadan hukum, atau mau satu-

an pendidikannya silahkan.

Nanti saya mengatakan kepada teman-teman kerja yang bertanya mana yang lebih bagus Pak Anwar, pilih satuan pendidikan berbadan hukum. Sebab kalau DPR yang akan datang menetapkan yang boleh mendapat bantuan APBN adalah satuan pendidikan yang berbadan hukum. Tidak boleh rekening yayasan, harus rekening Rektor. Bank hanya bisa memberikan nomor rekening kalau punya badan hukum.

Makanya banyak sekolah tidak bisa menerima bantuan melalui APBN karena tidak punya badan hukum, tidak punya nomor rekening, yang ada rekening kepala sekolah dan itu tidak bisa. Ini yang orang tidak pahami tentang BHP, kita buat sasarannya untuk ke depan.

Mengenai disparitas kualitas pendidikan yang mencolok Anda melihat sebagai persoalan?

Ukuran berkualitas harus didefinisikan. Saya kembali lagi ke UU Pendidikan yang disebut berkualitas kalau seseorang itu potensinya berkembang. Misalnya saya hanya mau menjadi pelukis, apakah saya perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari teknologi komputer. Saya mau menjadi pemain bola saja, atau sama dengan pemain bulu tangkis Taufik Hidayat yang satu kali menang dapat dua rumah. Atau jadi Tukol yang sekali tampil Rp 60 juta.

Jadi anak di desa jangan didorong untuk menguasai

sesuatu yang mungkin tidak mampu dia jangkau. Ada sekolah di Tomohon namanya sekolah berbasis kehidupan, itu lebih bagus.

Anda mengatakan biaya pendidikan pertahun Rp 6 juta?

Itu untuk tingkat SD, SLTP. Untuk perguruan tinggi kalau ilmu sosial Rp 11 juta per tahun. Dibagi 10 sekitar Rp 1 jutalah per bulan. Itu sudah bagus dan cukup.

Jadi berapa persen biaya itu dibantu oleh negara, sebab APBN tak sanggup mengalokasikan hingga 20 persen untuk pendidikan?

Sekarang kita menggagas orang membayar sesuai dengan penghasilan orangtuanya. Jadi, kalau saya mengukur Rp 9 juta per tahun per mahasiswa bukan berarti satu anak harus membayar sekian.

Kalau anaknya Gubernur Bank Indonesia yang orang tuanya punya gaji Rp 200 juta per bulan, tentu tidak boleh bayar Rp 1 juta. Dia bayar Rp 100 juta atau berapalah. Tapi kalau anaknya tukang sayur mungkin bayar Rp 200 ribu saja. Maka terjadilah subsidi silang yang adil. Tapi kalau dirata-ratakan akan mencapai Rp 11 juta.

Ini yang akan kita simulasi di RUU-BHP, kita letakkan bahwa setiap satuan pendidikan harus menampung sebanyak-banyaknya 20 persen anak orang miskin. ■



Kualitas pendidikan tak kunjung meningkat karena mesin birokrasi pendidikan sarat inefisiensi.

Industri Pulp dan Kertas Belum Mandiri

Walau Indonesia memiliki industri bubur kertas (*pulp*) dan kertas (*paper*) berskala raksasa, rupanya, diam-diam menyimpan segudang masalah pula. Produknya ditentang di luar negeri hingga dikenakan tarif bea masuk yang tinggi. Di dalam negeri apalagi, semua bahan baku kayunya diduga merupakan hasil penjarahan dari hutan alam.

Hal itu terbukti, ketika hutan-hutan di wilayah Riau sejak delapan bulan lalu ditandai dengan garis polisi (*policy line*). Sekonyong-konyong muncul jeritan kalau-kalau industri ini akan kehabisan bahan baku dan terancam tak dapat berproduksi lagi mulai Oktober nanti.

Uniknya, gema teriakan yang diwakili dua industri terbesar Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dari kelompok Raja Garuda Mas (RGM) milik konglomerat Sukanto Tanoto dan kelompok Sinarmas milik taipan Eka Tjipta Widjaja dari Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), itu lebih diperkeras lagi oleh Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kedua organisasi kumpulan para pengusaha ini bersedia menggadang nasib 550 ribu pekerja di kedua perusahaan, ditambah jutaan orang lain yang memiliki kepentingan di dalamnya, dengan menyebutkan mereka bakal kehilangan mata pencaharian. Masih menurut keduanya, negara bahkan terancam akan kehilangan devisa sebesar 4 miliar dollar AS.

Banyak rahasia umum di lingkungan industri pulp dan kertas terlanjur sudah dianggap hal yang lumrah. Misalnya, industri ini lebih suka membalak kayu secara liar di hutan-hutan alam, daripada menyediakan sendiri bahan baku kayu dengan mengusahakan hutan tanaman industri (HTI). Pembalakan dilakukan oleh para kontraktor yang ditunjuk. Ada yang menghitung, karena pembalakan liar setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 27 kilometer persegi, setara dengan 40 kali luas Jakarta. Atau, setiap 10 detik kita kehilangan hutan alam seluas lapangan bola, dan merugikan negara sebesar Rp 45 triliun per tahunnya.

Industri pulp dan kertas Indonesia terbukti belum bisa mandiri dalam menyediakan bahan baku, kecuali dengan membalak. Hal ini telah memberikan peluang

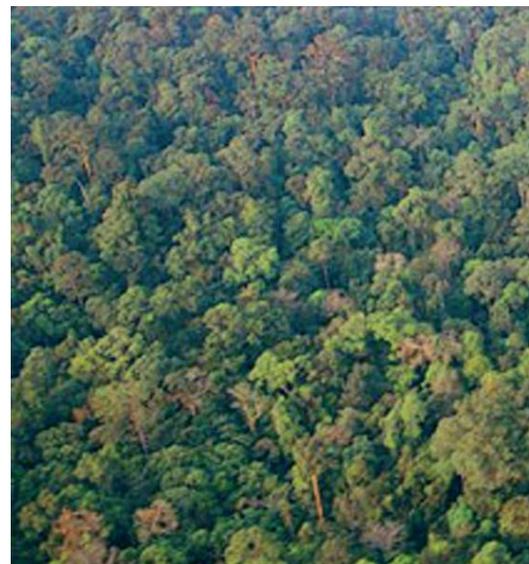
bagi negara tujuan ekspor untuk mengenakan berbagai pembatasan terhadap hasil ekspor Indonesia. Dunia sampai mengancam akan memboikot produk perusahaan RAPP dan IKPP, karena keduanya memanfaatkan hutan alam sebagai bahan baku. Tetapi, demi untuk menangkisnya, kalangan industri pulp dan kertas dalam negeri lebih suka mengalihkan persoalan dengan menyebutkan pembatasan terjadi karena ketatnya persaingan global, bahkan mengarah tidak sehat hingga merugikan Indonesia.

Masalah Klasik

Dari sekitar 80 perusahaan pulp dan kertas yang ada di Indonesia, dengan total kapasitas nasional 6,29 juta ton per tahun, Grup Sinarmas melalui Asia Pulp & Paper (APP) menguasai pangsa pasar terbesar. APP menghimpun tujuh anak perusahaan yakni PT Pabrik kertas Tjiwi Kimia, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Pindo Deli Pulp and Papers Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna, dan PT Purinusa Ekapersada. Total kapasitas APP 2,68 juta ton per tahun, atau 42 persen dari kapasitas nasional.

Berada di peringkat kedua PT Riau Andalan Pulp and Paper milik grup Raja Garuda Mas, yang juga pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Toba Samosir, Sumatera Utara. RAPP memiliki kapasitas produksi 2,21 juta ton pertahun atau 35 persen dari kapasitas nasional.

Indonesia sendiri memasok 2,5 persen dari kebutuhan kertas dunia yang mencapai 350 juta ton, dan pulp yang 200 juta ton per tahun. Indonesia adalah pemasok kertas terbesar ke-12 di dunia, atau terbesar keempat di Asia setelah China, Jepang, dan Korea Selatan. Kendati padat modal, dibutuhkan 1 miliar dollar AS untuk membangun industri berkapasitas 1 juta ton per tahun, dan berjangka waktu



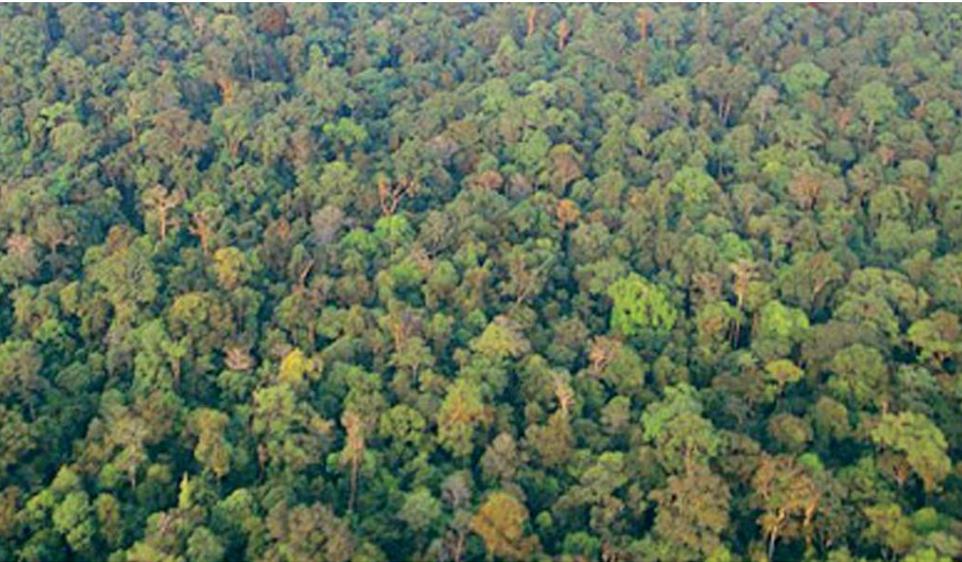
Sekitar 550.000 karyawan IKPP dan RAPP terancam te

antara 7-8 tahun sejak penyiapan tanaman hingga panen, bisnis pulp dan kertas tetap menarik. Harga pasaran dunia saat ini untuk pulp 600 dollar AS per ton (sebelumnya 300 dollar AS per ton), dan harga kertas 800 dollar AS per ton.

Besarnya kapasitas produksi RAPP dan IKPP membuat pemenuhan akan bahan baku berpotensi untuk dipasok melalui praktek-praktek ilegal dengan mengeksploitasi hutan alam. Diperkirakan 70 persen kebutuhan bahan baku keduanya berasal dari hutan alam. Sebab hutan tanaman industri yang mereka usahakan masih tak mencukupi. Menurut organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), tujuh industri pulp nasional setiap tahun membutuhkan kayu hingga 27,71 juta meter kubik. RAPP saja setiap tahun membutuhkan bahan baku 9,468 juta meter kubik, yang bisa dipasok sendiri baru sebatas 5,465 juta meter kubik. Sedangkan IKPP membutuhkan bahan baku 8,623 juta meter kubik pertahun, mengalami kekurangan pasokan 3,242 juta meter kubik.

Hebatnya, kejahatan kemanusiaan pembalakan liar untuk menutupi kekurangan 70 persen kebutuhan bahan baku dilakukan secara berjamaah dengan melibatkan oknum pengusaha, penegak hukum, politisi, dan masyarakat. Aliansi Penyelamat Hutan Riau (APHR), yang dibentuk oleh berbagai LSM untuk menyelamatkan hutan di wilayah Riau, berkali-kali menemukan kasus kejahatan kemanusiaan di hutan Riau.

Dalam sebuah investigasi Juli 2004 misalnya, APHR menduga kuat IKPP telah melakukan tindak pidana kehutanan dengan menerima kayu ilegal. Perusahaan ini menurutnya bisa dikenai pasal 50 ayat 3 butir f UU No. 41/99 tentang Kehutanan. Pasal pelanggaran menyangkut larangan menerima, membeli, menyimpan atau



Perkena PHK lantaran sulit memperoleh pasokan bahan baku

memiliki hasil hutan yang diketahui patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pada Maret 2006 RAPP dan IKPP sudah pula diingatkan agar tidak mengambil kayu dari tebangan hutan alam sebagai bahan baku. Pada Februari 2007 aparat Kepolisian Daerah Riau menahan 27 sopir truk yang sedang mengangkut 1.300 batang kayu ilegal yang tak disertai dokumen resmi. Kayu yang diduga kuat hasil penjarahan di lahan gambut Semenanjung Kampar, itu dimaksudkan untuk memasok pabrik bubur kertas RAPP. Untuk mengusut kasus yang dikategorikan prioritas ini, Mabes Polri sampai-sampai menerjunkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Bambang Hendarso Danuri, Direktur Tindak Pidana Tertentu Birgjen Polisi Tukarno, dan Kapolda Riau Brigjen Polisi Sutjiptadi, serta tim penyidik dari Mabes Polri.

Jeda Pembalakan

Pemerintah sesungguhnya memiliki rencana yang baik untuk membangun industri pulp dan kertas yang sehat, sekaligus terhindar dari perbuatan kejahatan kemanusiaan berupa pembalakan liar.

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia, membuktikannya. Inpres ini di lapangan terkadang ditafsirkan secara berbeda antara Kepolisian dan Departemen Kehutanan. Bahkan, karena beda tafsir sempat memicu perseteruan antara Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dengan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Kaban menilai Kepolisian asal main tangkap tanpa meneliti lebih jauh status kayu tangkapan. Banyak operasi *illegal logging* yang berada di luar tujuan pokok operasional. Kaban minta supaya jangan

sampai yang tak bersalah dan punya izin jadi korban. Sebaliknya, Sutanto menampik Kaban dengan mengatakan aparatnya sudah bertindak sesuai dengan peraturan. Sutanto juga menolak jika ada anak buahnya disebut bermain mata dengan para pencoleng kayu.

Kaban kemudian mengatakan lagi agar jangan ada pihak yang menghambat jalannya industri kehutanan dalam penanganan pembalakan liar. Tindakan dan penegakan hukum pada kasus pembalakan liar harus jelas standar dan masanya. "Jangan sampai orang terkatung-katung. Pemerintah menginginkan semua pelayanan lebih cepat dan para investor tak boleh terganggu kegiatannya," kata Kaban. Ia menegaskan industri pulp dan kertas di Riau harus tetap jalan karena pemerintah tetap menaruh perhatian pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

Semua pihak yang bertikai masih belum memiliki kata sepakat bagaimana menyelamatkan hutan Indonesia dari pembalakan. Suara terbesar yang muncul justru menyebutkan bagaimana menyelamatkan kedua perusahaan besar. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apoindo), Sofyan Wanandi mengatakan sekitar 550.000 karyawan IKPP dan RAPP terancam terkena PHK lantaran sulit memperoleh pasokan bahan baku. Rudi Fajar Presiden Direktur RAPP turut pula menimpali. "Jumlah itu yang langsung bisa kena PHK kalau kita tidak beroperasi. Masih ada sekitar 300 ribu lagi yang merupakan pekerja tidak langsung, atau mendapat penghasilan dari beroperasinya perusahaan," kata Rudi Fajar.

Gandi Sulistyanto, Wakil Presiden Komisaris IKPP lebih aneh lagi. Ia justru bertanya mengapa kepolisian menahan 140 alat berat miliknya, dan melarang

memanfaatkan lahan HTI miliknya yang telah mengantongi izin. Sebab manajemen perusahaan ini juga mengeluarkan pernyataan yang berbeda. Yakni, bahan baku dari hutan tanaman industrinya belum bisa digunakan karena baru berumur satu sampai enam tahun, dari umur ideal enam sampai tujuh tahun.

Menteri Perindustrian mengatakan kalau melihat total areal tanaman industri yang dikuasai IKPP seluas 300 ribu hektar, dengan pola tanam yang benar seharusnya IKPP tidak kesulitan bahan baku.

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ketersediaan bahan baku kayu bagi RAPP dan IKPP. "Iya, kita mendesak pemerintah. Kita mendukung dihentikannya pembalakan liar, tapi semuanya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada," kata Hidayat. Ia sudah mengirim surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli lalu. "Konflik tersebut sudah berkepanjangan dan sudah mengancam iklim dan citra investasi di Indonesia, sehingga pemerintah pusat cq Presiden perlu turun tangan," kata Hidayat.

Sementara itu, garis polisi yang selama berbulan-bulan membatasi hutan tanaman industri milik IKPP, ternyata sudah dibuka sebagian. Hal ini terjadi karena kepolisian tidak mendapatkan bukti-bukti terjadinya pembalakan liar.

"Walaupun belum semuanya, tetapi sebagian *police line* sudah dibuka siang ini. Tidak cukup ditemukan bukti untuk pengadilan sehingga polisi menghentikan penyidikan," kata G. Sulistyanto, di Jakarta, Selasa (28/8).

Sulistyanto menyebutkan isu pembalakan liar sengaja disinyalir dengan motif persaingan bisnis. "Pangsa pasar bubur kertas dari Indonesia semakin besar, sedangkan pesaing tidak memiliki lagi pasokan bahan baku dan berusaha menghambat pertumbuhan industri bubur kertas Indonesia," ujarnya.

Tetapi bagi Walhi, RAPP dan IKPP adalah perusahaan yang rakus memangsa hutan Riau selama beroperasi dua dekade antara tahun 1985-2005.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad mengatakan, *moratorium logging*, atau jeda balak, atau jeda tebang adalah satu-satunya pilihan yang strategis untuk menyelamatkan hutan tropis sebelum hutan-hutan hancur. Moratorium juga mendorong upaya rehabilitasi kawasan hutan dalam jangka panjang dan akan menyelamatkan hutan Indonesia.

Jeda balak yang dimaksudkan Walhi adalah menyetop semua bentuk penebangan hutan terutama hutan alam selama 20 tahun. Dengan adanya jeda balak, hutan yang tadinya dibabat diberi kesempatan bernafas untuk tumbuh lagi. ■ HT

Prof. Dr. der Soz., Drs. Gumilar Rusliwa Somantri

Skema Baru Untuk Beasiswa

Mahasiswa yang punya bakat, meski berasal dari pelosok negeri, daerah terpencil, dan tidak punya kemampuan ekonomi, tetap bisa kuliah di UI.

Ditemui di sela-sela pertandingan final sepakbola Divisi 2 Liga Indonesia dan reuni dengan sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI), Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dengan senang hati bersedia menerima Retno Handayani, Azizah dan Wilson Edward dari *Berita Indonesia* dan menyampaikan sejumlah program kampusnya untuk calon mahasiswa yang tidak mampu.

Menyoroti persoalan mahal-biaya pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, rektor yang satu ini menyatakan bahwa UI telah berkomitmen untuk tetap mendukung pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, UI akan tetap mempertahankan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Juga akan memperluas jalur penelusuran minat dan bakat. Artinya, mahasiswa yang punya bakat dan kepanampilan, yang berasal dari pelosok negeri, daerah terpencil, dan tidak punya kemampuan ekonomi, tetap bisa kuliah di UI. Selain itu, UI juga akan mengembangkan jalur sarjana daerah, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Pemda. Sekarang ini program tersebut sudah berjalan untuk fakultas kedokteran dan ilmu komputer. Kedepannya akan diperluas ke fakultas-fakultas lain.

Dalam hal komitmen UI bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, menurut Gumilar, pihaknya akan memperkenalkan dua format beasiswa. Pada intinya, beasiswa itu tidak diberikan secara cuma-cuma.

"Kami ingin mendidik mereka menjadi calon pemimpin bangsa yang punya harga diri,

percaya diri dan tetap tanggung jawab dalam upaya membangun generasi muda yang berkesinambungan," ujarnya.

Format yang pertama, mahasiswa yang kurang mampu akan memperoleh dana beasiswa dalam jumlah yang cukup, namun mereka harus bekerja di kampus. Misalnya, di perpustakaan atau membantu proses-proses administrasi dan sebagainya.

Format kedua, mahasiswa penerima beasiswa tidak bekerja di kampus tetapi harus mengembalikan uang itu setelah lima tahun dia lulus.

Untuk memenuhi program beasiswa tersebut, tentunya memerlukan dana. Menurut Gumilar, dana tersebut akan diperoleh dari para donatur, filantropis, dan juga yayasan. Saat ini, telah berdiri sebuah yayasan yang sudah berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Yayasan tersebut terpisah dari UI. Namun di dalam akta pendiriannya disebutkan bahwa tujuan yayasan adalah untuk memberikan beasiswa pada mahasiswa UI yang tidak mampu.

Sumber dana kedua, menurutnya, akan dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Sekarang ini sudah ada beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa melalui UI. Sumber dana ketiga, adalah dari UI sendiri.

Tahun 2007, UI sudah mengucurkan dana beasiswa sebesar Rp 32 miliar per tahun. Sejumlah Rp 12 miliar berasal dari donatur maupun perusahaan-perusahaan, antara lain Pertamina, BUMN dan perusahaan-perusahaan asing. Sisanya sejumlah Rp 22 miliar berasal dari UI sendiri.



Menurutnya, segenap civitas akademika UI akan tetap mendukung mahasiswa pandai dan berbakat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk bisa berkuliah di UI. Di sisi lain, mahasiswa yang berasal dari golongan keluarga mampu tentu tetap harus membayar uang kuliah sesuai *unit cost*.

Anggaran Pendidikan

Selaku pendidik dan akademisi, Gumilar berusaha bersikap obyektif dalam menyikapi polemik anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kini tengah digodok DPR.

Menurutnya, persoalan anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan undang-undang itu harus dilihat hati-hati.

Terlebih dahulu harus didefinisikan pendidikan yang dimaksud UU. Apakah pendidikan yang berada di bawah Depdiknas atau termasuk pendidikan yang juga diselenggarakan oleh seluruh departemen, swasta dan industri.

Sebab, jika dipandang dengan ruang lingkup lebih luas, sudah lebih dari 20% dana pendidikan terpenuhi, yakni mencakup dana yang dikeluarkan Depdiknas, seluruh departemen dan kementerian, swasta, dan *private company*.

"Kita harus kritis," ujarnya.

Dalam UU, jumlah 20% itu diambil dari anggaran negara. Namun, apakah jumlah 20% itu dari total anggaran atau 20% dari anggaran yang riil. Seperti diketahui, sekitar 35% dari anggaran negara setiap tahun dialokasikan untuk membayar utang. Sisanya tinggal 65%.

"Pertanyaannya, apakah anggaran pendidikan itu 20% dari sisa 65%," ujarnya. Menurutnya, kalau pun anggaran pendidikan itu diambil dari 65% anggaran yang tersisa setelah dikurangi untuk membayar utang, kemudian ditambah dengan anggaran pendidikan dari departemen-departemen dan kementerian yang ada, itu sudah mendekati jumlah 20%.

Dia mengharapkan, di masa yang akan datang pendidikan ditangani oleh Depdiknas saja. Departemen-departemen lainnya tidak perlu lagi menyelenggarakan pendidikan atau diklat. Mereka harus profesional memikirkan bidangnya. Pendidikan khusus atau diklat-diklat sebaiknya dikelola Depdiknas dalam unit tertentu. Sehingga anggaran pendidikan bisa terkumpul dengan jumlah sesuai UU. Kurikulumnya bisa diperbaiki bekerja sama dengan perguruan tinggi. Diakuihnya, saat ini cukup sulit untuk transformasi semacam itu. Pengalihan para peserta diklat saat ini mesti dipikirkan.

Selain itu, dia berharap di masa mendatang, anggaran riil untuk pendidikan sebesar 20% itu mesti dialokasikan terutama untuk pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi, terutama yang perguruan tinggi negeri, diberi keleluasaan melalui skema otonomi, misalnya BHMN.

Selanjutnya, dia juga berharap, agar BHMN berjalan dengan baik, Depdiknas, DPR, Depkeu, dan perguruan tinggi, bersama-sama mempercepat proses pembuatan UU yang bisa dijadikan landasan yang kokoh bagi otonomi kampus. ■RH

Kerja Sebentar, Pensiun Seumur Hidup

Era reformasi memberi peluang kepada kehidupan demokrasi yang lebih baik. Masyarakat bisa menikmati kebebasan dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Demikian pula adanya transparansi penggunaan anggaran dan sebagainya.

Namun di sisi lain reformasi juga secara sangat produktif menghasilkan banyak lembaga negara baru. Lengkap dengan perangkat pejabatnya serta berbagai fasilitas penunjang tugas seperti mobil dinas, rumah dinas, gaji besar dan uang pensiun yang bisa dinikmati sang pejabat termasuk isteri/suami dan anak-anaknya.

Bisa dibayangkan betapa banyak pejabat negara baru. Mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Di samping lembaga yang sudah ada seperti DPR, MPR, dan BPK.

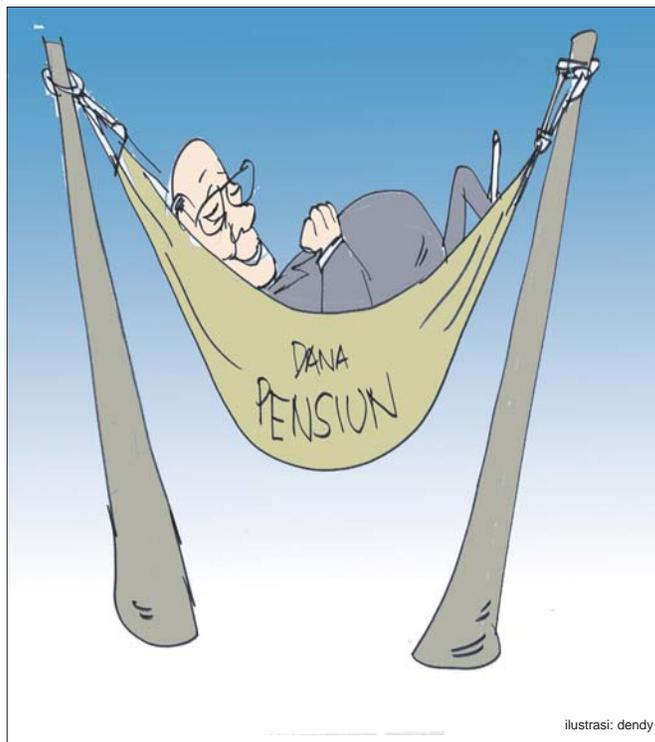
Para pejabat di berbagai lembaga itu mendapat gaji yang jumlahnya relatif besar. Sementara masa jabatan mereka pun relatif pendek, hanya lima tahun. Setelah itu mereka bisa menikmati pensiun seumur hidup.

Sebut saja misalnya pemilu legislatif yang menghasilkan 550 anggota DPR baru. Juga 128 anggota DPD. Belum lagi di tingkat daerah. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya ratusan pasca terjadinya pemekaran daerah.

Gaji besar dan hak pensiun seumur hidup, membuat banyak pihak lebih memburu menjadi pejabat negara dengan berbagai cara. Misalnya terjun di partai yang sudah ada atau bahkan mendirikan partai baru.

Alhasil dengan kondisi seperti ini, Indonesia seakan cenderung menjadi negara pejabat dan bukan negara untuk rakyat. Karena - mau tidak

Pemerintah berencana mereformasi sistem pensiun. Karena dana pensiun yang harus dibayarkan untuk pejabat publik seperti DPR sangat membebani keuangan negara.



ilustrasi: dendy

mau - anggaran yang harus disediakan negara untuk membayar gaji dan pensiun mereka dari tahun ke tahun makin membengkak.

Ironisnya, anggaran negara yang terbatas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, banyak terserap untuk gaji dan pensiun pejabat negara. Akibatnya kepentingan rakyat menjadi terabaikan dan jumlah rakyat miskin cenderung bertambah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Taufiq Effendi pernah mengungkapkan, dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 3,7 juta orang, jumlah yang pensiun per tahun mencapai 120 ribu sampai 150 ribu orang. Bahkan pada tahun 2012 nanti jumlah pensiunan akan mencapai sekitar 5 juta orang dan diperlukan dana Rp

6 triliun perbulan.

Oleh karena itu, ada pemikiran untuk menyatop pemberian dana pensiun seumur hidup bagi pejabat negara dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat.

Belakangan, Meneg BUMN Sofyan Djalil juga menyoroti masalah dana pensiun. Kepada wartawan (20/8), Sofyan Djalil menyatakan pemerintah akan mereformasi sistem pensiun. Karena pejabat publik seperti DPR sangat membebani keuangan negara.

Saat ini pejabat negara dan PNS mendapatkan dua jenis pensiun. Yakni pensiun yang dibayar secara *lumpsum* sekaligus dana pensiun yang dibayar rutin seumur hidup. Ke depan pejabat negara yang masa kerjanya lima tahun diharapkan diberi pensiun jenis *lumpsum* saja.

Sangat Tidak Adil
Anggota Komisi XI DPR

Dradjat Wibowo menilai pejabat negara seperti anggota DPR, DPD, menteri, pimpinan komisi (KPU, KY, KPPU, KPK, Komnas HAM), pimpinan lembaga negara (MK, BPK), menteri, presiden dan wapres tidak perlu diberi pensiun seumur hidup. Karena sifatnya adalah jabatan publik dan masa pengabdian sangat terbatas. Maksimal dua periode atau 10 tahun. Itu pun kalau terpilih kembali.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPD Irman Gusman yang menyadari betapa beratnya keuangan negara jika harus menanggung pensiun seumur hidup para pejabat negara.

Menurutnya, seharusnya yang berhak mendapat pensiun itu hanya pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa pengabdian yang lama kepada negara, bukan yang hanya lima atau sepuluh tahun seperti jabatan politikus.

Pejabat tinggi negara sebaiknya hanya mendapatkan pesangon. Dengan cara ini akan lebih praktis dan juga tidak membebani keuangan negara dalam waktu lama. Disebutkan, untuk tahun 2007 saja, total dana pensiun yang harus disediakan negara mencapai Rp 27,6 triliun.

Ketua F-PAN Zulkifli Hasan berpendapat, jika memang ada wacana perubahan penerima pensiun, maka perlu mengubah UU. "Persoalannya bukan kita mau atau tidak mau mendapatkan pensiun, melainkan aturannya memang menentukan demikian," tandasnya.

Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy berpendapat, jika dilihat dari masa kerja anggota DPR yang hanya lima tahun, memang tidak adil jika mereka mendapat pensiun rutin seumur hidup.

Reformasi gaji para pensiunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan PNS, TNI, Polri, sekaligus menciptakan efektivitas birokrasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara. ■ SP



Amien Rais dan Soetrisno Bahir di tengah massa PAN.

foto: repro kompas

PAN Ingin Prorakyat

Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menjadi partai yang prorakyat, dengan mereposisi diri sebagai partai bebas dan kritis terhadap pemerintah.

Sikap itu disampaikan ketua umumnya, Soetrisno Bachir, kepada wartawan di sela-sela kegiatan gerak jalan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta (26/8) dalam rangka memperingati hari jadi ke-9 PAN.

Menurut Soetrisno, PAN tidak akan mendukung kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. PAN bahkan akan menentang dengan keras.

Manuver PAN ini agaknya tidak terlepas dengan kepentingan partai ke depan. Namun tetap membungkusnya dengan semangat kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. "Kalau berbagai program pemerintah berpihak kepada rakyat, tentu kami juga akan

fair mendukungnya," kata Soetrisno seraya menambahkan bahwa sikap kritis yang diambil PAN masih dalam koridor yang konstruktif.

Selama ini, PAN yang memiliki dua kader di Kabinet Indonesia Bersatu (Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mensesneg Hatta Rajasa), merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan SBY-JK. Apa pun kebijakan yang diambil pemerintah sepenuhnya didukung PAN. Misalnya saja dalam kebijakan menaikkan harga BBM dan impor beras yang sempat menimbulkan polemik karena dianggap memberatkan rakyat.

Soal keberadaan kader PAN di kabinet, Soetrisno dalam suatu kesempatan menyatakan kedua kadernya itu sudah

'diwakafkan' untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah keduanya tetap akan dimanfaatkan, sepenuhnya terserah kepada Presiden SBY. "Mau dimanfaatkan *monggo* (silakan), mau tidak dimanfaatkan ya *monggo*," kata Ketua Majelis Penasehat Partai PAN Amien Rais menirukan ucapan Soetrisno Bachir sebagaimana dikutip *Indo Pos* (29/8).

Amin Rais sendiri mengaku tidak akan mengintervensi kebijakan Ketua Umum DPP PAN tersebut yang merupakan hasil Mukernas PAN di Palembang bulan Juni lalu. Kendati begitu, menurutnya, perubahan posisi PAN terhadap pemerintahan SBY-JK, dari mitra kritis menjadi bebas kritis, mengharuskan PAN mengamati secara jeli semua kebijakan pemerintah. Kalau sampai ada kebijakan yang tidak prorakyat dan tidak prokepentingan nasional, kebijakan itu harus dikritik dan dikoreksi secara total.

Lebih Kritis

Sikap PAN sebagai partai bebas yang kritis ini akan diimplementasikan dalam kiprah Fraksi-PAN di DPR. Seperti diutarakan Ketua Fraksi PAN di DPR, Zulkifli Hasan, fraksinya akan lebih kritis

dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.

"Kami ini bebas kritis. Mohon maaf kalau program bertentangan dengan rakyat banyak, PAN akan menolaknya dengan keras. Misalnya DCA (*Defence Cooperation Agreement*) atau Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Republik Indonesia dengan Singapura pun kami tolak. Penanganan kasus lumpur Lapindo pun, kalau tiga bulan ini tidak terbukti, akan jadi interpelasi," kata Zulkifli seperti dikutip *Kompas* (27/8).

Boleh jadi manuver DPP-PAN ini sebagai antisipasi menghadapi Pemilu 2009. Partai ini seakan-akan dilanda kegamangan karena munculnya partai baru yang juga berasal dari kalangan Muhammadiyah. Belum lagi menghadapi kegiatan partai-partai lain yang berbasis Islam seperti PPP, PKS, dan PKB.

PAN mengakui selama ini belum bisa berkiprah banyak untuk kepentingan rakyat karena hanya memiliki 53 suara di parlemen. Menepati urutan kelima setelah Partai Golkar, PDIP, PPP dan Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009 nanti PAN menargetkan memperoleh 100 kursi di DPR.

Salah satu langkah yang dilakukan PAN adalah mendekati diri dengan para petani, nelayan, buruh dan pengusaha mikro. Alasannya, mereka termarginalkan dan belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan kehidupannya perlu semakin diperbaiki.

"Bayangkan, petani di Amerika Serikat, Jepang dan sejumlah negara Eropa yang dikenal sebagai negara maju masih mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya. Adapun di Indonesia, petani dibiarkan sendiri menghadapi pasar bebas," kata Soetrisno saat berdialog dengan para petani di Jati Agung, Lampung (28/8).

Dia pun menyatakan kebijakan pemerintah belum prorakyat. Padahal pemerintah berkesempatan untuk membantu petani. "Pemerintahlah yang memiliki dana besar dan jaringan luas untuk digerakkan membangun kesejahteraan rakyat," tegasnya. ■ **SP**

Konversi Minyak Tanah Tetap Berlanjut



laksanaan proyek konversi yang dilakukan PT (Persero) Pertamina di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Belajar dari program konversi Kemayoran yang sudah berlangsung enam bulan terakhir, kata Purnomo, terbukti warga setempat mengaku bisa menghemat uang sekitar Rp 6.000, setiap 10 hari.

Kepada Samsuri dari *Berita Indonesia*, Deputy Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya mencontohkan pula bagaimana keberhasilan konversi minyak tanah terjadi di wilayah Kemayoran, Cempaka Baru, dan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kata Hanung, dari ujicoba yang berlangsung setahun terakhir berdasarkan survei diketahui bahwa 99 persen masyarakat pengguna gas elpiji hasil konversi tidak mau lagi kembali ke penggunaan minyak tanah.

Peran Besar Pertamina

Hanung Budya memaparkan, berdasarkan pembagian tugas dari pemerintah awalnya Pertamina hanya bertugas menyiapkan tabung gas ukuran 3 kg. Lalu instansi lain seperti Departemen Perindustrian menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tabung dan kompor gas. Lalu Departemen Koperasi dan UKM mencacah dan membagi kompor dan tabung gas gratis. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sosialisasi program konversi.

Akan tetapi dalam perjalanannya beberapa instansi dimaksud mengalami kesulitan menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan anggaran APBN 2007 yang tidak mencukupi. Karena itu diambillah jalan tengah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memutuskan supaya Pertamina menalangi pembiayaan lebih dulu.

Perintah Wapres itulah selanjutnya membuat Pertamina mengalami perluasan peran. Semua tugas konversi minyak tanah nyaris dibebankan kepada Pertamina. Mulai pengadaan kompor dan tabung gas hingga sosialisasi dan sebagainya.

Karena itu, Hanung Budya menyebutkan program konversi sebagai sebuah pekerjaan berat dan besar yang dibebankan kepada Pertamina. Program ini berskala nasional dan dalam jumlah yang besar serta waktu yang relatif pendek, dari semula enam tahun dipercepat menjadi empat tahun saja.

"Kita berharap program ini bisa selesai empat tahun atau sampai tahun 2011. Dari perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan secara nasional dibutuhkan 56 sampai 58 juta gas elpiji," kata Hanung.

Hanung menyebutkan konsumen pengguna minyak tanah di wilayah Jabodetabek saja sangat besar sebanyak 2,7 juta Kepala Keluarga (KK), dari total target nasional yang mencapai 6 juta KK. Khusus di daerah Jabodetabek sosialisasi konversi dimulai sejak 8 Mei 2007 dan berlangsung secara sistematis. Sebelum kompor dan tabung gas elpiji dibagikan masyarakat dicacah dulu, data dari aspek persyaratan dan administrasi. Termasuk peragaan bagaimana cara pemakaian kompor gas. Pertamina bahkan sudah membentuk tim sosialisasi secara lebih lengkap.

Hanung berharap masyarakat yang sudah mendapatkan gratis kompor dan tabung gas elpiji tidak menjual barangnya hingga subsidi minyak tanah secara total dicabut. Sebab pada saat itu harga minyak tanah sudah dapat disesuaikan mengikuti mekanisme pasar, atau dikenakan tarif non subsidi. Di wilayah yang sudah mendapatkan jatah gratis kompor dan tabung gas elpiji tentu menjadi tidak elok apabila masih terdapat dua barang yang disubsidi dan dengan tujuan yang sama pula yakni sebagai bahan bakar. Hanung menyebutnya sebagai duplikasi.

Berbagai masalah yang sempat muncul di lapangan, itu tak lebih dari gejala perubahan yang biasa terjadi pada awal-awal pelaksanaan. "Kita berharap semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menggunakan gas elpiji," kata Ifki Sukarya, Manajer Umum Hubungan Masyarakat Pertamina. ■ RI

Deputi Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya.

foto: berindo samsuri

Setelah dikritisi oleh berbagai media massa sebab sarat kontroversi, program konversi minyak tanah ke gas elpiji akhirnya tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Penegasan ini muncul setelah dilakukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian program.

Penegasan kelanjutan program konversi minyak tanah disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ke pimpinan berbagai media massa nasional, yang berkumpul di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (28/8) malam. Wapres menyebutkan, keuntungan jangka panjang program konversi akan sangat signifikan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. "Yang protes itu pasti yang dirugikan oleh program ini, ya pihak pengoplos minyak tanah. Jadi mereka itu yang protes," kata Wapres.

Berbagai kendala dan kontroversi yang sempat mengiringi pelaksanaan program, menurut Kalla adalah dinamika yang bersifat sementara saja. "Kami tetap terima kritik, soal dis-

tribusi minyak tanah akan terus diperbaiki," ucapnya.

Menurut Kalla secara ekonomi program konversi akan menghasilkan keuntungan Rp 20-30 triliun per tahun, dari pengurangan beban subsidi minyak tanah yang berhasil dihemat. Penghematan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Sebelum pernyataan Wapres, Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro pada Minggu (26/8) sudah pula memastikan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh program konversi minyak tanah ke elpiji, menyusul kelangkaan minyak tanah sebagai dampak pelaksanaan konversi.

Kata Purnomo, pihaknya akan belajar dari suksesnya pe-



BAGIAN TUJUH

Pada bagian ketujuh kilas balik Al-Zaytun (29 Agustus 1989-29 Agustus 2007), kami menyajikan sosok dan visi Syaykh Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang selaku tokoh pendiri sekaligus personifikasi Ma'had Al-Zaytun. Dia adalah seorang tokoh pendidikan (pembawa) budaya toleransi dan perdamaian. Ketua Ikatan Alumni Institut Agama Islam Negeri (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Ciputat, ini memiliki wawasan kebangsaan dalam keberagaman yang menembus sekat agama, suku dan golongan, bahkan sekat bangsa dan negara. Dia seorang inovator pendidikan visioner yang menatap dan menjemput jauh ke depan menembus abad dan milenium. Berpengetahuan luas, berwibawa, tegas, kebabakan, cerdas, serta memiliki sifat dan sikap lainnya yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin dan pendidik pembawa damai dan toleransi.

Syaykh Al-Zaytun

Tokoh Pem

Damai dan Tol

Alumni Ponpes Gontor ini sungguh seorang pelopor pendidikan terpadu (sebuah paradigma baru pendidikan). Sehingga atas jasanya melakukan perubahan besar dalam transformasi kependidikan di Indonesia, putera bangsa kelahiran Gresik, 30 Juli 1946, itu telah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang *Management, Education and Human Resources* oleh IMCA (*International Management Centres Association*)-Revans University, sebuah universitas *action learning* yang berbasis di Buckingham, Inggris dan Amerika Serikat. Dia dinilai telah sukses mewujudkan ide baru dalam sebuah paradigma baru pendidikan Islam melalui Kampus Al-Zaytun.

Menurut *Regional Director and Associate Professor IMCA*, Antony Hii, Syaykh Panji Gumilang adalah seorang inovator pendidikan yang senantiasa sungguh-sungguh belajar sambil mengambil aksi agung dalam rancangannya. "Tak ada kata tak bisa. *He is a man with great of action learning*," puji Dr. Antony Hii, lalu menyebut serangkaian partisipasi Syaykh Al-Zaytun di bidang pendidikan dan manajemen sumber daya manusia, seperti sebagai anggota Komisaris Akademi Arab di Kairo, sebagai anggota Organisasi Asosiasi Perdamaian Taiwan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Ketua Masyarakat Ekonomi Pesantren Indonesia.

Pembawa Damai dan Toleransi

Syaykh Al-Zaytun ini adalah seorang beriman pembawa damai dan toleransi. Di pondok pesantren modern ini, dia telah mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Bukan hanya dalam teori, wacana atau slogan, tetapi dalam aplikasi dan keteladanan. Sebagai

pemangku pendidikan pesantren, dia selalu menunjukkan keteladanan dalam membimbing santrinya untuk membina persaudaraan dengan siapa pun tanpa membedakan asal-usul dan agamanya.

Tidak banyak, bahkan mungkin belum ada, pemimpin pondok pesantren yang secara khusus mencetak kartu ucapan Selamat Natal untuk dikirimkan kepada para pendeta dan pimpinan gereja, baik yang sudah dikenal maupun belum dikenalnya. Bahkan sebaliknya, justru ada ulama yang mengharamkannya.

Sejak ia masih belajar di Pondok Pesantren Modern Gontor, sudah mengimpikan berprofesi sebagai guru yang tanpa kekerasan. Dia tidak suka kekerasan. Dia ingin Indonesia memasuki zona damai dan demokrasi. Dalam perjuangan yang panjang tak kenal lelah, pada usia memasuki lima puluhan tahun, lulusan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini berhasil mewujudkan impiannya membangun sebuah lembaga pendidikan *pesantren spirit but modern system*.

Yakni, Kampus Al-Zaytun yang bermotto: Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Perdamaian. Sebuah motto yang merupakan padanan dari visi dan obsesi dirinya sendiri bersama sahabat-sahabatnya. Dia punya visi untuk memancarkan persaudaraan, toleransi dan perdamaian dari Al-Zaytun ke seantero Indonesia Raya bahkan ke seluruh penjuru dunia.

Patutlah para sahabatnya, termasuk sahabat yang nonmuslim, menyebutnya seorang tokoh pembawa damai dan toleransi. Pendeta Rudolf Andreas Tendeau, yang memimpin rombongan Keluarga Besar Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Koinonia, Jakarta, berkunjung ke Kampus Al-Zaytun (31/07/2004),

bawa eransi

adalah satu dari sekian banyak orang yang merasakan bagaimana sosok Syaykh Abdussalam Panji Gumilang membawa damai dan toleransi dalam komunikasi, pergaulan dan persahabatan mereka.

Adalah Syaykh Panji Gumilang yang memulai (berinisiatif) menyebar damai dan persaudaraan dalam persahabatan mereka. Manakala, dia mengirim kartu ucapan Selamat Natal kepada sejumlah pendeta dan pimpinan gereja. Kartu Natal yang menjadi awal berkembangnya damai dan toleransi sehingga kedua umat beriman itu saling mengunjungi dan saling memahami.

Bukan hanya kali ini Syaykh Panji Gumilang mengambil inisiatif damai, toleransi, persaudaraan dan persahabatan. Persahabatan yang kental juga telah lebih awal dijalin oleh Syaykh dengan komunitas Taiwan di Indonesia. Ditandai kunjungan Kepala Kantor Perwakilan Dagang dan Ekonomi Taiwan di Indonesia sejak dipimpin oleh Mr. Sui Chi Lin hingga pejabat yang baru Mr. David Y.L. Lin.

Persahabatan dengan komunitas Taiwan ini, bermula pada tahun 1997 dari pertemuan Syaykh AS Panji Gumilang dengan dua orang pengusaha Tionghoa, yakni Mr. Liang dari Taiwan, yang kemudian di Al-Zaytun dianugerahi nama Luqman, dan Mr. Hendra. Waktu itu, terjadi kerusuhan yang membuat banyak warga etnis Tionghoa menjadi korban dan ketakutan. Syaykh membuka tangan untuk memberikan perlindungan kepada keduanya.

Begitu pula persahabatan dengan John Rath, *Second Secretary* Kedutaan Besar AS yang juga sebagai Atase Politik AS, bersama rombongan berkunjung dan berdoa di Al-Zaytun. John Rath, Atase Politik negara adidaya, itu ketika berkunjung ke Al-Zaytun bertutur,



Syaykh Panji Gumilang saat dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang *Management, Education and Human Resources*.

masyarakat Amerika tetap ingin bersahabat dengan Indonesia. Bahkan John Rath berdoa di dalam bangunan Masjid Rahmatan lil Alamin agar persahabatan Indonesia dan Amerika selalu abadi. "Kami berdoa untuk kejayaan sekolah ini serta orang-orang yang bersama sekolah ini, hari ini dan di masa yang akan datang," kata John Rath.

Dalam pandangan Syaykh Panji Gumilang, persahabatan sejati akan selalu menghasilkan manfaat bagi siapa saja, terutama bagi para pelakunya. Apalagi jika persahabatan dikelola dengan cerdas, tulus dan bersahaja. Menurutnya, persahabatan adalah pintu masuk terbaik menuju perdamaian di muka bumi. Dengan persahabatan,

katanya, tak hanya perdamaian yang diperoleh, melainkan pintu kesejahteraan pun menjadi terbuka lebar.

Bagi dia dan segenap eksponen dan santri Al-Zaytun, persahabatan bukan hanya sekadar kata manis yang enak didengar. Tetapi, segenap civitas akademika Al-Zaytun telah membuktikan dalam pergaulan kesehariannya. Al-Zaytun senantiasa menjalin persahabatan dengan siapa pun yang mau tanpa memandang perbedaan agama, kultur atau afiliasi politik.

Menurutnya, toleransi adalah akidah dalam beragama. "Pengakuan adanya kekuatan Yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Allah, God, Yahweh, Elohim,



Syaykh Panji Gumilang bersama isteri, Khotimah Rahayu.

Syaykh Panji Gumilang mengatakan kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini.

yang disertai ketundukan itu, merupakan fitrah (naluri) yang dimiliki oleh setiap manusia. Kendati demikian, manusia tetap memerlukan adanya pemberi peringatan agar tidak menyeleweng dari fitrahnya, mereka adalah para nabi dan rasul," ujar Syaykh Panji Gumilang.

Dia menjelaskan, perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman, atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka (*rughbah*), takut (*ru'bah*), hormat (*ta'dzim*) dan lain-lain, itulah unsur dasar *al-din* (agama). *Al-din* (agama) adalah aturan-aturan atau tatacara hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurutnya, berbagai agama telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat (aturan) yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik agama samawi (yang bersumber dari wahyu Ilahi) maupun yang terdapat dalam agama *ardli* (budaya) yang bersumber dari pemikiran manusia. Semua agama-agama, baik samawi maupun *ardli*, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut adalah: (i) menunjukkan manusia kepada kebenaran sejati; (ii) menunjuki manusia kepada kebahagiaan hakiki; dan (iii) mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama.

Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, kata Syaykh yang tetap setia kepada isteri satu-satunya Khotimah Rahayu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini,

telah memiliki strategi, metode dan teknik pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, dia mengingatkan, sebagaimana dipesankan dengan sangat oleh Sang Pencipta agama, kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan keagamaan.

Berkaitan dengan hal ini, pada kesempatan lain kepada Wartawan Tokoh Indonesia, Syaykh Panji Gumilang mengatakan berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Menurutnya, kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. "Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya," ujarnya.

Dia pun mengutip dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Q.S. 109: "*Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianku. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdikan di pengabdianku. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.*"

Syaykh menjelaskan, sikap toleran membuahkan kemampuan yang sangat signifikan dalam menetapkan pilihan yang terbaik. Mampu mendengar berbagai ungkapan dan menyaring yang terbaik dari semua itu.

Sikap toleran, jelasnya, juga melahirkan kemampuan mengubah perilaku individu (*self correction*) terhadap pola yang selama itu dilakukan, yang tak berdaya mengubah masyarakat tradisional, tertutup dan represif, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai. "Toleran, tidak menciptakan individu yang *wangkeng*, yang tidak mau mengubah perilakunya, walau tujuannya tidak tercapai. Secara apologi bersikap dan mengatakan bahwa tujuan itu tidak tercapai karena belum waktunya, atau nasibnya memang demikian dan tidak mau mengubah diri," kata Syaykh dengan mantap. Sikap

toleran, katanya, mampu menemukan jalan keluar dan *problem solving* yang pantas dan mengangkat martabat dan harga diri dalam berbagai bidang kehidupan.

Guru, Cita-cita Mulia

Pria kelahiran Gresik 30 Juli 1946 ini, telah berhasil mewujudkan ide agung sebuah paradigma baru pendidikan (pendidikan terpadu) di Al-Zaytun. Di pondok pesantren modern komprehensif ini, ia mewujudkan pendidikan terpadu yang disimpulkannya pada pendidikan-ekonomi dan ekonomi-pendidikan, di mana pendidikan harus diciptakan sebagai gula dan ekonomi sebagai semutnya.

Jangan malah ekonomi yang diciptakan sebagai gula dan pendidikan (rakyat) jadi semutnya. Bila pendidikan sebagai gula dan ekonomi sebagai semut, maka semut (ekonomi) akan mendatangi orang yang terdidik. Karena semut adalah makhluk yang mengerti kualitas dirinya terhadap gula, sehingga semut tidak akan terkena sakit gula.

Itulah prinsip dasar dalam pendidikan terpadu yang diwujudkan di Al-Zaytun, sebuah kampus peradaban milenium ketiga sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Lembaga pendidikan sekaligus lembaga ekonomi mandiri yang diimpikannya sejak belia.

Sejak kecil, dia telah bercita-cita menjadi guru dan mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Dengan maksud agar peradaban umat manusia tidak putus, maka dengan berbagai kemampuan yang ada padanya, dia berusaha menyambungkannya. Itulah cita-cita mulianya mendirikan pesantren (kampus) ini, di samping untuk merangkum kehendak bangsa Indonesia sendiri, menjadi bangsa yang diperhitungkan di antara bangsa-bangsa lain.

Pria yang sejak kecil bercita-cita jadi guru, dan yang hingga akhir hayat akan tetap menjadi pembelajar dan pendidik, ini berpendapat bahwa peradaban tersebut harus disambung dengan manajemen 'kekitaan' bukan 'keakuan' dalam visi demokrasi, toleransi dan perdamaian. Visi inilah yang dipakainya dalam membangun dan mengelola Al-Zaytun.

Sekilas berkisah mengenai awal mula adanya ide atau cita-cita pendirian lembaga pendidikan ini. Dia mengatakan bahwa sebagaimana orang pada umumnya selalu punya cita-cita untuk berlaku, berbuat dalam kebaikan, demikian juga halnya dengan dirinya.

Dimotivasi sosok ayahnya, yang

sangat memengaruhi dan menguatkan cita-citanya menjadi guru dan mendirikan lembaga pendidikan terpadu. Ayahnya, seorang pemimpin, seorang kepala desa. Walaupun hanya sebagai kepala desa, namun ayahnya ditakdirkan oleh Ilahi menjadi orang yang suka mendidik di lingkungannya, sampai mendirikan sebuah sekolah yang dinamai orang ketika itu 'Sekolah Arab' karena setiap hari mengajarkan baca Alquran dan menulis Arab.

Di samping itu, Sang Ayah juga seorang pejuang. Sebagai seorang pejuang, Sang Ayah sengaja mempunyai banyak nama, sekali waktu dipanggil Panji Gumilang, Syamsul Alam, Mukarib, atau Imam Rasyidi. Melihat Sang Ayah yang berdimensi majemuk itu, tumbuh perasaan bangga dan senang pada diri Panji Gumilang kecil. Bangga melihat orang tuanya yang kepala desa, yang konon setiap hari harus lapor kepada Belanda, tapi sekaligus juga pejuang dan mendirikan sekolah.

Sehingga dalam kebanggaan Panji Gumilang kecil itu, timbul juga rasa penasaran melihat sikap ayahnya. "Pihak mana dipilih oleh orang tua ini?" begitu pertanyaan dalam hatinya saat itu. Maka ia akhirnya bertanya, "Ayah! Kenapa harus laporan ke Ngoro Asisten Wedana?"

"Karena dia yang menjadi pimpinan di kecamatan ini," jawab Sang Ayah.

Namun jawaban Sang Ayah belum menjawab keingintahuan dan teka-teki di hatinya. "Lalu, mengapa ayah ini kok ikut berjuang?"

"Karena kita akan merdeka," jawab Sang Ayah.

Panji kecil masih penasaran dan bertanya lagi: "Mengapa Ayah membuat sekolah?"

"Karena kamu dan kawan-kawanmu harus pintar, agar bangsa kita tidak dijajah bangsa lain," begitu jawaban Sang Ayah saat itu.

Jawaban itu direnungkan sampai akhirnya dia paham dan semakin bangga terhadap ayahnya. Perenungan itu semakin mendalam dalam hati, jiwa dan pikirannya, hingga ia masuk sekolah. Pagi hari, Panji Gumilang kecil masuk Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Dasar sekarang. Lalu petang, masuk sekolah yang didirikan orang tuanya, 'Sekolah Arab'. Sejak kelas satu SR tumbuh cita-citanya menjadi guru.

Saat itu ada program pemberantasan buta huruf (PBB) untuk orang dewasa. Lalu, suatu hari, saat baru pulang sekolah, ia ditanya orang tuanya: "Kamu diajar apa tadi di sekolah?"

Kemudian ia jawab, "Ini pak, diajari baca *po, lo, wo, go, ro, no, go, sos, ro, to,*

mo, ho, ...". Masa itu yang diajarkan bukan a,b,c,d, tapi *po, lo, wo*, dan seterusnya.

Orang tuanya pun bertanya lagi, "Kamu sudah bisa baca dan nulis?"

"Bisa, Pak," jawabnya.

Sejenak Sang Ayah menatap. Lalu ayahnya menganjurkan: "Nanti malam, kamu mengajar ya...!"

"Mengajar siapa, Pak?"

"Itu, orang-orang tua yang buta huruf."

Tanpa pikir panjang, Panji kecil pun mengiyakan, menurut. Dia pun lantas mengajar sebagai upaya pemberantasan buta huruf orang-orang yang sudah sepuh. Ia merasa bangga dan senang. Apa yang dipelajarinya di sekolah pada pagi hari, itu yang diajarkannya pada malam hari. Pagi hari ditanya Pak Guru, disuruh menulis, dia bisa. Malam harinya, dia mengajar beberapa orang buta huruf, sekaligus mengulang pelajaran yang diterima di sekolah pada pagi harinya.

Orang-orang sepuh itu pun menjadi melek huruf. Hal ini menanamkan rasa bangga tersendiri baginya. Mengajar orang-orang tua sepuh itu, membangkitkan perasaan sangat bangga dan senang. Sejak itu, rasa senangnya jadi guru pun makin tumbuh.

Saat itu, suasana belajar membuat sesama murid senang berkompetisi. Siapa di antara mereka yang paling pintar, tercermin dari *ponten* (nilai) yang diberikan gurunya. Nilai itu menjadikan kebanggaan dan ditunjukkan pada orang tua mereka. Alat-alat belajar yang terdiri dari sabak (batu tulis) dan grip (pensil batu), merupakan warna lain dari suasana sekolah ketika itu. Buku tulis masih dianggap langka dan mahal.

Semua hasil pelajaran mendapat nilai dari sang guru, dengan menuliskan angka atau *ponten* di sabak tersebut dengan kapur tulis. Manakala Gumilang kecil mendapat angka 9 atau 10, maka asbak bertuliskan *ponten* kapur tulis itu pun dia tempelkan di pipinya. Angka itu tercetak di pipinya, meski dengan terbalik. Nilai yang kemudian dia tunjukkan kepada orang tuanya. "Lihat, Pak. Aku dapat nilai 9," katanya dengan bangga.

Sesaat setelah dia tamat SR, sekolah (madrasah) yang tadinya dibina oleh orang tuanya, entah kenapa diambil-alih sebuah yayasan. Bukan orang tuanya lagi yang mengurus. Pengambilalihan madrasah itu berkesan bagi diri dan keluarganya. Bersamaan dengan itu, ia pun kemudian meninggalkan Gresik, kampung kelahirannya itu. Tidak mau tinggal di sana lagi. Tekadnya, ia harus belajar jauh entah ke mana. "Biar

Lulus dari Pondok Pesantren Gontor, Panji Gumilang melanjutkan studinya ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat.

bagaimanapun saya harus belajar jauh. Jauh dari kampung,” itulah yang selalu ada di benaknya.

Tepatnya pada tahun 1961, Panji kecil membuka lembar baru dalam buku kehidupannya. Dia melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Gontor, sebuah pesantren terkemuka dan dikenal dengan pondok pesantren modern yang menghasilkan santri berkualitas. Gresik dan Gontor yang berjarak 210 km itu terasa tambah jauh karena bus waktu itu masih bus kayu yang setiap 10 km harus diengkol lagi. Sehingga jika naik bus, subuh berangkat, magrib baru tiba.

Dia amat mengagumi Gontor, sebagai sekolah yang dibanggakannya. Kurun waktu enam tahun, tentu tak sedikit untuk mencangkul ilmu, mengeruk pengetahuan. Dia banyak memetik hikmah, pelajaran dan ilmu yang kemudian sebagian ditulkannya dalam mendidik santri di Al-Zaytun yang dikembangkannya kemudian. Karena kebanggaannya dengan Pesantren Gontor tersebut, anaknya yang pertama sampai yang keempat pun disekolahkan di sana.

Hikmah paling berharga dari menuntut ilmu di Gontor, acapkali menemukan pengalaman dalam proses pembelajarannya. Motivasi dan keinginan selalu menjadi guru, membuatnya sangat tertarik mengamati cara mendidik dari berbagai guru yang mengajar. Metode dalam membimbing

atau pun cara memberi pelajaran, amat menjadi perhatiannya.

Suatu saat, dia pun mendapat didikan yang cukup keras dari seorang guru. Dia pernah dihukum, ditempeleng dan rambutnya dicukur. Lalu terbersit dalam hatinya, apakah dapat dibenarkan cara mendidik semacam ini? Kenangan itu terasa susah dibuang dan malah terus diingat sampai sekarang. Bukan karena dendam, tapi karena dia tidak setuju dengan cara mendidik seperti itu.

Pengalaman itu akhirnya begitu cepat dan kuat menanamkan hal positif dalam hatinya. “Kalau saya punya tempat pendidikan, saya akan memberi kebebasan, tidak akan aku cukur rambutnya, tidak akan aku hukum dalam bentuk kekerasan fisik, aku hanya akan beri isyarat agar dimengerti,” begitulah kata hatinya ketika itu yang akhirnya dibuktikannya kemudian sepanjang karirnya sebagai guru, terutama di Al-Zaytun.

Selesai dari Gontor, pada 1966, ia berangkat ke Jakarta. Ketika itu suasananya masih belum tenang, setelah peristiwa Gerakan 30 September/PKI. Karena itu, orang tuanya, awalnya tidak mengijinkan, karena konon kata orangtuanya, Jakarta adalah tempat kekerasan.

Tanggal 30 September 1965 memang telah mengubah wajah negeri ini. Situasi politik saat itu memanas. Pasca peristiwa itu, tahun 1966 mahasiswa berhamburan ke jalan. Jakarta menjadi seperti bara api. Saat itu, Panji Gumilang menyatakan niatnya untuk pergi ke Jakarta, maka kepergiannya tidak direstui orang tuanya.

“Semua bisa terjadi di Jakarta, sementara kamu belum punya kawan dan kami juga tidak punya kawan di sana,” kata orang tuanya.

Bukanlah Panji, jika dia langsung surut. Semangatnya terus menggebu. Dia meyakinkan orang tuanya, untuk tidak merasa khawatir, “Saya ingin membuat kawan bertambah di sana, doakan saja.” Akhirnya, orang tuanya merestui, walau dengan berat hati.

Dia pun menjejakkan kaki di ibukota negeri ini. Di Jakarta, dia kemudian masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Saat itu jalan menuju Pasar Jumat hingga ke Ciputat, tempat institut itu berada, belum semulus seperti saat ini, jalan belum aspal, masih tanah merah. Kendaraan dari Kebayoran Lama ke Ciputat juga hanya ada sampai pukul empat sore.

Panji datang ke Jakarta bukan untuk bersenang-senang. Apa pun



Syaykh Panji Gumilang sedang bercengkrama dengan cucu-cucunya.



Syaykh Panji Gumilang menghadiri acara wisuda para santrinya.

rintangannya untuk menuntut ilmu tak pernah menjadi hal yang membuat hatinya kecut. Ada tekad dan cita-cita yang membentang dalam dirinya dan diyakini, kelak bisa menjelarakannya dalam sebuah kenyataan. Sesuai dengan janjinya, di Jakarta dia terus membina persahabatan dan senantiasa akrab dengan masyarakat lingkungannya.

Di sini dia mengasah diri, mengasah kecerdasan intelektualnya, mengasah kecerdasan relijiusnya, dan mengasah kecerdasan emosionalnya. Bahkan secara khusus, di institut inilah dia mengasah cita-citanya sebagai pendidik.

Di sini dia mematangkan diri sebagai pendidik. Mendidik telah menjadi bagian dari hidupnya. Dalam membangun kehidupan manusia, baginya pendidikanlah yang terutama dan harus diutamakan. Maka hampir tidak ada waktunya yang terlewat selain dari belajar, mendidik dan mendidik. "Hingga hari ini saya adalah seorang guru," katanya bangga. Sampai akhir hayat dia akan terus mendidik.

Bayangkan, ketika kuliah di IAIN itu, dia membuat sekolah di Rempoa. Waktu itu dinamakan Darussalam. Bukan hanya itu, dia pun mengajar di madrasah dan sekolah lain yang berdekatan dengan madrasah yang didirikannya itu. Malamnya mengajar, paginya sekolah.

Selama di IAIN, dia pun mulai sering berkumpul dengan kawan-kawan dan mulai merencanakan mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bisa mewakili kemajuan Indonesia. Keinginan itu semakin kuat tapi tak pernah kunjung terwujud. Namun walaupun begitu, dia terus berpikir, bergerak dan berkarya.

Dalam upayanya itu, dia pernah membuat gambar dan lain sebagainya, perihal gagasan dan rencana mendirikan

lembaga pendidikan terpadu itu.

Gambar itu kemudian ditawarkan pada kawan-kawannya. Namun kawan-kawannya tidak begitu percaya, bahkan menganggap idenya itu suatu ide yang tidak masuk akal. "Ah...kamu ini gila, bagaimana kita bisa membuat seperti ini," begitulah kadang sambutan kawannya ketika itu.

Namun ia tetap yakin, "Oh...bisa kalau kita buat, kalau nggak kita buat, memang nggak bisa," katanya menjawab temannya. "Kapan?" tanya kawannya lagi. "Jangan tanya kapan, tapi mau apa tidak?" jawabnya lagi pada kawannya.

Akhirnya, kesabaran dan upayanya meyakinkan kawan-kawan itu berhasil juga. Mereka pun banyak yang menerima ide, visi dan misi mendirikan lembaga pendidikan yang *'pesantren spirit but modern system'* dan bermotto pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian.

Kemudian dia bersama sahabat-sahabatnya mulai mencari lokasi ke seluruh Indonesia, sampai ke Lampung dan Kalimantan. Walaupun menemukan tempat yang luas namun susah untuk dibangun. Maka ketika dia menemukan lokasi di Mekarjaya, Indramayu, menurutnya sama seperti menerka kelahiran sendiri, tidak tahu akan lahir kapan dan di mana.

Al-Zaytun, International Setting

Kampus Al-Zaytun yang dimulai pada tanggal 13 Agustus 1996 merupakan usaha unggulan Yayasan Pesantren Indonesia. Lembaga pendidikan yang diresmikan oleh Presiden BJ Habibie 27 Agustus 1999 ini mempunyai landasan semangat pesantren yaitu kemandirian atau *entrepreneurship* namun dipadukan sistem modern. *Pesantren spirit but modern system*.

Prinsip dan spiritnya adalah mendidik

dan membangun secara mandiri semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sementara, nilai-nilai modern dimaksud adalah yang berazas kepada ciri-ciri modern itu yakni: pertama, bergerak berdasar ilmu; kedua, *program oriented*; ketiga, kenal prosedur; keempat, mempunyai organisasi yang tegas dan kuat; kelima, mempunyai etos kerja yang tinggi dan mempunyai disiplin yang ketat dan tegas.

Tujuannya membuat lembaga pendidikan ini, tidak lain ingin mencerdaskan bangsa, supaya bangsa ini dan semuaarganya menjadi cerdas, menjadi bangsa yang bajik dan bijak. Bajik dan bijak dalam arti bangsa yang suka terhadap kebenaran, juga bangsa yang mampu menghormati orang lain, bangsa yang sanggup secara mendalam menghormati apa yang dinamakan kemanusiaan.

Al-Zaytun juga diharapkan bisa menghasilkan putra-putri bangsa yang sanggup menguasai *science & technology* dengan segala perkembangannya. Dan yang paling inti yakni sebagai warga bangsa, putra-putri bangsa itu mampu hidup di dalam negara ini dengan penuh tanggung jawab dan mampu menciptakan kestabilan dan keselamatan negara. Juga sanggup hidup dalam tatanan antarbangsa yang hidup dalam peradaban yang sempurna. "Nah, itu cita-citanya. Jadi tidak terlalu jauh. Kalau dalam bahasa Alquran-nya disebut dengan *basthotan fil ilmi wal jismi*," katanya.

Dengan demikian, Al-Zaytun diharapkan akan mempersiapkan manusia yang menjadi dirinya sendiri di masanya nanti dengan persiapan cerdas berpikir menyangkut pada intelektual, emosional dan spiritual. Generasi yang punya bajik dan bijak yaitu bisa memosisikan dirinya pada kondisi apapun, menguasai sains teknologi, cinta negara yang bertanggung jawab dan mampu hidup setara dengan bangsa-bangsa lain dalam zona demokrasi, toleransi dan damai.

Itulah yang hendak dibekalkan pada setiap santri sehingga santri itu nanti akan berinovasi pada zamannya. "Jadi tidak perlu terlalu diurai, karena itu terlalu retorik. Jadi intinya punya *self-esteem* yang tinggi," katanya menambahkan. Hal itu menurutnya, juga merupakan cita-cita seluruh bangsa di dunia.

Dengan demikian nantinya semua bangsa akan bertemu. Itulah yang dinamakan *International Setting*. Itu terjadi karena cita-cita seperti itu merupakan cita-cita pendidikan internasional. Nanti cara berpikir menjadi, *International Thinking*, dan



Syaykh Panji Gumilang membagikan kebijaksanaan alam kepada penulis.

Menurutnya, sebagai satu bangsa Indonesia, kejayaan kita justru ada di kebhinekaan.

cara solidaritas menjadi, *International Solidarity*. Tatanan hidup, *setting*-nya menjadi *International Setting*. Itulah menurutnya yang dinamakan dengan hidup global atau globalisasi, yakni kekuatan nasional namun mampu mengakses kehidupan antarbangsa.

Menurutnya, cita-cita seperti itu bukan dia rangkum sendiri, tetapi bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Sebelum mereka mendirikan pesantren modern ini, dia lebih dulu masuk ke dalam berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia maupun di luar, berkelana untuk melihat, studi banding dan sebagainya.

Dalam proses pendidikannya, Al-Zaytun sengaja mengekspos sebuah laboratorium alam untuk ditanamkan ke benak anak-anak didiknya. Ini dilakukan agar nanti para santri berinovasi. Misalnya, bila diekspos perahu, maka akan timbul dalam pikiran mereka, dulu kami buat sendiri itu yang namanya perahu, kenapa sekarang harus beli? Akhirnya mereka akan buat sendiri sebab ilmu ada, pengalamannya juga ada. Hal tersebut terbersit dalam pikiran Syaykh karena mengenang masa kecilnya yang pernah diekspos oleh orang tuanya menjadi guru pemberantasan buta huruf sehingga membuatnya berinovasi sepanjang hidup.

Sedangkan globalisasi 2020 yang menjadi sangat hangat diperbincangkan belakangan ini, bagi Al-Zaytun hanyalah suatu fase langkah, artinya, tahun 2020 itu dipersiapkan sedemikian rupa menuju tahun-tahun berikutnya, karena tahun, bukan hanya 2020 saja. Jadi 2020, menurutnya, hanyalah satu langkah menuju langkah berikutnya, *step by step*.

Begitu banyak orang yang kagum akan keberhasilan yang dicapai Al-Zaytun,

namun Syaykh yang merupakan perencana awal pendirian kampus ini rupanya memegang filosofi ilmu padi, 'semakin berisi semakin menunduk'. Dengan merendah diakuinya, bahwa sampai sekarang, dia belum merasa sukses.

Sebab sukses itu, menurutnya, masih ada di depan sedangkan yang diperoleh kini hanyalah untuk yang kemarin dan hari ini. Apa yang dilakukan sekarang masih merupakan langkah awal dalam meraih sukses itu. Jadi pendidikan, menurutnya, haruslah punya jiwa inovatif. Tidak boleh mengatakan cukup, tidak boleh mengatakan sudah sukses.

Menanggapi pernyataan betapa spektakulernya pembangunan yang dilakukan Al-Zaytun, dia hanya mengatakan, "Kalau sudah ditarik rodanya, kereta itu akan berjalan dengan sendirinya." Diibaratkannya, kalau ban mobil itu sudah berjalan, justru harus pandai menyetirnya. Jadi sudah tidak ada yang berat lagi. Maka dalam menyetir Al-Zaytun ini, dia mengaku bahwa itu dilakukan bersama dengan sahabat-sahabatnya. "Sekali waktu kita berhenti di pokok-pokok yang rindang, sekali waktu kita berhenti di padang yang terang," ucapnya.

Sedangkan mengenai tantangan yang dihadapi selama ini, dia hanya mengatakan bahwa hidup tanpa tantangan, tidak akan menemukan manisnya hidup. Menurutnya, tantangan hidup adalah ciri bahwa kita diberi kesempatan untuk mengatasinya.

Memang, sesuatu yang tidak dimengerti jika masih ada yang merasa curiga dengan kehadiran Al-Zaytun, sebab menurut apa yang dilihat dan dialami dan diterima oleh penulis sendiri apa yang dicurigai oleh sebagian orang itu sangat jauh dari kenyataan yang ada.

Bahkan dalam suatu pembicaraan, ketika kami mengatakan bahwa kami berbeda aliran dengan Syaykh sendiri, dia malah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, "Selaku ciptaan Tuhan kita ini semua sama, paling tidak sama-sama satu bangsa Indonesia." Menurutnya, sebagai satu bangsa Indonesia, berarti sudah punya keyakinan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan kejayaan kita ini justru ada di kebhinekaan tersebut. Ini yang harus kita syukuri.

Satu kiat dari Syaykh dalam mengatasi berbagai tantangan itu adalah dengan terus bergerak, bergerak maju, membangun, menata, mendidik. Tantangan itu menurutnya harus diatasi dengan cara demikian. Dan harus ditampilkan dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan begitu tantangan itu justru akan memberikan satu nilai.

Termasuk berbagai pemberitaan dan

buku yang menyudutkannya. “Bukan tidak dihiraukan. Sebanyak buku yang ada, itu kita baca semua, dan kita katakan, oh...ini di sini nih yang harus kita lalui, oh... ini di sini yang harus kita singkirkan, oh...di sini yang harus kita laju ke depan. Itu kita jadikan tantangan, dan kita siap mengatasinya,” katanya terbuka.

“Kalau reaksi kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu tidak punya makna apa-apa, dan akan mendapatkan warisan dari buku ke buku. Kita menginginkan reaksi itu dalam bentuk karya nyata, sehingga bangsa ini nanti menikmati karya bangsanya yang nyata itu. Kemudian mengenai masalah adanya orang mengatakan di sini sesat dan sebagainya atau yang berbentuk macam-macam tadi, sejarah nanti yang akan membuktikan. Kalau kita yang menulis sejarah, kita bisa melihat dan merasakan. Kalau sejarah yang menulis dirinya sendiri, kehancuranlah yang terjadi,” katanya menjelaskan.

Jadi menurutnya, jika sejarah itu ditulis sendiri dengan karya nyata, maka sudah pasti akan menulisnya dengan sebaik-baiknya. “Ini namanya karya sastra. Sebab sastra itu macam-macam, bukan cuma tulis saja. Sastra itu termasuk seni dalam mengelola apa pun. Kebetulan saya mendalami sastra karena sekolah di sastra dulu,” ujarnya.

Yang lebih jauh lagi, ada orang yang sempat menduga bahwa Al-Zaytun didirikan dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia. Menanggapi dugaan-dugaan seperti itu Syaykh hanya mengatakan bahwa orang menduga boleh saja. Bahkan dia mengatakan bahwa diduga sesat pun dia takkan pernah membantahnya. Menduga mau mendirikan Negara Islam Indonesia pun dia tidak pernah menghiraukannya.

Tapi menurutnya, di dunia ini tidak boleh duga-duga, tapi harus berpikir modern. Setiap bergerak harus berdasar ilmu. “Sekarang, antara ilmu dan duga tadi, ketemu apa tidak? Jika itu ketemu maka ‘ilmu’ yang salah dan ‘duga’ yang betul. Tapi di dunia ini, duga itu tidak akan bisa mengalahkan ilmu,” ucapnya.

Ketenangan Syaykh dalam menghadapi segala tantangan tersebut sungguh menunjukkan kedewasaannya sebagai pemimpin. Namun, walaupun begitu, dia tetap merasa tidak berbeda dengan yang lainnya. Dia tidak merasa lebih unggul. Dia merasakan dan menjalani hidup ini dengan bijaksana. Apa yang diperintahkan konsep kehidupan, dilakukan. Apa yang dilarang oleh konsep kemanusiaan, di jauhi. Selamat. Itu saja caranya menjalani hidup. Dan keyakinannya, Tuhan pun akan suka.

Jika ada pertanyaan mengenai dari mana dana pembangunan Al-Zaytun, dia menganggap pertanyaan itu wajar saja. Tapi hendaknya jangan mengukur orang lain dengan ukuran diri sendiri. Sebab jika seseorang mengukur ukuran orang lain dengan dirinya, kadang tidak pas. Jadi kalau mengukur dengan parameter umum, maka hasil yang telah dicapai Al-Zaytun, menurutnya, masih wajar-wajar saja.

Mengenai dana, menurut Syaykh, merupakan hal yang gampang sebab setiap melompat (penemuan/ pengembangan satu ilmu) selalu ada harganya. Jadi jika ada suatu lompatan, orang akan memberi apresiasi, hasilnya dibagi. “Jadi dana itu nggak susah, yang susah itu kalau kita tidak pernah berpikir mendani ini,” katanya.

Dan yang lebih membanggakan, Departemen Agama dalam waktu singkat telah mengakui bahwa Al-zaytun merupakan tempat pendidikan yang digolongkan terbaik. Sertifikat penghargaan itu diberikan Januari 2004 lalu. Demikian juga dalam ujian-ujian sekolah menengah pertama, Al-Zaytun juga merupakan yang terbaik di Jawa Barat. Hal itu jelas merupakan suatu sejarah juga, yang bisa terjadi karena ditulis dan diukur.

Keluarga Bersahaja

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pendidik, diakuinya bahwa keluarganya sungguh sangat membantu. Sebagaimana lazimnya, seseorang yang memangku pemimpin pesantren biasanya memiliki istri lebih dari satu, namun pria setia ini tidak terpikirkan untuk menambah atau malah mengganti istri yang sangat disayangi itu. “Istri saya dari sejak pertama sampai hari ini, itu-itu juga,” begitu katanya agak bercanda.

Khotimah Rahayu, juga sering dipanggil dengan Faridah Al Widad, istri yang memberinya tujuh orang anak itu, juga seorang guru. Istrinya pada awalnya adalah seorang guru PNS. Lain dengan dirinya, ia tidak mau menjadi pegawai negeri.

Dengan sangat senang dia pada pagi harinya mengajar, sore dagang, bertani, memborong tanaman entah padi dan sebagainya atau memborong kayu-kayuan yang ditanam orang, diambil terus dibelah. Atau dagang hewan seperti kerbau dan lembu. Itulah dulu pekerjaannya sehari-hari.

Khotimah yang berasal dari Banten, Kampung Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, keresidenan Banten (sekarang menjadi provinsi Banten), menjadi guru bukanlah secara kebetulan atau takdirnya yang sudah begitu, namun sebagai anak dari seorang

guru (orang tua dari Ibu Khotimah Rahayu), dalam dirinya sudah tumbuh satu kecintaan pada profesi pendidik.

Kehidupan bersahaja selalu ditunjukkan keluarga guru ini. Meski sudah begitu banyak dan begitu besar gedung yang telah dibangun di lokasi Al-Zaytun, hingga saat ini, keluarga ini selama 24 jam masih tinggal di salah satu ruangan (kamar) asrama bergabung dengan para santri.

Mencari ilmu, bagi keluarga ini tidak memandang bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dari usahanya memberangkatkan anak-anaknya ke berbagai negara. Dua anaknya sedang belajar di New Zealand, satu di London, satu S2 di UNJ, satu di Australia. Sedangkan yang terakhir masih sekolah di Al-Zaytun.

Dalam hal mendidik, ayah dari Imam Prawoto, Ahmad Prawiro Utomo (sering dipanggil dengan Ahmad Zaim), Ikhwan Triatmo (sering dipanggil dengan Abdul Hamid), Khoirun Nisa (perempuan), Muhammad Hakim Prasajo, Sofiah al Widad (perempuan), Karim Abdul Jabbar (alm), ini selalu berusaha menunjukkan kasih sayang seorang ayah. Dia tidak mau berlaku otoriter apalagi menghukum dengan cara mendera fisik. Maka di Al-Zaytun pun dia memberlakukan santrinya dengan bebas, sebebas-bebasnya, namun berdisiplin setinggi-tingginya.

Disiplin yang dimaksud Syaykh, yang sangat memperhatikan kesehatan antara lain seperti aturan tidak bisa merokok dan anti narkoba. Sejak awal di sini telah diambil langkah-langkah pencegahan masuknya narkoba dengan melakukan tes, baik ketika masuk maupun saat keluar pesantren.

Demikian juga halnya dengan para karyawan. Syarat menjadi karyawan adalah apabila sanggup tidak merokok. “Dulu, kami di sekolah itu bebas merokok dan akibatnya kita rasakan sekarang. Jika dulu dari sekolah tidak merokok, mungkin sehat badan ini. Untung cepat kita sadari bahwa merokok itu cuma menyusahkan jantung dan paru-paru. Pengalaman itu kita tularkan ke anak-anak kita. Ternyata dunia tanpa rokok itu nikmat. Paling tidak bebas bernafas,” katanya.

Dalam perjalanannya yang masih panjang membangun Al-Zaytun, Syaykh sangat bersyukur rahmat Tuhan yang diterimanya. Ia makan dengan menu yang teratur dan sehat serta rutin melakukan olahraga murah, naik sepeda sekeliling kampus Al-Zaytun. Pola makan dan gaya hidupnya ini bisa menurunkan berat badannya dalam jumlah yang sangat signifikan dari 104 kg menjadi 85 kg. ■

Brankas yang Dipertanyakan

KPK dan BPK harus melakukan penyelidikan dan audit investigasi terhadap raibnya sejumlah uang pengganti dalam perkara korupsi yang seharusnya disimpan Kejaksaan.

Masalah uang pengganti di Kejaksaan Agung membuat Jaksa Agung Hendarman Supandji sedikit gerah. Pasalnya, di akhir masa jabatannya sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) selama dua tahun, dia mengklaim KPK telah berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp 3,95 triliun.

Faktanya, dalam sebuah diskusi di Jakarta, anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mempertanyakan klaim itu, karena hasil pengecekannya dalam laporan Menteri Keuangan tidak ada pengembalian uang sejumlah tersebut dari Timtas Tipikor.

Hendarman lantas mengklarifikasi, Timtas Tipikor baru menyeter Rp 18 miliar ke kas negara. Pertanyaan pun muncul, di mana sisanya?

Awal Agustus lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengungkapkan adanya uang pengganti yang terkumpul selama 17 tahun di rekening Kejaksaan Agung. Jumlahnya Rp 6,9 triliun. Dana yang tersimpan dalam sejumlah rekening itu pada 2006 disetorkan ke Kas Negara senilai Rp 3 triliun. Tahun 2008, BPK akan melakukan audit investigasi khusus itu



Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, dengan tegas membantah ketidakjelasan uang pengganti di institusinya.

agar lebih jelas.

Majalah *Trust* edisi 20-26 Agustus 2007, mengutip bantahan pihak Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dengan tegas membantah ketidakjelasan uang pengganti di institusinya. Seandainya ada uang di Kejaksaan, itu adalah uang rampasan. Itupun dengan catatan jika belum dilakukan eksekusi. Kalau sudah dieksekusi, Kejaksaan akan menyerahkannya juga ke Kantor Kas Negara.

Meski demikian, Kemas mengakui bisa saja muncul masalah dalam pengelolaan uang yang terkait dengan perkara. Rupanya, menurut Kemas, ada beberapa pihak di jajaran Kejaksaan yang menyimpan uang tersebut di rekening. Karena dalam rekening uang itu akan berbunga. Saat ini hal itu tengah diperiksa oleh bagian pengawasan Kejaksaan.

Apa yang menjadi dugaan Kemas agak berbeda dengan penjelasan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin. Menurutnya, Kejaksaan tidak menyimpan uang pengganti korupsi dalam suatu rekening di bank yang

dibungakan. Adanya jumlah yang belum dikembalikan ke kas negara lantaran masih banyak uang pengganti yang belum tertagih. "Kejaksaan menyimpan dan membungakan uang pengganti, itu tidak benar," ujar Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin, seperti dikutip *Republika* (26/8).

Soal uang pengganti korupsi yang belum tertagih, Muchtar menjelaskan, jumlahnya sangat signifikan. Muchtar mencontohkan, ada terpidana korupsi yang tidak mampu membayar seperti Dicky Iskandar Dinata (kasus Bank Duta — *Red*), jumlahnya mencapai Rp 811 miliar. Selain tidak mampu membayar, ada koruptor yang melarikan diri dan belum membayar uang pengganti seperti Sudjiono Timan dan Bambang Sutrisno.

Harus Dijelaskan

Muchtar mengatakan Kejaksaan mempunyai sistem untuk mengelola keuangan negara. Sistem itu adalah sistem pengelolaan keuangan perkara seperti barang sitaan, uang pengganti, hingga uang pengganti korupsi. Menurut Muchtar, setiap bendahara Kejaksaan

hanya boleh menyimpan uang hasil perkara tidak lebih dari 1x 24 jam. Jika ada jaksa yang memiliki rekening pribadi dan difungsikan untuk menyimpan uang pengganti, Muchtar menjamin, pihaknya akan memberikan sanksi pemecatan hingga diajukan ke pengadilan.

Sinar Harapan (25/8), melaporkan bahwa menurut Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan, pihak Kejaksaan belum bisa menunjukkan di mana rekening-rekening uang pengganti dan uang sitaan dari kasus korupsi disimpan.

"Hasil terakhir pertemuan Tim dengan jajaran Kejaksaan memang belum mendapatkan informasi pasti. Ternyata, tim dari Kejaksaan belum bisa menjelaskan ke rekening mana uang pengganti itu dan uang sitaan disimpan," papar Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo kepada harian tersebut.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Didi Widayadi, mengharapkan Kejaksaan lebih proaktif dan lebih transparan tentang jumlah dana pengganti dan ganti rugi sejumlah kasus korupsi. "BPKP sebagai auditor Presiden bisa dimintai bantuan untuk melakukan audit terhadap dana pengganti dan ganti rugi di Kejaksaan Agung," kata Didi seperti dikutip *Republika* (26/8). Dia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan tentang dana pengganti, ganti rugi, atau dana titipan lainnya.

Media Indonesia (14/8), dalam editorialnya menyarankan Kejaksaan Agung lebih terbuka soal uang sitaan dan barang jaminan. Dengan demikian, publik semakin percaya bahwa Kejaksaan Agung tidak saja berburu di luar, tetapi juga di dalam kandang sendiri.

Ini momentum bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji membuktikan bahwa di era kepemimpinannya sekarang ini, Kejaksaan Agung lebih serius membersihkan sapu sebelum dipakai untuk menyapu lantai yang kotor. ■ RH



foto: berindo wilson

Aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR harus segera diperiksa

Dua Aksi Pemberantas Korupsi

Sebuah bank sentral mestinya bersih dan memberikan teladan bagi bank-bank lain. Kenyataannya, Bank Indonesia kini mendapat tuduhan serius dari KPK. Para pemberantas korupsi ini menduga ada aliran dana dari BI ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Koran Tempo (27/8), memberitakan dokumen hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan BI Tahun Buku 2004, yang salinannya diperoleh *Tempo*, menunjukkan adanya aliran dana sejumlah Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota DPR tahun 2003.

Dana ini dikucurkan untuk menjaga kepentingan BI da-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dua dugaan suap. Perlu dorongan untuk ditindaklanjuti.

lam pembahasan amandemen Undang-Undang BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas BI. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan dana senilai Rp 68,5 miliar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum mantan pejabat BI.

Ketua BPK Anwar Nasution kepada *Tempo*, mengatakan bahwa dokumen itu bagian dari suratnya kepada penegak hukum setahun yang lalu. Dia heran kenapa baru mencuat sekarang.

Ketua Badan Kehormatan DPR Gayuus Lumbun berjanji akan memeriksa anggota DPR yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Sementara itu, *Republika*, (29/8), memberitakan temuan KPK yang lain, yakni dugaan suap terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri. Di antaranya yang paling marak adalah dugaan suap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) kepada petugas.

Kajian KPK banyak menemukan praktik percaloan dalam perekrutan calon TKI.

Pengawasan terhadap lembaga penempatan TKI juga kurang memadai. Terhadap TKI yang baru pulang ke Tanah Air, sering dipaksa menukar valasnya dengan kurs yang lebih rendah dari pasaran. Selain itu, tarif angkutan darat yang disediakan di Terminal Tiga jauh lebih mahal dari tarif umum, dan tidak ada kejelasan waktu tunggu dalam proses kepulangan TKI.

Hasil kajian tersebut diserahkan oleh Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumbuh Hidayat, di gedung KPK, (28/8). ■ RH

Karena Harus Sarjana

Uji materi UU KPK diajukan oleh Ketua Badan Penyelamat Kekayaan Negara (BPKN), Ravavi Wilson. Dia merasa Pasal 29 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur syarat minimal S1 untuk menjadi calon pimpinan KPK telah merugikan hak konstitusionalnya.

Ravavi menilai peraturan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia karena orang yang merasa mampu memberantas korupsi tidak dapat maju sebagai pimpinan KPK karena tidak berpendidikan S1. Menurut pemohon, begitu banyak pemimpin yang memiliki titel sarjana tetapi kemampuannya tidak dapat diandalkan

untuk memajukan negeri dan bangsa ini.

Tak hanya itu, Ravavi Wilson juga mengusulkan agar Presiden menjadi Ketua KPK sehingga pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

"Kami mengusulkan Presiden sekaligus menjadi Ketua KPK," kata Ravavi dalam sidang pemeriksaan permohonan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (22/8).

Menurut Ravavi, Presiden adalah figur yang memiliki otoritas luas dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Dia menilai pemberantasan korupsi selama ini belum maksimal karena para penegak hukum belum

memiliki wewenang yang luas.

"Saya yakin ini bisa memberikan nuansa baru apabila Presiden mengambil tanggung jawab," katanya.

Seperti dilaporkan *Suara Karya* dan *Media Indonesia* (23/8), menanggapi usulan itu, hakim konstitusi I Dewa Palguna mengatakan pemilihan Presiden sebagai ketua KPK berimplikasi pada perubahan UUD 1945. Padahal, uji materi ketentuan syarat minimal sarjana untuk menjadi pimpinan KPK tidak ada hubungannya dengan Presiden. Namun demikian, usul tersebut akan dilaporkan pada pleno hakim konstitusi. ■ RH

Mardiyanto

Mendagri Definitif

Penantian lama siapa yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) definitif yang baru, menggantikan Moh. Ma'ruf yang lama terbaring sakit karena *stroke* akhirnya terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih kesengsem kepada Mayor Jenderal TNI (Purn) Mardiyanto, yang saat diangkat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Terlihat sekali Presiden sangat hati-hati memilih. Presiden pun beralasan, penggantian dilakukan agar keluarga bisa berkonsentrasi melakukan pengobatan dan terapi kepada Ma'ruf yang mengalami sakit, serta untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan. Ma'ruf adalah Ketua Tim Nasional Kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat Pilpres 2004 lalu.

Pertimbangan mengapa pilihan akhirnya jatuh kepada Mardiyanto justru disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla, saat menggelar pertemuan

dengan para pimpinan redaksi media massa di kediaman Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat. Kalla menilai Mardiyanto cakap dan memiliki pengalaman dalam pemerintahan, dan merupakan orang yang dapat diterima oleh pemda di seluruh daerah di Indonesia. Mendagri, sebut Kalla, sangat memerlukan orang yang berpengalaman. Pengalaman adalah faktor penting karena tugas yang menanti bagi Mendagri yang baru.

Presiden mengumumkan nama Mardiyanto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (29/8) pukul 18.15 WIB dan melantiknya esok harinya pukul 14.00 WIB. Ketika itu Mardiyanto tampak berwibawa mengenakan setelan jas hitam berdasi merah dengan peci hitam.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan agar revisi UU politik, pengaturan calon perseorangan, dan pemekaran daerah menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan. Tentu, saya akan memerhatikan hal-

hal itu, selain persoalan lainnya," kata Mardiyanto kepada pers setelah namanya diumumkan sebagai Mendagri.

Mardiyanto lahir di Surakarta pada 21 November 1946, memiliki istri Hj Effi Murbayati dan dikaruniai dua orang anak, Indra Gunawan dan Bayu Wudiatmoko. Mardiyanto menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode tahun 1998-2003, dan terpilih lagi untuk periode kedua tahun 2003-2008 diusung oleh PDI Perjuangan.

Walau disokong partai beralambang banteng gemuk dalam lingkaran, pada hari Senin (27/8) dalam sebuah pernyataan tertulis Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa Mardiyanto bukan kader partainya. Mardiyanto hanya didukung PDI Perjuangan dalam pencalonan dirinya menjadi Gubernur. Karena itu terserah Mardiyanto, mau atau tidak bila dipilih menjadi Mendagri.

Menanggapinya, Mardiyanto terlihat bersikap profesional dan tak mau berkutat pada



persoalan demikian Sebab ia hanya mengemban amanat untuk bertugas demi bangsa dan negara.

"Saya tidak menutup mata bahwa rekomendasi Bu Mega riil. PDIP Jateng waktu itu juga mengajukan Par Mardiyanto (calon Gubernur Jateng). Ini yang tidak pernah terbuka. Tetapi saya sangat hormat pada elemen partai yang ada di tempat kami. Sehingga saya memberikan suatu perlakuan yang selaras dan serasi dengan masing-masing," kata Mardiyanto, menanggapi dirinya disebut-sebut tidak berkomunikasi kepada PDI Perjuangan maupun Ketua Umumnya Megawati perihal pengangkatan dirinya sebagai Mendagri. ■ HT

Effendi Gozali

Raih Tasrif Award

Fenomena parodi politik komunikasi *Republik Benar-Benar Mabuk* (BBM) dan *Newsdotcom Kantor Republik Mimpi* yang ditayangkan di stasiun TV swasta, telah melambungkan nama Effendi Gozali kian berkibar. Tayangan tersebut menurut pria kelahiran Padang 5 Desember 1966, ini terinspirasi tulisan Jeffrey Baym dari North Carolina University tahun 2005.

Republik BBM mulai ditayangkan 12 Desember 2005 sampai 5 Juni 2006 dalam 26 episode. *Republik BBM* lalu berganti format menjadi drama komedi *Istana BBM*, bertahan tujuh episode, berubah lagi menjadi *Pengadilan BBM*. Di acara yang ditayangkan stasiun Indosiar ini Effendi Gozali yang akrab dipanggil

Effendi hanya tampil sampai 24 episode. Selanjutnya tidak aktif lagi.

Akan halnya dengan *Newsdotcom Kantor Berita Republik Mimpi*, Effendi berperan sebagai "Penasehat Presiden" *Republik Mimpi*. Hingga sekarang program parodi politik ini masih eksis, memasuki tahun ke dua sejak didirikan tanggal 14 Agustus tahun 2006 lalu. Acara ini berlatar *complete-parody* yang berdasarkan pada pemutakhiran berita dan figur riil dalam kasus-kasus yang terjadi di sekitar masyarakat dengan penyajian menarik, mudah dicerna, bahasanya yang ringan, dan bersifat menghibur.

Pada acara yang ditayangkan Metro TV ini Effendi menampilkan figur tokoh-tokoh, antara lain;

Presiden Republik Mimpi dimainkan Si Butet Yogyakarta (SBY), Wapres Republik Mimpi dilakoni Jarwo Kwat (JK), Guru Bangsa, Gus Dur yang diplesetkan menjadi Gus Pur, Mantan Presiden Republik Mimpi, Megakarti, Ahli Hukum Tata Negara Republik Mimpi, Harun Al-Jaim dan sebagainya.

Sebagai inspirator *Newsdotcom Kantor Berita Republik Mimpi*, Effendi tak menyangka acara *stand up comedy* yang mengusung berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini, seperti masalah TKI, masalah pendidikan, musibah banjir, kebakaran, tanah longsor, kenaikan bahan pokok, kebijakan pemerintah, politik dan sebagainya kian mendapat respon dari masyarakat.



Akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2007 *Newsdotcom Kantor Berita Republik Mimpi* mendapat penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Penghargaan diberikan atas sumbangsih Effendi membantu dunia pers demi terpenuhinya hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. ■ ZAH

Akbar Tandjung Lulus *Cum Laude*

Pengaruh Akbar Tandjung dalam jagat perpolitikan nasional rupanya masih sangat besar. Sehari sebelum maju ke persidangan ujian terbuka promosi gelar doktor bidang ilmu politik di Kampus Bulaksumur, UGM Yogyakarta, pada hari Jumatnya (31/8) ratusan orang tokoh-tokoh penting sudah berkumpul di kota gudeg Yogyakarta memenuhi undangan Akbar. Media massa meliput hajatan akademik namun kental aroma politik ini secara luas.

Lalu tibalah waktunya bagi Akbar diuji untuk memperoleh doktor, dan lulus dengan predikat kelulusan *cum laude* pada hari Sabtu (1/9). Unik-nya, studi kasus penelitian yang diambil adalah Partai Golkar dimasa kepemimpinan Akbar tahun 1999-2004 yang sarat pergolakan. Pada masa itu Orde Baru yang disokong

penuh Golkar baru saja tumbang. Dengan manuver briliannya Akbar berhasil mengendalikan partai dan memperkenalkan jargon Golkar baru, hingga memberinya ruang dalam gerbong reformasi. Bahkan setelah meraih suara terbesar kedua pada pemilu 1999, pada pemilu 2004 Golkar kembali ke puncak sebagai peraih suara terbesar. Pada kedua peristiwa ini Akbar adalah ketua umum partai.

Disertasi Akbar berjudul "Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons," berhasil dipertahankan di hadapan sembilan orang dewan penguji. Ketika menjawab pertanyaan penguji sesekali Akbar melontarkan kritikan pedas terhadap kepemimpinan Golkar saat ini. Seperti, menyebut kepemimpinan Jusuf Kalla hanya berorientasi pada ke-

kuasaan jangka pendek tanpa memperhatikan tiga hal penting dalam memimpin partai. Yakni, memperkuat kelembagaan partai, intensitas konsolidasi partai, dan rekrutmen untuk mencari kader-kader terbaik.

"Itulah bedanya kepemimpinan partai di bawah saudagar dengan kepemimpinan partai oleh politisi pejuang yang tentunya mempunyai cita-cita untuk membesarkan partai," ucap suami Krisnina Maharani ini. Kata Akbar, saudagar yang memimpin partai juga cenderung berpikir singkat dan menganggap implikasi dari langkah yang diambil belakangan.

Kepemimpinan Partai Golkar saat ini dalam pandangan Akbar tidak memiliki pola dan perencanaan yang sistematis dalam menghadapi agenda politik ke depan khususnya Pemilu 2009. Juga tak terlihat



sikap responsif terhadap aspirasi rakyat sehingga nyatanya bertentangan dengan jargon yang pernah ditawarkan, "bertindak cepat untuk rakyat".

Akbar menegaskan tak akan lagi berniat menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun menyatakan kesediaan untuk memberikan nasihat politik, termasuk kepada partai-partai lain agar elemen utama demokrasi bisa menjadi faktor dari perubahan politik yang penting. ■ HT

Iskandar Alisjahbana Bapak SKSD Palapa

Sudah sejak tahun 1968 Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana (76 tahun) merintis pengembangan teknologi satelit komunikasi. Ia lalu berhasil membangun Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa, yang oleh Orde Baru dimanfaatkan sebagai tulang punggung dalam mempersatukan Nusantara, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia setelah AS dan Uni Soviet yang memanfaatkan teknologi satelit untuk telekomunikasi. Bahkan, Iskandar sampai-sampai disebut pula sebagai Bapak SKSD.

Satelit Palapa seri A-1 meluncur ke angkasa pertamakali pada 8 Juni 1976. Tetapi baru pada tahun 2007 mantan rektor ITB Bandung tersebut dihargai untuk inovasinya yang spektakuler di bidang teknologi telekomunikasi. Dan, yang memberikan adalah Kepala Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pula, Prof. Dr. Umar Anggara Jenie bersamaan dengan peringatan 40 tahun LIPI Rabu (22/8).

Ulangtahn berlangsung di tengah rencana pemerintah memangkas anggaran LIPI tahun 2008. Memang, dalam pidato kenegaraan dan pengantar nota keuangan RAPBN 2008, tak sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan kata ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptekl). Bahkan, dari sembilan orang penasehatnya, tak satupun yang berlatar belakang dan membidangi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menempatkan Iptek sebagai salah satu elemen kunci pembangunan nasional.

Penghargaan ilmiah tertinggi bernama Penghargaan Sarwono Prawirohardjo yang sudah dimulai sejak tahun 2001, diberikan kepada



Iskandar atas prestasinya di bidang inovasi teknologi telekomunikasi.

Selain memprakarsai pembangunan SKSD Palapa, dan mendorong para mahasiswa ITB Bandung berinovasi secara kreatif membangun industri dan jasa telekomunikasi di Indonesia yang sedang giat membangun pada masa itu, Iskandar juga terbukti piawai memperbaiki satelit yang rusak. Satelit Palapa generasi B-2 milik Telkom

yang pernah gagal mengorbit, itu berhasil diperbaiki dan dimanfaatkan secara bisnis bersama praktisi satelit Adi Rahman Adiwoso. Keduanya sepakat mendirikan perusahaan satelit berkelas dunia, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), dengan modal awal satelit rusak.

"Ketika pertamakali Dr. Arthur Clark (ahli fisika dan penulis buku-buku sains-fiksi) mengemukakan istilah orbit geostasioner, beliauah scientist Indonesia yang pertamakali dapat menangkap dan memahami konsep itu," kata Umar Anggara tentang Iskandar.

Iskandar berpesan agar lembaga penelitian seperti LIPI, BPPT, dan perguruan tinggi supaya meninggalkan filsafat "menara gading". "Filsafat menara gading itu adalah melakukan penelitian demi penelitian saja, terpisah dari masyarakat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian itu harus bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat," ucap Iskandar. ■ HT



Melalui lokakarya ini, selain mempertebal rasa kebangsaan, para peserta juga ikut mencintai laut dan siap membela keutuhan NKRI.

Lokakarya Nasional di KRI Makassar

Tigaratus pemuda se-Indonesia mengikuti Lokakarya Nasional II 2007 di atas KRI Makassar yang berlayar di kawasan blok Ambalat. Tujuannya, menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme serta memiliki wawasan kebangsaan.

Sejumlah pemuda dari 10 organisasi kepemudaan (OKP) kota Tarakan ikut ambil bagian bersama sekitar 300 pemuda se-Indonesia dalam Lokakarya Nasional II 2007 di atas KRI Makassar.

Kegiatan yang berlangsung sejak 16 hingga 23 Agustus itu dilakukan sambil berlayar di pulau-pulau terluar dan berakhir di Markas Kolinlamil Surabaya. Lokakarya ini diselenggarakan Depdagri bekerjasama dengan TNI AL.

Adapun 10 OKP yang ikut sesuai mandat dari Ketua KNPI Kota Tarakan antara lain DDI, Wal Issyad, PPM, HPPI, PMII, Garda Bangsa, Gema MKGR, IRMA/BKPRMI dan Pemuda LDII Kota Tarakan.

Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Kota Tarakan, Paedi Markum kepada *Berita Indonesia* menjelaskan, para pemuda peserta lokakarya juga mengikuti apel upacara memperingati HUT

ke-62 Proklamasi Kemerdekaan RI di geladak KRI Makassar yang berlayar di blok Ambalat.

Melalui lokakarya ini, selain mempertebal rasa kebangsaan, para peserta juga bisa melihat secara langsung wilayah NKRI yang luas dan memiliki ribuan pulau, termasuk keberadaan pulau-pulau terluar.

Sambil berlayar, para pemuda juga diingatkan tentang keperkasaan nenek moyangnya yang pelaut. Dan sebagai negara kepulauan, para pemuasanya diharapkan ikut mencintai laut dan siap membela keutuhan NKRI.

Sebagai calon pemimpin masa depan, para pemuda ini diharapkan bisa memiliki wawasan nasional dan kebangsaan. Bukan hanya sekadar mengenang daerahnya saja.

Ketua KNPI Kota Tarakan, Ir. Suparlan, menjelaskan, Lokakarya Nasional II 2007 yang melibatkan 300 pemuda se-Indonesia, bertujuan untuk membangkitkan rasa nasio-

nalisme dan kebangsaan para pemuda peserta lokakarya tersebut.

Di atas KRI banyak aktivitas yang dilakukan. Diantaranya diskusi masalah kebangsaan, masalah patriotisme dan sebagainya. Para peserta juga diingatkan betapa Indonesia pernah kehilangan dua pulau, Sipadan dan Ligitan yang dicaplok negara tetangga. Juga kasus blok Ambalat yang sempat dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 lalu.

Dan lantaran Letkol (P) Hadi Susilo juga menambahkan, peserta lokakarya ini meliputi mahasiswa, LSM, aparat pemerintah dan komponen lainnya.

Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo, Tarakan Akbar Syarif menjelaskan, selama mengikuti lokakarya di atas kapal, para peserta juga mendapat pendidikan kedisiplinan. Misalnya bangun pagi tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh panitia.

Dalam kegiatan ini juga dibentuk Forum Aliansi Ambalat. Para peserta dari seluruh Indonesia berharap lokakarya seperti ini dapat diselenggarakan tahun depan. ■ AMD, SP

Kukar Sehat 2008

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bertekad mewujudkan Kukar Sehat 2008 dengan membuat Perda khusus. Dalam Perda tersebut proses peningkatan SDM akan menjadi salah satu program unggulan. Yakni melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

Bidang pendidikan di Kukar saat ini telah mendapat porsi alokasi dana sebesar 20% dari besarnya APBD Kabupaten Kukar. Demikian pula bidang kesehatan mendapat perhatian serius dengan akan dibuatnya Perda Khusus Kesehatan oleh DPRD dan Pemkab Kukar, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kukar.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar HM. Ali Hamdi ZA Sag, berharap program Kukar Sehat 2008 bisa diterapkan dengan baik. Yaitu dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Dinas Kesehatan. Rancangan Perda tersebut dibuat dengan mengadopsi sistem yang digunakan dalam pola Asuransi Kesehatan (Askes).

Komisi IV DPRD Kukar sangat mendukung program yang dicanangkan tersebut. Karena fakta di lapangan menunjukkan banyak tempat di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara sangat sulit dan jarang tersentuh pelayanan kesehatan. Melalui program ini diharapkan jaminan kesehatan akan berjalan dengan baik melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti halnya Askes. ■ SB, SP

Hubungan persahabatan pemerintah Malaysia dan Indonesia yang selama ini terjalin dengan baik terkoyak lagi akibat insiden pemukulan empat orang polisi yang terjadi pada Jumat (24/8) dini hari terhadap wasit Karateka Indonesia, Donald Pieter Luther Kolopita (47). Akibat insiden tersebut, 22 orang atlet karateka yang mestinya mengikuti Kejuaraan Karate Asia di Seremban, Negeri Malaysia tanggal 22-27 Agustus langsung menarik diri dan pulang ke tanah air bersama dengan Ketua Kontingen Karateka, Luhut Pandjaitan. Di Indonesia, gelombang protes dan demonstrasi terjadi hampir di seluruh penjuru Tanah Air.

Donald, sapaan akrabnya, yang diundang resmi sebagai wasit di kejuaraan Karateka Asia mengalami luka cukup parah dan sempat dirawat di rumah sakit Tunku Jafaar, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan penyesalan dan menyingkapi insiden tersebut dengan hati-hati. "Dalam konteks ini saya serahkan pada pihak Malaysia, Bagi saya, hukum dan keadilan ditegakkan dan tentunya semangat persahabatan harus kita pelihara, termasuk bagaimana kita mengelola masalah-masalah seperti ini dengan penuh pengertian sambil memahami perasaan kita, perasaan Indonesia," katanya.

Harian *Indo Pos*, Jumat (31/8), menyikapi tentang arogansi Malaysia. Sebagai negara tetangga harusnya Malaysia menunjukkan sikap terpuji dalam tata krama hubungan internasional. Setelah membantingnya desakan dan kritikan dari Indonesia, akhirnya melalui telepon, PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas peristiwa tersebut. Sementara, pemerintah Malaysia menyampaikan komitmen dan tanggung jawabnya untuk membawa kasus ini ke proses hukum, dengan memberi sanksi pada siapapun yang bersalah, tanpa memohon maaf secara resmi.

Sekelumit Maaf dari Negeri Jiran

Lagi-lagi hubungan Indonesia dan Malaysia terganggu, akibat insiden pemukulan empat polisi Malaysia terhadap wasit karateka Indonesia, Donald Pieter Luther Kolopita.

Tentang hal ini Presiden SBY menghargai komitmen pemerintah Malaysia yang disampaikan Menlu Malaysia dan kepala kepolisian Malaysia Tan Sri Musa Hassan di kantor Presiden di Jakarta, Selasa (28/8).

Sebelumnya, berbagai media baik elektronik maupun cetak meliput secara besar-besaran insiden

negara terganggu. Akibat peristiwa ini, kebersamaan perasaan digantikan dengan aroma persaingan, perasaan dikhianati, arogansi dan sebagainya. Jargon sebagai bangsa serumpun sudah tak terdengar lagi gaungnya.

Padahal masih menurut *Sinar Harapan*, Malaysia dan Indonesia-

pemuda dan sebagainya berdemo di depan Kedutaan Malaysia di Jakarta.

Dalam tragedi ini sepatutnya Malaysia harus minta maaf. Namun hal itu tidak dilakukan. Pemerintahan Malaysia, melalui Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Seri Syed Hamid Albar, hanya menyatakan bahwa Malaysia lebih mengedepankan proses hukum. Malaysia harusnya bisa mengerti dan menghindari hal-hal yang seperti ini. Harian ini berharap hubungan Indonesia-Malaysia yang terjalin sekian lama jangan sampai memburuk dan berakhir dengan keretakan. Sebaiknya, Malaysia memiliki empati yang baik terhadap Indonesia.

Selama ini pemerintah Indonesia sangat menghargai Malaysia. Kita masih ingat ketika terjadi gangguan asap akibat kebakaran hutan yang kemudian asapnya melanda Malaysia dan Singapura, dengan kebesaran jiwa pemerintah Indonesia segera meminta maaf yang disampaikan sendiri oleh Presiden SBY.

Sedangkan *Kompas*, Kamis (30/8) dalam tajuknya, memuat pendapat Mantan Menlu Ali Alatas ketika berbicara dalam seminar 450 tahun hubungan Malaysia dan Indonesia di Jakarta. Alatas menyampaikan agar kedua negara harus mengatasi masalah ini secepatnya. Beliau menyampaikan hal itu terkait dengan berbagai perlakuan buruk yang terjadi selama ini terhadap para TKI di Malaysia.

Tak adanya permohonan maaf tentu sangat disayangkan, karena bisa mengancam hubungan persaudaraan kedua Negara. Langkah yang harus diambil agar persoalan tidak semakin melebar dan mendesak adalah, ambil tindakan dan pernyataan yang meredakan dan menghargai kehormatan bangsa Indonesia, bertemu memperbaharui hubungan persaudaraan yang lebih saling menghormati dan konstruktif. ■ ZAH



pe-
mukulan
tersebut. Beberapa harian nasional memberikan komentar dalam tajuknya.

Tajuk *Sinar Harapan*, Senin (27/8), sangat menyesalkan pemukulan empat polisi Malaysia terhadap wasit Karateka Indonesia, Donald Pieter Luther Kolopita. Karena hal ini membuat hubungan kedua

pe-
mukulan
sia harus arif melihat dan patut mengingat dampak negatif kasus ini karena akan berpengaruh pada stabilitas politik-keamanan Asia Tenggara.

Tajuk *Suara Pembaruan*, Rabu (29/8), menyoroti bagaimana tragedi pemukulan terhadap wasit karateka Donald Pieter Luther Kolopita menimbulkan berbagai aksi demo hampir di seluruh tanah air. Berbagai elemen masyarakat, organisasi karate, organisasi

Bangkitnya Komik Indonesia

Penghargaan Kosasih Award 2007 memberi dorongan ekstra bagi komikus-komikus Indonesia untuk terus berkarya. Meski komik Indonesia mengalami masa surut sejak 1980-an dan kalah pamor dengan serbuan komik asing, komik Indonesia perlahan-lahan terus menggeliat, terutama lewat komik-komik indie yang berkualitas.

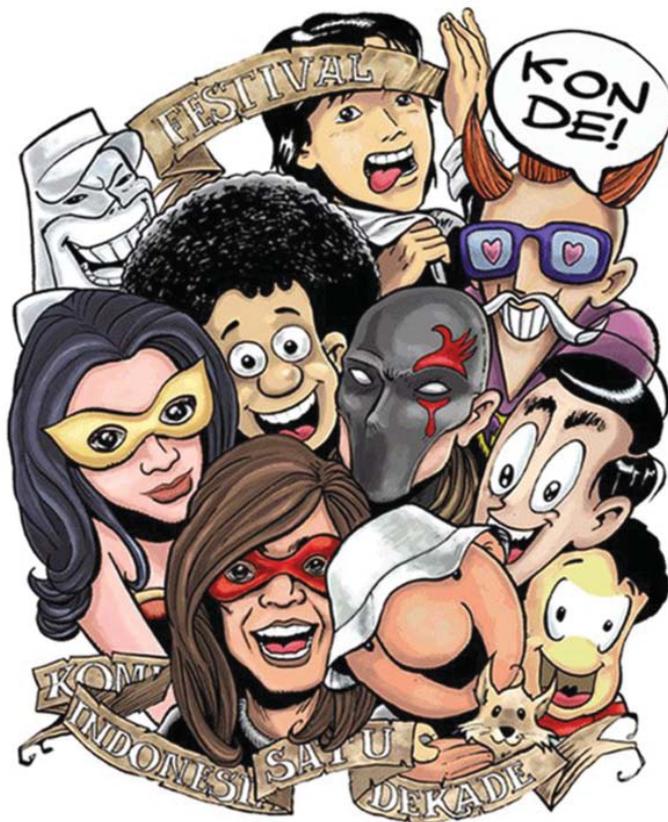
Membaca komik bagi sebagian besar orang bisa sangat menyenangkan. Namun tidak sedikit pula yang menganggap komik adalah bacaan 'haram', tidak bermutu, dan cuma membuang-buang waktu. Ia juga lantas "dituduh" sebagai "racun" karena mengutip berbagai makian seperti bedebah, jahanam, bangsat, atau kata-kata vulgar lainnya. Akibatnya komik 'dicampakkan' dan dianggap sebagai bahaya sehingga ia harus dienyahkan dari perpustakaan sekolah. Padahal komik juga banyak yang berkualitas bahkan bisa dijadikan alat pendidikan. Apalagi masa kecil tiap anak hampir selalu diwarnai dengan komik.

Berbagai jenis komik bisa kita jumpai di toko-toko buku. Bicara soal komik buatan luar negeri, ada ribuan jumlahnya. Namun komik buatan Indonesia masih terhitung jari. Meski demikian, bila kita jeli dan rajin menyambangi toko buku dan pameran komik, ada banyak komik-komik Indonesia yang tidak kalah bagusnyanya dengan komik-komik luar.

Komik-komik Indonesia kini sedang giat-giatnya berkembang setelah puluhan tahun tenggelam oleh serbuan komik-komik luar negeri. Tahun

1990-an muncul penerbitan buku-buku dan media alternatif (bulletin, *newsletter*, *community magazine*, dan *e-zine*) di Yogyakarta dan Bandung. Di sinilah bermunculan komik-komik *underground* (indie) yang kebanyakan mencoba tampil berbeda, membuat gaya gambar lebih variatif dan eksperimental. Banyak komikus-komikus indie menganjalkan mesin fotokopi untuk penggandaan karya-karya mereka. Sistem distribusi paling banyak dilakukan di pameran komik, baik dengan jalan jual-beli atau barter antarkomikus. Tak jarang ada komikus yang menghalalkan karyanya untuk diperbanyak dan disebarluaskan, dengan motto 'copyleft' (lawan dari copyright atau hak cipta). Tentunya tidak untuk tujuan komersil.

Gerakan komik indie ini makin menguat setelah Pasar Seni ITB 1995 digelar. Saat itu, komik indie Yogyakarta, yaitu Apotik Komik dan Core Comic, serta komik indie Bandung, yaitu Qomik Nasional dengan titel Caroq-nya beserta komik Awatar dari Jakarta rilis bersamaan di ajang itu. Setelah itu menyusul penyelenggaraan Pekan Komik Nasional (PKN) oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1997. Saat itu muncul gagasan untuk



membentuk sebuah wadah bagi generasi baru para pembuat, penggemar, kolektor, hingga penerbit komik. Lahirilah Masyarakat Komik Indonesia (MKI) tanggal 15 Maret 1997. Pada tahun 1998, muncul lagi Pekan Komik dan Animasi Nasional (PKAN) yang diadakan di Gambir, Jakarta. PKAN ini adalah acara rutin 2 tahun sekali. Di era 1997-1998 ini, muncul komikus bertema politik seperti, Radhar Panca Dahana (judul komik Mat Jagung), Beng Rahadian (Lagak Jakarta), dan Seno Gumira Ajidarma (Jakarta 2039).

Acara komik kemudian berkembang di luar Jakarta. Misalnya Pekan Komik Merdeka di Institut Teknologi Bandung (1999), Pekan Komik Indonesia di Universitas Negeri Malang (2000-2003), Pekan Komik Nasional di Universitas Petra, Surabaya (2001), Seyogyanya Komik Indonesia (SEKOIN) di Universitas Gadjah Mada, Yogya (2001-2002), Festival Komik Semarang di Universitas Diponegoro (2002), dan masih banyak lagi. Berbagai situs komik maupun komunitas komik bermunculan di seluruh pen-

juru negeri. Mulai dari Komikaze, newmedia, Bajing Loncat, Badjak Laoet, RED Army, Daging Tumbuh, Bengkel Qomik, Akademi Samali, Mubal Komike, Indicomik dan Komik Online.

Tahun 2007 menjadi tahun yang istimewa bagi dunia komik Indonesia. Berhitung satu dekade komik Indonesia generasi baru berkarya di tengah keterbatasan yang ada. Ini ditandai dengan hajatan besar Pameran Komik Indonesia Satu Dekade (Konde) pertengahan Agustus lalu. Selain mengadakan pameran dan seminar tentang komik, acara yang diselenggarakan oleh Akademi Samali ini juga memberikan penghargaan Kosasih Award 2007. Di ajang ini terpilih 30 nominasi terbaik dan sepuluh komik terbaik dari sepuluh kategori yang ada. Penamaan penghargaan dengan mengabdikan nama komikus RA Kosasih (88) ini merupakan salah satu bentuk ucapan cinta dan terima kasih insan pecinta komik Indonesia kepadanya.

Walaupun belum ada pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga hukum

manapun, komikus legendaris RA Kosasih dianggap sebagai Bapak Komik Indonesia. Kosasih dinilai paling berjasa kepada semua komikus dan pembaca komik tanah air melalui karya-karyanya. Seluruh nominator dipilih dari karya yang terbit 1997- 2007, baik terbit secara *mainstream* maupun independen. Penerima Kosasih Award 2007 untuk majalah komik terbaik adalah Sequen, kritik komik terbaik "Komik dan Kenyataan" oleh Hikmat Darmawan, komik indie terbaik Old Skull karya Atonk, komik terapi terbaik berjudul Keberanian, Harapan, dan Cita-cita, karya Mario Diaz, dan komik cyber terbaik Gibug dan Oncom karya Wisnoe Lee. Kategori lainnya cerita komik terbaik Tidur Panjang karya Beng Rahardian, gambar komik terbaik diraih Mail dan Cahyo Baskoro berjudul Panggil Aku Wartini Saja, karakter komik terbaik berjudul Kapten Kilat Khusus (Oyat, Iput, Ipot), sampul komik terbaik karya Gerdi WK Gina, serta komik terbaik karya M Arief dan Budiman berjudul Tekyan.

Sejak Tahun 1930

Sebenarnya komik Indonesia sudah muncul pada tahun 1930. Itupun masih berupa komik strip di surat kabar. Komik yang dimuat pada hari Sabtu, 2 Agustus 1930, di Sindo, sebuah surat kabar Melayu-Cina itu belakangan diberi judul Si Put On. Komik buatan Kho Wang Gie itu boleh dikatakan sebagai pelopor

komik untuk ragam komedi/humor. Kho menggali kejadian sehari-hari: Put On peranakan Cina gendut yang tak kaya, cintanya yang tak pernah sampai dan selalu bernasib malang. Dalam perkembangan tokoh Put On masih muncul di majalah

Varia Nada, Aneka/Ria, Film di tahun 1970-1980-an. Kho Wang Gie kemudian memakai nama samaran Sopoiku dalam bentuk buku. Ia membuat Nona A Go-Go, Lemot dan Obud, Agen Rahasia 013 (Bolong Djilu). Mulai tahun 1952 komik kemudian muncul dalam bentuk buku untuk pertama kalinya. Judulnya Kisah Pendudukan Jogja karya Abdul Salam, merupakan "pembundelan" komik strip dari surat kabar Daulat Rakyat.

Sepanjang tahun 1953-1956 komik Indonesia diwarnai oleh cerita-cerita superhero yang kemunculannya diilhami oleh komik Amerika seperti Superman, Tarzan, dan Flash Gordon. Misalnya saja Sri Asih karya RA Kosasih dan Jaka-



Komik Seri Mahabharata karya RA Kosasih, Bapak Komik Indonesia

wana karya Adisoma. Setelah itu, komik mulai dianggap tidak mendidik karena tingginya aksi kekerasan dan adegan buka-bukaan. Bahkan, pada tahun 1955 dilakukan pembakaran komik secara massal oleh pemerintah. Razia banyak dilakukan, termasuk di

taman-taman bacaan. Saat itu komik-komik itu dinilai tidak bagus karena terlalu mengangap mengadaptasi budaya Barat.

Meski ditekan sedemikian rupa, komikus-komikus Indonesia tetap berkarya dengan memunculkan komik wayang dan cerita daerah untuk mengangkat budaya bangsa. Maka, pada tahun 1956-1963 menjamurlah komik-komik itu. RA Kosasih dengan karya-karya wayang seperti Ramayana dan Mahabharata mengalami masa jayanya. Komik lain di masa ini misalnya Raden Palasara karya John Lo dan Ulam Sari karya Ardisoma. Memasuki tahun 1960-an, minat membaca komik wayang menurun. Ini menjadi peluang bagi ko-

mik Medan, yang waktu itu lebih mengambil cerita rakyat dan cerita aktual, untuk muncul. Taguan Hardjo adalah salah satu dari beberapa komikus yang berhasil membuat karya-karya yang canggih pada waktu itu. Sebut saja Hikayat Musang Berjanggut, Kapten Yani dan Perompak Lautan Hindia, serta Keulana.

Tahun 1963-1965 komik Indonesia banyak membawa pesan-pesan propaganda politik Orde Lama. Isinya banyak mengenai perjuangan melawan neokolonialisme, pemberontakan, dan ideologi. Akhir tahun 1965, ketika keadaan negara lebih stabil, komik yang populer bukan lagi komik politik, tetapi roman remaja yang menyorot kehidupan metropolitan remaja saat itu. Jan Mintaraga, Sim, dan Zaldy adalah tiga dari sekian banyak komikus yang membuat komik roman remaja. Namun, karena sebagian besar adalah adegan percintaan, komik ini sempat mengalami razia polisi tahun 1967 sehingga popularitasnya menurun.

Usai tema percintaan rupanya komik tidak kehabisan nafas dengan munculnya komik superhero gelombang kedua, komik petualangan pendekar-pendekar ahli silat, dan dongeng anak tahun 1968-1980. Ganes TH memelopori popularitas komik jenis ini. Karya-karyanya antara lain, Serial Si Buta dari Gua Hantu, Siluman Srigala Putih, Tuan Tanah Kedawang, Si Djampang, Djair dengan tokoh Jaka Sembung, Hans Jaladara dengan Panji Tengkorak. Komik Amerika juga terlihat lagi pengaruhnya. Misalnya, Labalaba Merah karya Kusbramiaya yang diinspirasi oleh Spiderman, Godam karya Wid NS dan Gundala karya Hasmi. Komik Indonesia kemudian mengalami masa surut pada tahun 1980-an. Saat itu komik Indonesia kalah pamor dengan serbuan komik asing, terutama komik manga dan produk-produk anime dari Jepang.

Sering dengan surutnya komik-komik Indonesia, profesi komikus menjadi kurang diminati. Selain karena profesi komikus mulai minim imbalan



Komik asli Indonesia 'Put On' yang hadir tahun 1930

finansial yang layak, profesi ini dinilai madesu (masa depan suram) oleh calon mertua (orang tua). Padahal di eranya RA Kosasih yang sempat berjaya dengan karya seperti Mahabharata, Ramayana, dan Siti Gahara, komikus bisa hidup dari membuat komik. Saat itu, RA Kosasih mengaku mendapat imbalan membuat komik sampai lima kali lipat gajinya di pertanian (sekarang Lembaga Penelitian Hama Tanaman). "Waktu itu gaji saya Rp 350 tahun 1950-an. Beras masih seperak setengah seliter. Kalau tidak salah, dari membuat komik, saya dapat sekitar lima kali lipatnya. Itu mula-mula, setelah itu dinaikkan sampai dapat Rp 4.000 satu bulan. Sama dengan gaji menteri. Apalagi saya sebetulnya membuat komik karena senang bukan sekadar uangnya," ujar RA Kosasih yang kemudian memilih berhenti dari pekerjaan tetapnya dan hidup dari komik.

Kini, apa yang dialami RA Kosasih cuma bisa dialami oleh segelintir komikus. Itu pun karena mereka ditarik atau ditunjuk penerbit internasional untuk mengerjakan proyek komik berskala global. Lihat saja Christiawan Lie dari Studio Bajing Loncat, Bandung, yang telah beberapa kali menjadi juara di lomba komik bergengsi, seperti AXN Asia Drawing Contest, AXN Asia Anime Action Strip, Comic and Illustration Competition di Singapura, dan MTV-Face of the Millenium Contest in Asia. Menurut Christiawan, honor para komikus di belahan mana pun di dunia relatif sama untuk spesifikasi yang sama. Chris memberikan rentang 35 dollar AS untuk *penciller* pemula dan 50-80 dollar AS untuk yang menengah. Tarif mereka dibayar per halaman. Biasanya kontrak diberikan per buku atau per mini seri, yaitu sekitar empat-lima buku. Umumnya komikus Indonesia berada pada posisi *penciller* yang menggambar sketsa, *inker* yang memberikan tinta, dan *colourist* sebagai pewarna. Bagian ini adalah bagian pembuatan, setelah konsep dan ceritanya dibuat di negara asalnya. Di AS profesi yang

dianggap paling tinggi adalah *penciller* dan *writer*.

Meski profesi komikus di luar negeri menjanjikan sementara di dalam negeri masih jauh dari harapan, kenyataan ini tidak menyurutkan semangat komikus-komikus generasi baru untuk terus tumbuh dan berkarya. Kalau dulu komik hanya dikerjakan oleh satu orang, sekarang mulai banyak studio-studio komik yang mengerjakan karya dengan "keroyokan". Tiap orang memegang tugas masing-masing: *storyboard*, *pencilling*, *inking*, sampai pewarnaan dan distribusi. Yang tadinya satu halaman tamat, sekarang sudah ada yang bersambung sampai beberapa jilid. Itulah sebabnya sudah mulai banyak penerbit yang melirik komik Indonesia untuk diterbitkan dengan kemasan yang lebih cantik, seperti Kepustakaan Populer Gramedia, Mizan, Elex Media Komputindo, Kelompok Penggemar Gina, Balai Pustaka, Terrant Books, Pustaka Delaprasta, Galang Press, Baris Baru dan Oxfam GB, Nirmana, dan Arus Kata Press.

Selain lewat media cetak (koran, majalah, tabloid, buku) dan internet, kehadiran komik Indonesia semakin terasa lewat dunia seluler alias handphone. Bekerjasama dengan komunitas komik Indonesia (Akademi Samali, Splash, Komik Indonesia.com) dan in-Touch sebagai penyedia aplikasi, operator telepon seluler Telkomsel melalui layanan yang diberi nama M-Komik sejak pertengahan Agustus lalu menyediakan berbagai komik Indonesia untuk pelanggannya antara lain Si Buta dari Gua Hantu, Gundala Putera Petir, Godam, Laba-laba Merah, Panji Tengkorak, Walet Merah, Gina, serta Ramayana dan Mahabharata. Sederatan maestro komik Indonesia seperti Jan Mintaraga, Teguh Santosa, Taguan Hardjo, Wid NS, Eko Nugroho, Ahmad Zeni, Wisnoe Lee, Hans Jaladara, Gerdi WK, ikut meramaikan layanan M-Komik. Pilihan komik Indonesia kini semakin banyak, makin berkualitas dan makin mudah diakses dari mana saja. ■ MLP

Daftar Sebagian Penerima Kosasih Award 2007

Majalah Komik Terbaik Sequen

Majalah komik *Sequen* yang terbit perdana Maret 2006 ini dijual dengan harga Rp 25 ribu. Selain menyuguhkan artikel khasanah komik lama, tips membuat komik dan profil komikus, majalah yang dijual lewat jaringan toko buku Gramedia dan Gunung Agung ini juga menghadirkan serentetan karya baru dari komikus-komikus senior seperti Hans Jaladara, Mansyur Daman, dan Gerdi WK. Selain itu ada juga karya dari barisan komikus generasi baru seperti Beng Rahadian, Emte dan Toni Masdiono.



Cerita Komik Terbaik Tidur Panjang

Komik karya Beng Rahadian ini perlu dibaca ulang beberapa kali sebelum mengerti maknanya. Rangkaian gambar surealis tanpa teks nampak sangat sulit dicerna pada awalnya. Namun perlahan pembaca dapat masuk ke dalam pesan yang ingin disampaikan. Komik ini bisa ditemukan dalam *Komik Memorabilia Gempa* yang merupakan kompilasi karya-karya komik dalam rangka mengenang musibah gempa bumi Yogyakarta, 27 Mei 2006 lalu.



Komik Indie Terbaik Old Skull

Karakter dalam komik karangan Atonk ini akrab dengan dunia punk dan rock. Dalam *Old Skull*, komikus bernama asli Sapto Raharjo ini sedikit banyak mengangkat pengalaman pribadinya semasa 11 bulan mendekam di bui. Salah satunya menceritakan tentang insafnya *Old Skull*, pemakai putaw berambut Mohawk berwajah tengkorak.



Komik Terapi Terbaik Keberanian, Harapan, dan Cita-cita

Komik ini bisa ditemukan dalam *Komik Memorabilia Gempa*. Di situ dikisahkan seorang gadis mungil malam di bawah pohon ditemani boneka beruangnya. Sang boneka menasihati dan memberinya semangat untuk tetap memiliki keberanian, cita-cita, dan harapan. "Di luar sana masih banyak sesuatu yang berguna yang bisa kamu lakukan!" begitu nasihat boneka beruang kepada sang gadis cilik. Ia lalu menatap langit cerah, dan perlahan ia tersenyum.



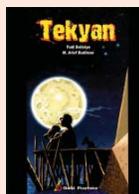
Komik Cyber Terbaik Gibug dan Oncom

Gibug dan Oncom karya Wisnoe Lee ini dibuat sejak awal tahun 2000. *GIBUG* adalah seorang bekas pengusaha sukses yang terperosok menjadi tukang bajaj karena ulahnya sendiri mengelapkan uang perusahaan. Kini *GIBUG* adalah tukang bajaj yang sibuk dengan pengalamannya yang baru ditemani kucing kesayangannya bernama *Oncom* serta bajajnya yang norak. *GIBUG* di-online-kan di www.gibug.com sejak 18 November 2001.



Komik Terbaik Tekyan

Komik karya M Arief Budiman dan Yudi Sulistya ini mengambil tema sosial yang sangat relevan dan jarang dimunculkan dalam komik Indonesia: tentang anak jalanan. Dari kisah si anak jalanan (istilah jalannya: *tekyan*), kita dibawa menengok secerah suasana gerakan reformasi 1997-1998. Salah satu sindiran nakal dalam komik ini adalah gambaran sipir penjara yang mirip sekali dengan (mantan presiden) Soeharto.



Karakter Komik Terbaik Kapten Kilat Khusus

Kapten Kilat Khusus dirilis sebagai bagian dari kompilasi komik pendek '1001 Jagoan/Factory Outlet Boys' terbitan Terrant tahun 2004. Sebelumnya sempat beredar secara indie. Tahun 2005, buku ini mendapat penghargaan sebagai 'The Most Wanted Comic' alias komik favorit pembaca di *Komikasia 2005*. Serial komik strip Kapten Kilat Khusus sedang dipersiapkan sebagai kelanjutan dari episode pertama komik pendeknya di buku 1001 Jagoan.

Belajar dari Turki

Apa yang membuat partai agamis menang di negara yang mempunyai konstitusi sekuler – bahkan cenderung mengagungkan sekularisme - seperti Turki?

Perkembangan politik di negara berpenduduk 74 juta yang mayoritas Muslim ini menjadi perbincangan hangat di pentas gobal. Sosok Abdullah Gul (56) yang kini resmi menjadi Presiden Turki dan isterinya memenuhi pemberitaan semua media massa baik cetak maupun elektronik.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mengusung pendirinya Abdullah Gul (56) sebagai capres dikenal sebagai partai islamis yang menguasai hampir separuh kursi di parlemen. Dalam Pemilu Turki yang diselenggarakan akhir bulan lalu (22/07), AKP berhasil mendulang dukungan sangat signifikan, 46,3 persen. Persentase ini setara dengan 339 kursi dari total kursi 550 di parlemen. Perolehan suara AKP itu menjadi pukulan telak bagi kalangan oposisi (sekuler) seperti Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Aksi Nasional (MHP). Kedua partai oposisi di atas masing-masing hanya mendulang dukungan 20,9 persen dan 14,2 persen.

Kemenangan AKP menguasai hampir separuh kursi di parlemen semakin lengkap setelah Abdullah Gul memenangi pemungutan suara pemilihan presiden Turki pada putaran ketiga. Gul memperoleh suara 339 dari 550 anggota parlemen yang ada di Turki. Jumlah itu melebihi syarat jumlah suara mayoritas yang harus diperoleh, yakni 276 suara. Kemenangan ini menjadi Gul presiden Turki yang ke-11. Sebelumnya, dalam pilpres putaran pertama (20/8) Abdullah Gul hanya berhasil mendapatkan 341 suara parlemen. Sedangkan dalam pilpres putaran kedua (24/8), Abdullah Gul

hanya berhasil mengantongi dukungan suara parlemen 337.

Kemenangan AKP di pentas perpolitikan Turki ini bukan datang dengan cuma-cuma atau karena kader-kader AKP mendominasi parlemen Turki. Berbagai macam 'bendungan' politik dibangun oleh kalangan oposisi dan sekuler. Mulai dari pengerahan massa hingga pemboikotan atas pemilihan presiden. Tahun lalu, AKP dipaksa menggagalkan rencananya untuk mencalonkan Perdana Menteri, Recep Tay-



Abdullah Gul merupakan presiden termuda pertama di Turki sedangkan isterinya, Hayrunisa menjadi ibu negara termuda di dunia.

yib Erdogan (juga pendiri AKP), sebagai presiden. Partai agamis itu kemudian mencalonkan Abdullah Gul (menteri luar negeri Turki di era pemerintahan Erdogan) sebagai presiden. Langkah itu pun berakhir dengan kegagalan setelah kalangan sekuler dan oposisi memboikot pemilihan presiden pada April 2006. Hingga akhirnya pemilu yang menurut rencana akan dilaksanakan November mendatang dimajukan ke Juli.

Besarnya usaha kalangan oposisi dan sekuler menentang langkah AKP dan Abdullah Gul bukannya tanpa alasan. Bagi kelompok sekuler, Gul dianggap tidak terlalu sekuler. Bahkan, Gul dianggap ancaman bagi Republik Turki yang mempunyai konstitusi yang sekuler. Selain latar belakang Gul yang islamis, warga Turki yang sekuler juga tidak nyaman dengan upaya istri Gul, Hayrunisa Ozyurt Gul (42) melaporkan Pemerintah Turki ke Pengadilan Hak Asasi Manusia atas larangan penggunaan jilbab di kantor dan di perguruan tinggi. Padahal konstitusi Turki yang melarang perempuan mengenakan kerudung di gedung milik pemerintah, universitas, termasuk istana presiden sudah berlaku sejak 1980-an. Bagi kelompok oposisi, kerudung adalah simbol politik Islam yang bertentangan dengan sendi negara.

Kutodlu. Kutodlu, yang menetap di Wina, Austria, akan memilihkan Hayrunisa gaya kerudung Sophie Loren, bintang film Italia masa lalu.

Setelah terpilih sebagai presiden, pihak sekularis mengingatkan akan selalu mengawasi sepak terjang dan pemerintahan Gul. Mereka khawatir Gul akan diam-diam melaksanakan program-program rahasia islamis dan sistem sekularisme yang diwariskan Mustafa Kemal Atatürk sejak mendirikan Republik Turki pada 1923 terancam dihapuskan oleh kelompok islamis. "Kami akan selalu mengawasi setiap langkah yang dia ambil. Kami juga akan mengawasi kesetiannya kepada republik," kata seorang anggota dari kelompok sekularis, Mustafa Ozyurek.

Kemenangan partai agamis AKP di Turki tidak lepas dari pengaruh dan kepemimpinan pendirinya, Abdullah Gul dan Erdogan. Meski datang dari partai agamis, Abdullah Gul, pernah mengatakan bahwa umat Islam di Turki bisa tampil sebagai umat yang demokratis, maju, dan modern. Mereka tidak terjebak dalam pengagungan simbol-simbol agama lalu serta merta mengharamkan sekularisme (demokrasi) yang sudah mengakar kuat di Turki. Tujuan utama seorang pemimpin dan negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Ini terbukti bahwa selama pemerintahan Erdogan (sebagai perdana menteri), pertumbuhan ekonomi Turki cukup stabil dengan tingkat inflasi rendah. Kebijakan ekonomi pemerintahan Erdogan juga pro-rakyat. Akses terhadap kesehatan yang semakin dipermudah, pemberian kredit perumahan murah bagi orang miskin, pengadaan buku pelajaran gratis, dan lain-lain merupakan salah satu langkah riil Erdogan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan negaranya. Selain itu, Turki juga menjalin hubungan baik dengan semua pihak termasuk negara-negara Barat yang diasumsikan sebagai pihak paling merugikan negara-negara berpenduduk muslim. ■ MLP

Harapan Baru Bagi Kaum Perempuan

Kanker leher rahim dan kanker payudara merupakan dua penyakit ganas yang paling menakutkan bagi kaum Hawa. Setelah berhasil membuat vaksin untuk mencegah kanker leher rahim, dunia kodekteran kini mulai menemukan titik terang dalam membuat vaksin pencegah kanker payudara.

Vaksin yang ditujukan untuk mengatasi kanker payudara itu disebut dengan vaksin Neuvence, dibuat oleh perusahaan Dendreon, yang juga membuat vaksin kanker prostat, Provenge. Dalam ujicoba tahap awal, Neuvence ternyata aman dan menunjukkan tanda penurunan tumor. Namun vaksin ini hanya ditargetkan untuk pasien kanker payudara dengan status Her2 Positif. Neuvence dibuat oleh sel imun yang berasal dari tubuh pasien sendiri, karenanya vaksin ini tidak sama untuk setiap orang. Setelah hasil yang menggembirakan tersebut, kini para peneliti akan melanjutkan pada tahap dua penelitian untuk menguji apakah vaksin tersebut benar-benar efektif mengobati kanker payudara. Penelitian ini masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasilnya.

Sedangkan vaksin untuk mencegah kanker leher rahim yang disebabkan infeksi virus human papilloma virus (HPV) sudah digunakan di luar negeri sejak beberapa tahun lalu. Vaksin ini 100 persen efektif dalam mencegah kanker stadium dini dan ketidaknormalan akibat turunan virus yang muncul sebelum kanker terjadi. Sementara itu, di Indonesia, vaksin ini telah mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

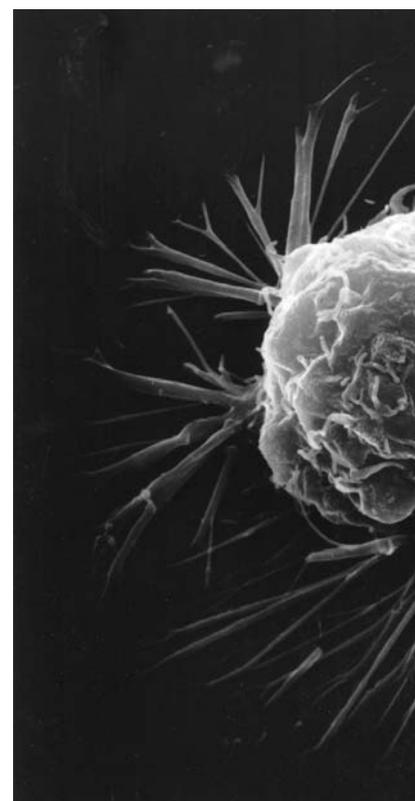
serta mengantongi sertifikat halal dari The Islamic Food and Nutrition Council of America. Imunisasi HPV akan diberikan pada perempuan usia 12-14 tahun, melalui suntikan sebanyak tiga kali berturut-turut tiap dua bulan sekali dan dilakukan pengulangan satu kali lagi pada sepuluh tahun kemudian. Kemudahan dalam hal pemberian vaksin dan tingginya angka keberhasilan menjadi keunggulan pencegahan metode ini. Tetapi sayangnya, pencegahan melalui vaksin ini mempunyai kelemahan, yakni mahal. Teknologi rekombinan yang digunakan untuk memproduksi vaksin merupakan teknologi biologi molekuler yang berbiaya tinggi. Hal ini berimbas pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka yang ingin mendapat imunisasi. Di Amerika misalnya, satu kali suntikan biayanya mencapai US\$100 (hampir Rp1 juta).

Di Indonesia, kanker leher rahim merupakan kanker dengan jumlah penderita terbanyak (34,4% dari kanker pada perempuan). Dengan 8.000 kematian per tahun, 40-45 kasus baru per hari, 20-25 kematian per hari, kanker leher rahim menjelma menjadi pembunuh perempuan nomor dua setelah kanker payudara. Penderita terbanyak adalah perempuan kelompok umur 35-49 tahun.

Kanker leher rahim dapat

berkembang ketika sel yang abnormal dalam serviks (daerah yang menghubungkan rahim dan vagina) mulai membelah diri tanpa terkendali. Kanker leher rahim ini 99 persen disebabkan oleh human papilloma virus (HPV). Infeksi oleh HPV sering kali tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak tahu mereka terinfeksi HPV, atau banyak orang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya. Perjalanan penyakit ini mulai dari kelainan pra kanker sampai kanker cukup lama, sekitar 5-10 tahun. Gejala yang sering dikeluhkan pasien biasanya perdarahan saat bersenggama, yang keluar melalui vagina. Adanya keputihan yang berbau busuk dan tidak sembuh walaupun sudah diobati dengan obat keputihan. Ini terjadi karena sel-sel kanker memproduksi lendir. Biasanya gejala timbul pada stadium dua atau tiga. Pada tahap lebih lanjut pasien mengeluh adanya nyeri pangul. Dan bila kanker sudah membesar dapat menghalangi saluran kencing sehingga pasien akan mengalami kesulitan buang air kecil. Keadaan berikutnya sudah sangat terlambat. Sayangnya, hampir 70% pasien yang datang ke dokter sudah pada stadium lanjut (>IIB).

Beberapa faktor yang mempermudah infeksi HPV adalah riwayat menikah muda (<20 tahun), berganti-ganti pasangan, sering menderita infeksi menular seksual, merokok, ibu yang melahirkan banyak anak. Ada beberapa tipe virus HPV tapi yang "high risk" (risiko tinggi) mengakibatkan kanker leher rahim diantaranya HPV tipe 16, 18, 31, dan 33. Penularan terbesar melalui hubungan seksual. Demikian dijelaskan Dr. dr. Laila Nuranna,



Jaringan kanker payudara

SpOG (K) pada saat seminar sehari tentang kanker di Gedung Dharma Wanita Persatuan, Kuningan, Jakarta, akhir Agustus lalu.

Dalam seminar sehari bertajuk "Kanker, Bertindak Sekarang Sebelum Menjadi Masalah" itu, Laila mengatakan bahwa kanker leher rahim adalah satu-satunya kanker yang bila dideteksi sejak dini, tingkat kesembuhannya bisa mencapai 100 persen. Dengan metode skrining yang mudah dan murah seperti IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 3-5%) sudah dapat dideteksi ada atau tidaknya kelainan pra kanker. Mudah karena dapat dilakukan di puskesmas, praktek dokter atau bidan. Murah karena hanya menggunakan asam asetat (lebih dikenal dengan asam cuka) dengan konsentrasi rendah 3-5%. Hasil yang didapat pun cukup akurat.

Cara lain deteksi yang dianjurkan yaitu pap smear. Kelompok yang memiliki risiko tinggi seperti disebut di atas diharapkan dapat menjalani tes pap ini. Bahkan setiap perempuan yang sudah mel-

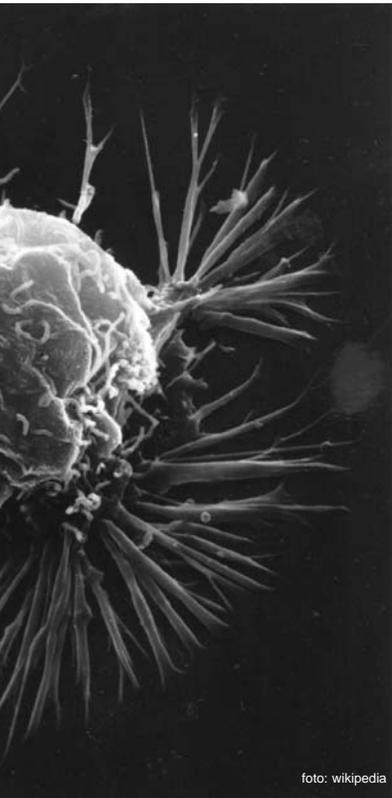


foto: wikipedia

Vaksin untuk mencegah kanker leher rahim masih mahal. Di Amerika misalnya, satu kali suntikan biayanya mencapai US\$100 (hampir Rp1 juta).

rempuan berpotensi terserang kanker payudara. Sedangkan pada pria kasus kanker payudara jauh lebih kecil sekitar 1%. Sepanjang tahun 2005, tercatat 502.000 orang meninggal akibat kanker payudara. Angka kematian yang tinggi ini disebabkan oleh rendahnya cakupan deteksi dini akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker payudara itu sendiri. Hampir 87% kasus ditemukan pada stadium lanjut.

Dr. Sri Mutya Sekar Utami, Sp.Rad (K) Onk.Rad, dalam seminar sehari tentang kanker payudara baru-baru ini, menearangkan beberapa hal dan kebiasaan yang telah diketahui meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara. Diantaranya perempuan kelompok umur 35-49 tahun, memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga dekat, memiliki riwayat penyakit payudara jinak/tumor. Selain itu, haid pertama kali di usia dini, menopause/mati haid di usia lanjut (>50 tahun), juga berpotensi terkena penyakit ini. Hal ini disebabkan karena tubuh lebih lama terpapar oleh

hormon. Tidak menikah, tidak menyusui, infertilitas, melahirkan anak pertama di atas 35 tahun, radiasi, konsumsi alkohol berlebih, pola makan tinggi lemak, kegemukan, mendapat terapi hormon jangka panjang, juga meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara.

Gejala yang patut dicurigai akan adanya ancaman kanker payudara bila terdapat benjolan di payudara. Pada sekitar benjolan, kulit terlihat berkerut, kemerahan dan terjadi tarikan ke dalam. Tanda lainnya keluarnya cairan dari puting susu. Cairan biasanya berupa darah. Pada tahap lanjut didapat luka yang tidak sembuh-sembuh dan berlubang/ulserasi.

Mengingat cara deteksi dini yang mudah, Sri menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara rutin setiap bulan, beberapa hari setelah haid berakhir. Teknik SADARI cukup mudah. Amati kedua payudara di depan cermin apakah ada kelainan pada warna kulit, puting dan sekitarnya. Lalu letakkan kedua tangan ke belakang kepala. Pada pergerakan apakah ada perbedaan pada kedua payudara. Lihat juga ketiak dan leher bagian bawah. Posisi berikutnya adalah berbaring. Taruh tangan kanan di belakang kepala, raba payudara kanan dengan tangan kiri. Perabaan secara melingkar searah jarum jam mulai dari puting ke arah luar. Demikian juga lakukan pada payudara kiri.

Satu hal yang harus dicatat, ternyata ada sejumlah kecil kanker payudara muncul tanpa adanya benjolan sama sekali, dan gejala ini bisa menge-

coahkan kita semua, bahkan para dokter. Jenis kanker payudara yang dikenal dengan Inflammatory Breast Cancer (IBC) ini cukup jarang dan jenis yang sangat agresif. Jika tidak segera terdiagnosa maka bisa menyebabkan kematian.

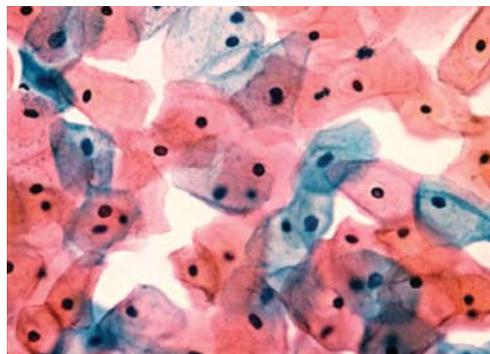
Oleh karena itu, pemeriksaan lain yang dianjurkan adalah mammografi dan ultrasonografi (USG). Mammografi sangat bermanfaat dalam menemukan kanker dalam stadium dini. Disarankan perempuan 35 tahun ke atas melakukannya sebagai skrining/check-up. Pemeriksaan ini agak menyakitkan, karena payudara ditekan kuat sebelum difoto. Pada kelompok usia 40-49 tahun pemeriksaan mammografi dapat dilakukan setiap 2 tahun. Berbeda dengan mammografi, pemeriksaan USG tidak menyakitkan. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara untuk membedakan benjolan padat dan cair/kista. Pengobatan kanker pada prinsipnya tidak berbeda. Pilihannya mulai dari operasi, radiasi dan kemoterapi tergantung dari stadium, letak, dan kondisi pasien.

Berbeda dengan kanker leher rahim yang sudah bisa dicegah dengan vaksin, kanker payudara hingga saat ini cuma bisa dihindari dengan pola hidup sehat. Banyak makan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan sereal serta mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, sebagai antioksidan untuk menjaga sel dari kerusakan. Selain itu, kurangi makanan tinggi lemak, hindari kegemukan, bebas alkohol dan rokok serta berolahraga teratur. ■ DGR, MLP

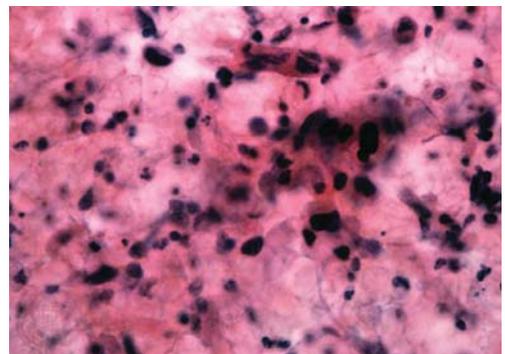
kukan hubungan seksual dianjurkan melakukan tes pap. Sensitivitas tes pap bila dikerjakan setiap tahun mencapai 90%. Di Yayasan Kanker Indonesia harga tes ini berkisar Rp 25.000. Sedangkan untuk pengobatan pasien yang sudah terkena penyakit ini bisa dilakukan dengan operasi, radiasi, dan kemoterapi tergantung stadium dan kondisi pasien. Pada stadium yang sudah lanjut, tindakan pengobatan bisa dilakukan dengan terapi gabungan ketiganya.

Untuk mengurangi risiko terkena penyakit ini, sebaiknya hindari melakukan hubungan seks pada usia dini, tidak berganti-ganti pasangan seks, tidak merokok, membatasi jumlah kelahiran dengan KB, dan memiliki pola hidup sehat. Makan banyak sayuran hijau dan buah-buahan, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin A, C, dan E, serta berolahraga secara teratur.

Sedangkan kanker payudara merupakan kanker terbanyak nomor dua di Indonesia (11,22%). Penyebab pastinya sampai saat ini belum diketahui. Satu dari sepuluh pe-



Jaringan sel normal dalam leher rahim



Jaringan sel dalam leher rahim yang mengandung tumor (hitam)

foto-foto: britannica

Komandan Korps Marinir, Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi: Sang Pembawa Amanah

Mayor Jenderal TNI (Mar) Nono Sampono, yang baru menduduki jabatan sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar) sejak 6 Juni 2007, mempunyai pandangan hidup yang sangat mulia. Sebagai komandan ke-16 di kesatuan Baret Ungu, pasukan elit TNI Angkatan Laut, dia memandang jabatan yang disandangnya itu adalah sebuah amanah.

Amanah baginya mempunyai arti luas. Bukan hanya merupakan pertanggungjawaban sebagai prajurit, atau sekadar kehormatan dan prestise belaka, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral secara profesional.

Mantan Danpaspampres di era Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri ini menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semulus jalan tol. Pasti ada kerikil-kerikil cobaan yang datang silih berganti. Dengan bijak dia menyikapi bahwa cobaan itu datang bukan hanya di kala merasakan kesulitan dan kesusahan semata, tetapi juga di saat bergelimang kesenangan. Dia pun menyadari kalau semua itu merupakan bagian dari skenario yang datang dari sang Khalik.

Dalam setiap langkah yang diambilnya, dia selalu mengintrospeksi diri dengan meletakkan komitmen dasar hidup pada empat hal, Tuhan, negara, institusi, rekan dan keluarga serta lingkungan dimana pun dia berada.

Pria kelahiran Bangkalan, Madura 1 Maret 1953 dan beristrikan Norma Riana ini paham betul jika perjalanan yang dia lakoni dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Namun demikian, dia tak pernah ragu untuk menyongsong tiap perubahan yang terjadi. Untuk itu dia mempunyai tips khusus bagaimana menghadapi perubahan itu sendiri. "Kita tidak



Dankormar Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi

foto: berindo wilson

Sebagai orang nomor satu di Korps Marinir TNI AL, Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono S.Pi, menganggap apa yang diembannya sekarang merupakan amanah mulia yang harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan, Bangsa, Institusi Korps Baret Ungu serta Keluarga.

perlu apriori terhadap perubahan, sebab perubahan menggambarkan adanya arti kehidupan, adanya perbaikan, adanya harapan, adanya perwujudan daricita-cita atau mimpi yang hendak dicapai," jelasnya.

Pengidola mantan Dankormar ke-9 Mayjen TNI (Mar) Baroto Sardadi yang menjabat

sebagai Dankormar periode 1990-1992 dan Mantan Panglima ABRI LB Moerdani (alm) ini beranggapan, baik kemandirian sekarang atau sebelumnya tidak memiliki perbedaan signifikan. Dia pun mengaku hanya mengikuti dan mengalir laksana air. "Kesatuan Marinir ini merupakan bagian integral dari TNI Angkatan Laut yang

memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang telah diberikan negara padanya," paparnya.

Dalam wawancara dengan Amron Ritonga, Nur Azizah dan Wilson Edward dari *Berita Indonesia*, Nono Sampono memaparkan langkah yang ditempuhnya dalam meningkatkan semangat, kemampuan dan profesionalitas prajuritnya guna mengejar ketertinggalan dibanding dengan negara maju lainnya. Dia pun mengaku tak kenal putus asa dan selalu mengasah serta meningkatkan kualitas prajurit melalui peningkatan sumber daya manusia di jajarannya dengan segala keterbatasan yang dialami kesatuan yang dipimpinya.

"Saya memahami kondisi negara saat ini, yang tidak bisa sepenuhnya mendukung dalam upaya peremajaan senjata militer yang sudah lapuk terkandung usia," jelasnya

Segala keterbatasan yang ada itu bukanlah sebagai penghalang untuk terus menggali dan mengasah kemampuan prajuritnya. Sebagai contoh kecil, Kormar akan melaksanakan kembali lomba renang di Selat Sunda tanpa didukung alat bantuan yang memadai. Padahal pantai yang dirungsi memiliki ombak yang sangat deras. Berjarak sepanjang 40 Km dan ditempuh dalam waktu 12 jam. Baginya, ini merupakan prestasi luar biasa yang tidak dimiliki semua prajurit TNI Angkatan Laut. Program ini merupakan program lama yang pernah berhenti beberapa tahun dan kini dihidupkan kembali.

Mayjen TNI Nono Sampono pun bercerita bahwa dirinya pernah mengikuti perlombaan serupa pada tahun 1992 ketika berpangkat Letnan Kolonel (Letkol). Saat itu dia menjabat sebagai Dan Denjaka.

"Kepada prajurit yang berprestasi, kami tidak segan-segan memberikan *reward* se-



foto: dok. puspen TNI

Nono Sampono bersama Panglima TNI (tengah) dan KSAL (kanan).

bagai penambah semangat bagi prajurit yang bersangkutan, yang nantinya bisa dicontoh oleh prajurit lainnya," katanya.

Dalam menanggapi berbagai persoalan yang ada di Marinir, Mayjen Nono Sampono tak segan-segan meminta saran dan masukan dari para perwira menengah ke bawah sebelum mengambil kesimpulan dan memutuskan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

Menanggapi kasus penembakan yang terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan dan tertembaknya Letda Syam Ahmad Sanusi, mantan anggota Korps Marinir yang terlibat dalam kasus pembunuhan bos PT Asaba, Budiarto Angsono, secara pribadi dia sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi.

Berkaitan dengan hal itu, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, bukan semata masalah finansial, prajurit tersebut akan melakukan tindakan nekat seperti itu walaupun berlawanan dengan kondratnya sebagai prajurit elit TNI Angkatan Laut. Kedua, bila keselamatan dirinya sudah terancam atau harga dirinya sudah tersentuh, membuat prajurit tersebut berusaha melakukan pembelaan.

"Bila terjadi demikian, serahkan kepada proses hukum untuk menindaklanjutinya," tegasnya.

Ayah dari satu putra (Taufik Bagus Murdianto) dan dua putri (Agustini Murdiana dan

Sheila Destari) ini menilai, semua insan dipengaruhi sifat positif dan negatif. Tinggal bagaimana daya tahan imannya untuk mengatasi segala hawa nafsu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa tidak semata institusi Korps Marinir saja yang mengalami hal itu, profesi apa saja juga sering mengalami hal yang sama.

Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) ini mengumpamakan, dalam keluarga antara kakak dan adik tidak sama kuat imannya. Begitu juga di kesatuan yang memiliki ribuan personel.

Dalam memantapkan kekuatan Korps Marinir, tahun 2009 mendatang Marinir diharapkan memiliki tiga Pasmar, 1 Komando Latih Marinir, 1 Brigada Marinir Berdiri Sendiri Jakarta dan 1 Brigmar BS Surabaya, 1 Rumkitalmar Cilandak, 1 Resimen Intai Para Amfibi, 1 Pangkalan Marinir Jakarta dan 1 Lanmar Surabaya.

Mengenai dislokasi dari masing-masing Pasukan Marinir (Pasmar), rencananya Mako Pasmar I di Lampung, Mako Pasmar II di Surabaya dan Pasmar III di Sorong. Tujuan dibentuknya Mako tersebut tidak lain untuk meng-cover wilayah NKRI yang memiliki beribu-ribu pulau dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Saat ditanya musuh apa paling besar yang dihadapi Korps Marinir sekarang, Dankormar

tersenyum sejenak sambil menatap langit-langit ruang kerjanya yang didominasi warna serba putih. Dia kemudian mengumpamakan bahwa dalam bertetangga yang perlu diwaspadai adalah tetangga itu sendiri. Begitu juga halnya dengan teman perlu juga kehati-hatian.

Mengenai pengamanan pulau-pulau terluar, Komandan Korps yang memiliki motto "*Jalesu Bhumyamca Jayamahe*" itu menambahkan bahwa yang perlu diwaspadai adalah daerah strategis, sebagai basis pihak luar yang merasa memiliki kepentingan di Indonesia, khususnya dunia internasional yang sering menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan negara.

Pasmar meningkatkan kerjasama dengan kesatuan kerjasama dengan kesatuan lain dalam mencegah agar tidak ada pihak asing yang mencoba kembali menduduki pulau-pulau terluar tersebut.

Selama peristiwa itu mengandung kriminal dan tindak pidana, Marinir mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, bila sudah menyangkut kedaulatan negara, pasukan Marinir siap untuk menghalaunya.

Mantan Ketua Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) yang menjabat selama dua periode (4 tahun per periode) ini berpendapat bahwa seorang prajurit Marinir bisa bangga dengan korpsnya kala dia dalam pendidikan dasar, dan itulah nilai paling berharga baginya tanpa bisa diukur dengan finansial.

Dia mengambil contoh, saat Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto diangkat menjadi warga kehormatan marinir. Saat itu secara otomatis Korps Baret Ungu ini merasa bangga pada kesatuannya karena merasakan bagaimana sulitnya menjadi anggota satuan Marinir yang penobatannya saat itu disaksikan langsung oleh Panglima TNI.

Di balik kegagahannya, diam-diam Mayjen TNI Nono Sampono memiliki kemampuan yang sama sekali tidak bersinggungan dengan jabatan yang diembannya saat ini, yakni menyanyi. Tak tanggung-tanggung, dia pun sempat berkolaborasi dengan para penyanyi senior Indonesia asal Ambon. Bahkan dia telah mengeluarkan album kompilasi bersama Harvey Malaiholo, Yopie Latul dan sebagainya.

■ RON, NUR, SP

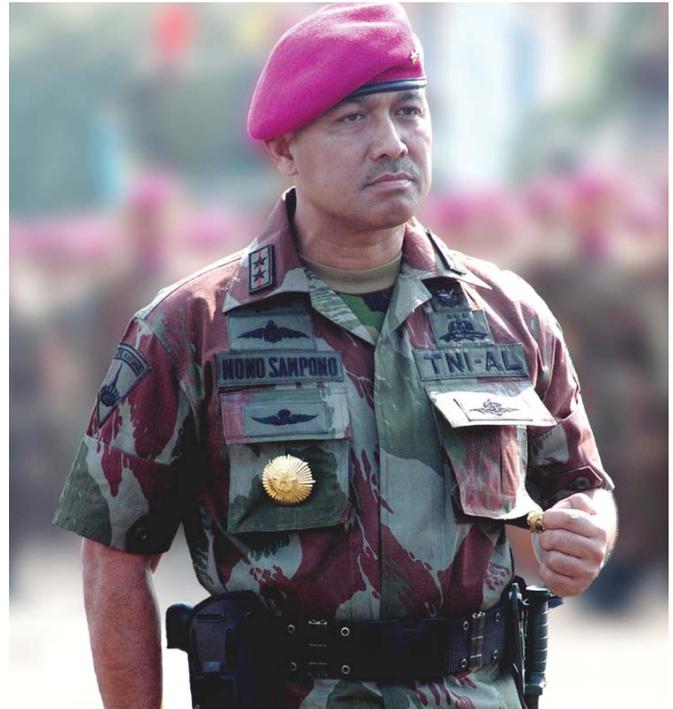


foto: dok. dispen marinir

Nono Sampono: Segala keterbatasan yang ada bukanlah sebagai penghalang untuk terus menggali dan mengasah kemampuan prajurit.

Sepuluh Software Windows Mobile Terbaik

Jangan puas dengan software standar bawaan Windows Mobile dalam PDA Anda. Buat PDA Anda semakin pintar dan maksimalkan investasi yang Anda keluarkan untuk membeli PDA itu dengan software-software yang 'a must have' ini.

Seperti layaknya komputer, PDA Windows Mobile juga dapat diinstal beragam aplikasi. Ada ratusan software untuk berbagai keperluan yang dapat Anda gunakan. Berdasarkan pengalaman penulis menguji coba berbagai software

Windows Mobile beberapa tahun terakhir, setidaknya ada sepuluh software Windows Mobile yang bisa meningkatkan performance PDA dan memberikan manfaat yang besar bagi penggunanya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh software apa saja



yang ada di dunia Windows Mobile, Anda bisa mengunjungi situs majalah Smartphone & Pocket PC (<http://www.pocketpcmag.com/awards/>). Setiap tahun ma-

jalah ini memberikan penilaian dan award terhadap software Windows Mobile terbaik yang ada di pasaran sesuai kategorinya masing-masing. Enjoy! ■ MLP

Wisbar Advance & Wisbar Advance Desktop
<http://www.lakeridgesoftware.com/>
Kategori: Desktop Enhancement



Software ini sudah menjadi software 'a must have' urutan pertama bagi semua pengguna Windows Mobile. Meski PDA masih mengusung sistem operasi Windows Mobile 2003 SE misalnya, tampilan PDA bisa dibuat mirip

Window Mobile 6 yang terbaru itu. Terdapat ratusan 'skin' yang

bisa didownload gratis untuk dicoba. Coba tengok forum LakeridgeSoftware (lakeridgesoftware.com/forum/) dan SBSH Mobile (sbsb.net/forums/index.php?showforum=46). Bahkan dalam forum-forum ini, setidaknya satu hingga dua skin baru hadir setiap minggunya untuk melengkapi koleksi para penggunanya. Software ini juga bermanfaat untuk menampilkan berbagai *shortcut* di layar Today yang diorganisasi sesuai keinginan kita.

Alternatif: riToday, SnooSoft Dashboard, FlashDash dan Animated Today (memanfaatkan Flash Player), dan PPX.

Layak Dicoba: Spb Pocket Plus dan iLauncher. Kedua software ini sangat berguna untuk manajemen *shortcut* berbagai program di layar today.

PocketBreeze 5.3.02
<http://www.sbsb.net/>
Kategori: Personal Information Manager

Software ini merupakan Today Plugin yang menampilkan isi agenda (Calendar) menjadi lebih lengkap di layar Today. Kita bisa melihat informasi Calendar, Tasks, Contacts, Notes, Messages (SMS dan e-mail), Special Events (birthday) termasuk informasi semua today plugin yang sudah ada di pasaran hanya dengan satu klik plus fitur-fitur lain yang menarik.

Alternatif: Spb Diary



Resco Explorer 2007
<http://www.resco.net/pocketpc/explorer/>
Kategori: File Explorer

Software ini memiliki fungsi yang lebih lengkap daripada Explorer *built-in* yang sudah ada di PDA Windows Mobile. Sejauh mana kemampuannya, cuma bisa dijelaskan dengan satu hal, hampir setara dengan Windows Explorer di PC. Selain

sebagai *File Manager*, software ini juga punya kelebihan lainnya yang dikhususkan untuk PDA seperti *today plugin* untuk menampilkan *battery* dan *memory status*, enkripsi dan dekripsi file, zip atau unzip suatu file, *registry editor*, dan *network browser*. Resco Explorer pernah menjadi pemenang selama lima tahun berturut-turut (2001-2005) versi Majalah Smartphone & Pocket PC magazine.

Alternatif: Virtual Explorer (wizcode), Pocket File Manager



Resco Photo Viewer 2007
<http://www.resco.net/pocketpc/photoviewer/>
Kategori: Photo Management

Software ini sangat membantu untuk melihat-lihat koleksi foto dan video yang kita miliki. Format-format yang didukungnya adalah MPEG I, JPEG, PNG, TIFF, MS PowerPoint, BMP, CFX, PSD,

PCX, GIF, RAB, PGM, PPM, RAW, CRW, CR2, RAF, MRW, NEF, ORF, PEF. Foto yang kita lihat bisa ditampilkan dalam *thumbnail*, *slideshow* dan *zoom*. Dukungan untuk mengedit foto juga ada (crop foto, mengubah *image resolution*, memperbaiki *contrast*, *brightness* dan *gamma correction* sebuah foto). Resco Photo Viewer Explorer dinobatkan menjadi pemenang tahun 2005 dan 2006 versi Majalah Smartphone & Pocket PC magazine.

Alternatif: PicturePerfect Photo, ACDSee Mobile, Spb Imageer.



7

Pocket Controller Pro V6
<http://www.soti.net/>
 Kategori: Synchronization

Software ini sangat keren. Kita bisa mensimulasikan layar Pocket PC di PC dan menginput data ke PDA dengan menggunakan *keyboard* dan *mouse*.



Jadi, tidak ada lagi yang namanya pegel pake *stylus* di kala harus memasukkan kalimat yang panjang, berkirim sms, atau meng-*update appointments* (calendar) harian. Selain itu, software yang *interface*-nya sudah seperti Windows Vista ini, bisa dijadikan alat presentasi dan *training*, *screen/video capture*, dan banyak fitur lainnya.

Alternatif: Desktop Rover Pocket PC Controller, True Connect.

Spb Backup 1.6.2
<http://www.spbsoftwarehouse.com/>
 Kategori: Backup

Backup data penting sudah menjadi keharusan. Daripada pusing-pusing install ulang software karena PDA harus di-*hard reset*, gunakan Spb Backup yang kalau fungsinya dianalogikan dengan dunia PC setara dengan Norton Ghost atau Acronis True Image. Software ini mendukung *backup* ke kartu memori, bisa memilih file-file apa saja yang ingin di-*backup*, membuat jadwal *backup*, data yang di-*backup* bisa dienkripsi agar keamanannya terjamin dan data yang sudah di-*backup* bisa dilihat/dibuka dengan 'Desktop PC unpack tool', software tambahan yang disediakan gratis di situsnya.

Alternatif: Sprite Backup, Sunnysoft Backup Manager

8

Memmaid 2.0
<http://www.dinarsoft.com/memmaid/>
 Kategori: Tweaking and Cleaning

Butuh software untuk bersih-bersih? Memmaid ahlinya. Software ini akan memeriksa semua *file* atau *registry* sampah yang menguras memori lalu menghapusnya sehingga isi memori PDA bersih seperti baru. Daerah/file yang dibersihkan antara lain PIE (Cookies, history and cache), Dangling and Duplicate Notifications, Dead Shortcuts and registry entries, System Temp and Cache Files, Mail Attachments, Log File (Phone Edition) dan Bad uninstall data. Software ini juga menyediakan fitur lainnya seperti *registry editor* dan *system tweaks*.

Alternatif: Pocket Mechanic Professional, SKTools, Tweaks2K2NET



ListPro 5.0
<http://www.iliumsoft.com/>
 Kategori: List Manager

Punya segudang 'things to do', *shopping list*, *movie list*, *books list*, apa saja, namun kurang afdol bila menggunakan fitur *Tasks* bawaan Windows Mobile yang standar? Dengan software ini kita bisa membuat segudang kategori atas 'things to do' yang kita punya. Daftar atau list yang kita buat itu bisa kita ekspor agar bisa digunakan orang lain. Daftar yang kita susun ini bisa dibuat dalam banyak kolom dengan warna yang beragam.

Alternatif: MyList, InfoShare List Manager



eWallet 5.0.2
<http://www.iliumsoft.com/>
 Kategori: Password Management

Biasanya kita memiliki informasi *password/username* sejumlah buku tabungan, kartu kredit, e-mail dan situs yang seringkali membuat kita kewalahan karena lupa atau tercecer. Software ini akan mensentralisasi berbagai informasi tersebut dalam satu aplikasi dan bisa disinkronisasi lewat PC. Semua informasi yang disimpan dalam software ini akan dienkripsi dengan standar 256-bit RC4 encryption. Jadi, hingga dunia kiamat pun, tidak akan ada seorangpun yang bisa menjebol informasi yang disimpan dalam software ini. Kita tidak perlu lagi panik karena lupa *password* atau *username*.

Alternatif: Spb Wallet.



10

PhoneAlarm v1.61.1
<http://www.pocketmax.net/>
 Kategori: Phone Tools

Software yang termasuk kategori *today plugin* ini khusus untuk PDA Phone. Dengan software ini, kita bisa mengendalikan secara penuh fungsi komunikasi di PDA mulai dari pemberitahuan adanya *missed call*, *sms* dan *e-mail* yang masuk, pindah *phone profile* secara otomatis (*meeting*, *silent*, dan sebagainya), *call history*, mengaktifkan *bluetooth* dan *Wifi* dengan sekali klik, dan banyak lagi. Tampilan software ini bisa diubah-ubah dengan mengunduh berbagai skin yang ada di situsnya.

Layak untuk Dicoba: Call SMS Blocker, Novosec Smart Filter Pro, Jeyo Mobile Companion, Phone Dashboard.



Gandhi, My Father

Anak Sulung yang Terbuang

Film *Gandhi, My Father* membuka dengan jujur sosok manusiawi dari seorang pemimpin besar India, Mahatma Gandhi. Menonton film tentang hubungan ayah dan anak yang dibalut cinta dan benci ini bisa membuat kita merasa pedih dan sunyi.

Revue yang ditulis oleh *Ma-jalah Newsweek* terbitan 6 Agustus lalu sungguh menarik. Hanya dalam satu halaman, *Newsweek* mengulas dengan elegan bahwa sosok Mahatma Gandhi adalah seorang kepala keluarga yang keras dimana idealismenya sanggup membentuk sebuah negara namun di sisi lain ia melukai keluarganya. Mengutip pernyataan sutradara film ini, Feroze Abbas Khan, "Dia mencintai putra dan keluarganya, namun ia lebih mencintai negaranya."

Film yang memenuhi bioskop-bioskop di India bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan India yang ke-60 ini dimulai dengan sebuah plot pembuka. Seorang pria dengan rambut panjang terurai dan janggut tebalnya terkulai di sebuah bangsal rumah sakit di Bombay. Di tepi kasur tampak seorang petugas medis dan dua orang polisi. Ketiganya menunggu jawaban dari bibir Harilal, sang gelandangan yang selalu mengoceh setengah sadar. "Siapa nama keluargamu?" tanya mereka. "Bapu," bisiknya berulang-ulang. Bapu yang artinya dalam bahasa Inggris adalah *Father* (ayah) merupakan istilah atau julukan yang sangat melekat di batin masyarakat India untuk Mahatma Gandhi, *The Father of India*. Mendengar jawaban seperti itu, ketiga orang itu tersentak. Kisah selanjutnya dari film berdurasi dua jam ini memutar balik sejarah perjalanan hidup pria gelandangan itu. Harilal yang merupakan anak pertama Mahatma Gandhi ini menghabiskan sebagian hidupnya dalam hubungan cinta dan benci dengan ayahnya yang memimpin India hingga memperoleh kemerdekaannya tahun 1947. Dalam film itu, Harilal berucap, "Aku merasa sesak nafas" – sebab tidak bisa lari dari bayang-bayang ayahnya.

Menonton film ini kita akan melihat

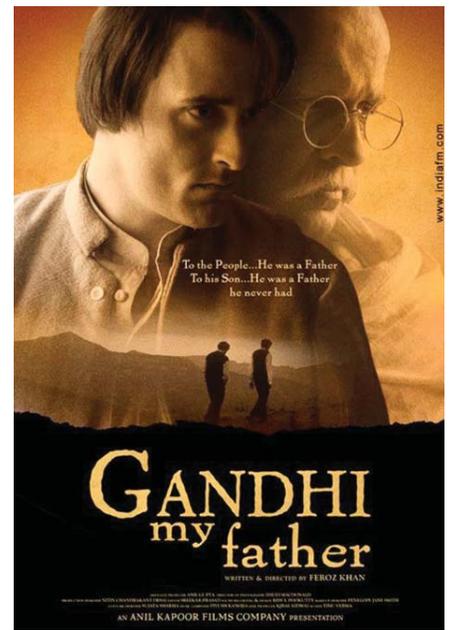
To the People...He was a Father. To his Son...He was a Father he never had.

sosok Harilal yang cerdas dan berpotensi namun ditanggapi dengan buruk oleh ayahnya. Pertama, ayahnya menahannya agar tidak mengikuti kuliah hukum di London karena ia ingin Harilal bergabung dengan para demonstran di Afrika Selatan memprotes perlakuan semena-mena pemerintah terhadap mereka. Saat itu, Gandhi dan keluarganya sedang tinggal di Afrika Selatan. Awalnya, Harilal mendukung Gandhi dengan sepenuh hatinya dan bangga bila dipanggil Junior Gandhi. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama setelah Gandhi mengkritik pernikahannya dan memaksa Harilal agar tidak terlalu memikirkan keluarganya dan fokus pada pekerjaan. Harilal tidak menerimanya lalu kembali ke India. Setelah beberapa bisnisnya gagal, Harilal meminta ayahnya agar diijinkan ke London dan meminta sejumlah uang. Gandhi menolak kedua permintaannya dan mengatakan agar Harilal harus belajar mandiri.

Istri Harilal kemudian meninggal tidak lama setelah mereka menikah. Ia lantas menganggur dan suka berjudi. Sementara Gandhi, dengan nama Mahatma yang berarti 'jiwa besar', kian menjulang. Pada 1915 Gandhi tiba di India dari Afrika Selatan sebagai seorang tokoh perlawanan yang sangat dikagumi. Ia disambut di mana-mana. Sedangkan Harilal berkoar di gang-gang bahwa ia seorang pecundang yang putra Gandhi.

Gerakan *Satya Graha* yang dikobarkan Gandhi mencetuskan pemboikotan atas produk-produk tekstil Inggris. Revolusi itu pun dimulai dari sepintal benang. Rakyat meninggalkan baju mereka, membakar kain binaan kaum penjajah, lantas menenun sendiri pakaiannya. Tapi, Harilal memilih melawan arus. Ia malah berbisnis dan memperjualbelikan produk tekstil itu. Tidak lama kemudian bisnisnya itu bangkrut dan ia diburu banyak orang. Tapi, Gandhi adalah pemimpin yang tak pandang bulu. Ia minta Harilal diproses hukum.

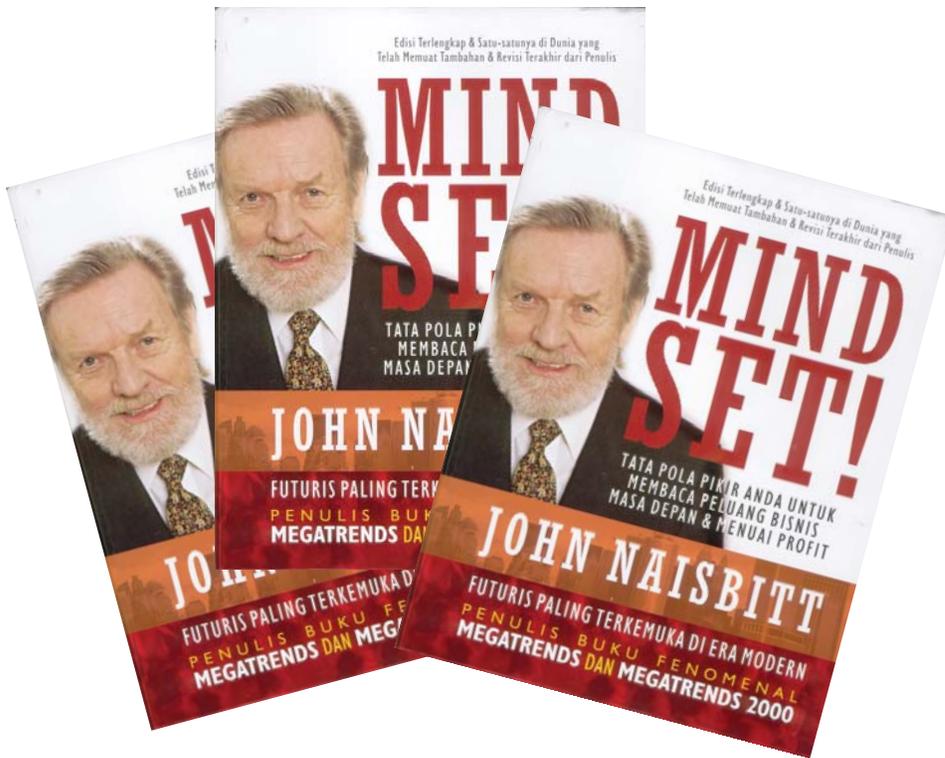
Dalam tahun-tahun terakhirnya, Gandhi menyatakan bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah ketidakmampuannya memimpin dua orang: Harilal dan Mohammed Ali Jinnah yang ke-



mudian mendorong adanya tanah sendiri untuk kaum Muslim sehingga memecah India dan lahirlah Pakistan tidak lama setelah India memperoleh kemerdekaannya.

Kini, berpuluh-puluh tahun setelah kematiannya tahun 1948, Mahatma Gandhi tetap menjadi simbol perjuangan di seluruh dunia. Gandhi memberi inspirasi bagi pejuang hak sipil Martin Luther King Jr di Amerika dan Nelson Mandela di Afrika Selatan, begitu pula pada banyak orang lainnya. Banyak orang mengenal keberanian dan keteguhan Gandhi dalam memperjuangkan kebebasan, namun sedikit yang tahu kekurangannya sebagai seorang kepala keluarga. Film ini menjadi layak untuk ditonton karena menampilkan sisi manusiawi 'yang menyedihkan' dari seorang pemimpin India yang sangat dikagumi. Sosok yang ditampilkan dalam film ini jauh berbeda dengan sosok Gandhi yang ditonjolkan dalam film besutan Richard Attenborough yang meraih Piala Oscar 25 tahun lalu. Film tentang Gandhi yang baru ini menyusul film-film tentang tokoh lainnya seperti "The Motorcycle Diaries," tentang Che Guevara dan "Downfall," tentang Adolf Hitler. Kedua film ini juga mengangkat kisah mereka sebagai manusia biasa yang punya kelemahan.

Film *Gandhi, My Father* sebagian dibuat berdasarkan buku "Gandhiji's Lost Jewel: Harilal Gandhi," yang ditulis oleh cucu perempuan Harilal, Nilam Parikh. Buku itu memuat 29 surat yang ditulis Gandhi untuk Harilal. Dalam satu titik kehidupannya, Harilal pindah memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Abdullah. Namun belakangan ia kembali ke agama Hindu untuk menghibur ibunya yang didera depresi. Ia meninggal tahun 1948 di usia 61 tahun. ■MLP



Judul	: Mind Set!
No. ISBN	: 978-979-1208-01-7
Penulis	: John Naisbitt
Penerbit	: Daras
Tanggal terbit	: Juli - 2007
Jumlah Halaman	: 352
Berat Buku	: 750 gr
Jenis Cover	: Hard Cover
Dimensi(L x P)	: 180x240mm
Kategori	: Bisnis/Investasi
Teks Bahasa	: Indonesia

berita yang dipelintir untuk kesimpulan tertentu. Amati variabel-variabel pastinya secara kontiniu.

Keempat, kesadaran bahwa betapa menguntungkanannya bila Anda tidak harus benar. Kesadaran yang akan selalu membawa pola pikir untuk terbuka terhadap berbagai informasi. *Kelima*, melihat masa depan sebagai potongan informasi.

Masih ada enam prinsip lagi tersisa yang bisa dibaca tuntas di bukunya, namun pada prinsip terakhir (*kesebelas*), Naisbitt menekankan untuk tidak melupakan ekologi teknologi. Bagaimana siklus teknologi, lompatan-lompatan pada teknologi kunci yang mampu menciptakan efek berantai pada kehidupan luas.

Menurutnya, jika keharusan adalah ibu semua penemuan, perubahan adalah ayah inovasi. Ada alasan mengapa pertumbuhan melalui inovasi menjadi mantra baru bisnis. Mempertimbangkan ekologi teknologi juga berarti membuka pikiran kita bagi segala peluang yang terkandung di dalam berbagai inovasi besar terkini yang sekarang sedang dicerna.

Penulis buku *Mind Set* ini lahir di Utah, 15 Januari 1929. Ia dijuluki sebagai futuris dan filsuf global. Dua puluh tahun yang lalu, bukunya yang berjudul *Megatrends* menjadi *bestseller* di seluruh dunia. Buku itu memuat prediksi-prediksi yang luar biasa tepat.

Ia menjadi salah satu pembicara yang paling populer di dunia. Pengalamannya membentang mulai dari posisi-posisi eksekutif di dunia korporat, asisten Presiden John F. Kennedy dan Presiden Lyndon Johnson, sampai pengusaha. Ia juga pernah menjadi Harvard University, Moscow State University dan kini di Nanjing University, China. Ia telah menerima lima belas gelar doktor kehormatan di bidang ilmu sosial, teknologi dan sains.

Gambarannya tentang masa depan tidak hanya dibentuk dari riset yang sudah dilakukannya sejak lama, namun juga berkat perjalanannya keliling dunia sejak akhir 1960-an. Selama perjalanan itu ia menjalin kedekatan dengan banyak perusahaan dan orang-orang dari berbagai bidang. ■ RH

Legenda Kehebatan Pola Pikir

Siapa mengetahui masa depan, ia menguasai permainan. Dalam buku *Mind Set!*, John Naisbitt membuka rahasia membaca masa depan. Ia menyajikan 11 Pola Pikir sebagai kunci untuk bisa memahami dunia saat ini guna membaca peluang-peluang di masa depan. Naisbitt juga memprediksi ada lima kekuatan yang akan mendominasi dunia di beberapa dekade awal abad ke-21.

Ia menyuguhkan analisis dan gambaran mendalam mengenai kelima kekuatan itu agar kita bisa mengambil manfaat dari kelimanya. *Mind Set!* niscaya membuka mata kita sehingga dapat melihat jauh di balik gambar-gambar *headline* media, slogan politik, dan berbagai opini. Dengan begitu, kita bisa mendapat gambaran yang tepat mengenai masa depan dan mengantisipasi peluang-peluang yang terkandung di dalamnya.

Pemikiran yang dikembangkannya itu mampu menebak ke mana arah peradaban ini mengalir. Keterampilan yang sudah pasti sangat langka, meskipun dunia kita saat ini telah memanjakan profesional lewat informasi yang serba cepat.

Naisbitt menekankan bahwa pola pikir

adalah hal utama yang membentuk kemampuannya dalam meramalkan tren besar peradaban. Ia menguraikan berbagai hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun pola pikir. Ada sejumlah prinsip di sini.

Pertama, mengidentifikasi hal-hal yang konstan, di mana hal ini tidak pernah tersentuh atau dengan kata lain tidak pernah berubah, meskipun banyak hal lain berubah. Hal pertama ini sangat penting untuk memilah pasokan informasi, mana yang penting dan mana yang tidak menyebabkan perubahan.

Kedua, bahwa masa depan tertanam di masa kini. Artinya, perubahan apapun di masa depan adalah rangkaian dari kejadian di masa kini. *Ketiga*, fokus pada skor pertandingan. Prinsip ini penting untuk menghindari informasi sampah atau

Pasar Flohmak Dari Baju Sultan Sampai Topi Schummi

Mengacu pada konsep pasar loak di sejumlah negara di Eropa, calon penjual dan pembelinya kini semakin banyak.

Siang itu terik matahari terasa menyengat kulit. Namun keramaian di deretan lapak-lapak berukuran 2x3 meter di pelataran Granada Square itu tak juga surut. Seorang ibu muda berkerudung berhenti di depan lapak yang menjual sebuah lampu kristal antik. Pemilik lapak, seorang ibu yang usianya setengah baya, menghampiri dan memberitahukan harga lampu itu. Beberapa saat terjadi tawar-menawar. Sejumlah uang disodorkan. Ibu berkerudung itu tersenyum. Lampu kristal indah itu kini miliknya.

Kawasan Granada Square yang terletak di BSD City, Serpong, Tangerang kini terkenal dengan pasar loaknya yang disebut Flohmak. Sejak pertama kali dibuka pada 21 dan 22 April 2007, jumlah lapaknya bertambah. Calon penyewa terpaksa antri.

Awalnya ada 18 lapak masing-masing berukuran 2 meter x 3 meter yang digelar, mengambil lahan parkir Granada Square. Aneka barang bekas dijual mulai dari pakaian, tas, sepatu, furnitur, buku, sepeda, lukisan, sampai stik golf.

Kini, seperti yang dituturkan Ibu Mamiék, bagian registrasi penyewaan lapak kepada *Berita Indonesia*, jumlah lapak bertambah menjadi 105. Jumlah calon penyewa juga semakin bertambah. Karena itu penyewa yang hendak memperpanjang sewanya harus mendaftar ulang paling lambat 3 hari sebelum hari berjualan.

Setiap lapak disewakan seharga Rp 50.000 per hari, dan tidak mengutip persentase barang yang terjual. Uang sewa itu dipergunakan untuk iuran

keamanan, kebersihan dan Koperasi BSD.

Winarto A. Rasul (51) yang belum lama kembali ke Indonesia adalah pendiri PD Pasar Flohmak. Warga Serpong yang delapan tahun tinggal di Vienna, Austria, itu melihat pasar jual beli barang bekas sangat berkembang di sejumlah negara di Eropa.

Pasar Flohmak mengadopsi *fleamarket* seperti di Salzburg dan Vienna (Austria), Bruges, Brussels, dan Antwerp (Bel-

Nama Flohmak sendiri diadopsinya dari kata Jerman, *flohmark* (pasar barang bekas layak pakai dan koleksi), namun karena orang Indonesia menyebut *flohmark* menjadi Flohmak, akhirnya Winarto mengambil nama Flohmak, yang kemudian didaftarkan sebagai hak paten.

Tak Perlu Malu

Mayoritas para penyewa lapak Flohmak di BSD adalah orang-orang golongan menengah ke atas yang berjualan hanya untuk mengisi waktu luang. Rata-rata barang yang dijual juga milik pribadi yang sudah tidak terpakai lagi. Pasar ini

pong, tetapi ada juga datang dari Depok, Jakarta, dan Bekasi.

Berita Indonesia menemukan barang-barang dagangan berupa sejumlah lampu kristal, sepatu-sepatu dan tas-tas bermerek, pesawat telepon dan jam kukuk antik, bahkan peralatan selam. Pakaian dan berbagai pernak-perhiasan rumah juga banyak. Ada juga beberapa suvenir dari luar negeri, hasil lawatan si penyewa lapak.

Barang-barang yang dijual di Pasar Flohmak ini harganya bervariasi dari Rp 5.000 sampai puluhan juta untuk barang koleksi. Uniknya, pengelola membuka sesi gratis setiap pukul 15.00. Untuk barang-barang tertentu, seperti mainan, sepatu, pakaian, dan pernak-pernik diberikan secara gratis kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat sekitar yang kurang mampu dapat juga menikmati barang-barang di Pasar Flohmak. Dalam waktu singkat, barang yang digratiskan itu sudah habis.

Setelah sukses menggelar pasar barang bekas di Kawasan Granada Square BSD City, pengelola Pasar Flohmak mulai mengembangkan sayap dengan membuka pasar pakaian di Kompleks Ruko Cordoba Sektor 14 BSD City. Berbeda dengan konsep sebelumnya, pasar pakaian jadi yang diberi nama Pasar Flohmak Outlet (FO), itu menjual barang baru dengan mode mutakhir.

Winarto juga berencana membuka waralaba Pasar Flohmak. Dia melihat berkembangnya Pasar Flohmak karena saat ini masyarakat masih menghadapi situasi krisis ekonomi.

Di Flohmak, tak ada yang malu membeli barang bekas. Bahkan pakaian bekas Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Ratu Hemas pernah dilelang di Flohmak. Topi kemenangan Schumacher pernah juga dijual di sana. ■ **RH**



foto: berindo retno

PASAR FLOHMAK: Mengacu pada konsep pasar loak di sejumlah negara di Eropa

gia), Zagreb (Kroasia), Copenhagen (Denmark), Lille, Paris (Perancis), Muenchen (Jerman), Dublin (Irlandia), Amsterdam (Belanda), Lisabon (Portugal), Barcelona, Madrid, dan Sevilla (Spanyol).

buka sejak pukul 07.00 dan tutup pukul 17.00 setiap Sabtu dan Minggu. Para pembelinya tidak hanya warga Serpong, Tangerang, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Jabodetabek. Sebagian warga Ser-



Perum Perhutani berencana melelang ribuan pohon jati tua untuk dilestarikan

Melelang Jati ke Negeri Big Ben

Perum Perhutani berencana melelang ribuan pohon jati tua yang diperkirakan berumur lebih dari 150 tahun di tingkat internasional.

Pohon jati itu bernama Jati Wibowo. Berdiri kokoh di petak 1092A Resor Polisi Hutan (RPH) Temengeng, BKPH Pasar Sore, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu. Sebenarnya pohon jati berusia ratusan tahun itu sudah mati sejak Mei 2006 karena tersambar petir. Jika tak ditebang, kayunya akan rusak. Karena itulah Perum Perhutani melelangnya.

Pohon yang memiliki tinggi sekitar 25 meter dengan keliling 690 cm atau berdiameter lebih dari tiga meter tersebut, akhirnya dibeli Bobby Wibowo, seorang pengusaha furnitur dari Kabupaten Ngawi (Jatim). Pemilik UD Bonytasari itu hadir

di lokasi penebangan bersama istrinya, Arini Ambarwati.

Menurut Direktur Utama Perum Perhutani Transtoto Handadhari, dikutip *Suara Pembaruan* dan *Kompas* pada edisi yang sama tanggal 24 Agustus 2007, jika dijual per kubik diperkirakan kayu itu hanya akan laku Rp 200 juta. Perhutani memutuskan melelang pohon hingga akhirnya laku dan dibeli Bobby Wibowo Rp 1 miliar.

Harga tersebut merupakan harga termahal untuk satu pohon kayu jati. Karena itu, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatatkannya sebagai kayu jati termahal di dunia. Menurut Transtoto, uang hasil penjualan sebagian di antara-

nya akan digunakan untuk membiayai reboisasi di lahan 400 hektar di kawasan hutan Temengeng yang pernah rusak akibat penjarahan.

Manajer MURI, Paulus Pangka, menyatakan, rekor tidak hanya diberikan kepada Perhutani sebagai pemilik pohon jati, melainkan juga kepada perusahaan yang membeli kayu. Rekor itu diberikan dengan kriteria, pohonnya tua, meskipun bukan yang tertua, harganya paling mahal dan pemiliknya (Perhutani) berperan dalam pelestarian hutan.

Arini, istri Bobby, mengatakan, kayu itu akan dibuat furnitur antik, yang nantinya akan dipajang di *art gallery* di Bali. Saat ini saja, sudah banyak calon pembeli dari Eropa yang mulai melirik furnitur antik yang akan dibuat dari kayu jati termahal di dunia tersebut. "Sudah banyak yang menaksir, kebanyakan pembeli dari Jerman, Belanda, dan Denmark," ujar Arini.

Pembelian sebuah pohon jati yang diperkirakan berusia 150-200 tahun seharga Rp 1 miliar itu, menyadarkan Perum Perhutani bahwa ternyata kayu jati dari wilayah itu bernilai sangat tinggi. Oleh karena itu, Perum Perhutani berencana melelang ribuan pohon jati tua yang diperkirakan berumur lebih dari 150 tahun di pusat lelang internasional di Christy atau Southeby, London, Inggris dan Singapura.

"Bukan dilelang untuk dijual, tetapi untuk tidak ditebang. Selanjutnya, pohon-pohon jati tersebut akan dinamai sesuai nama pemenang lelang dan dijaga sampai pohon itu mati dengan sendirinya," kata Transtoto.

Transtoto mengatakan, Perhutani kini tengah menginventarisasi pohon jati tua. Pohon jati yang berumur lebih dari 150 tahun, tumbuh di beberapa tempat, di antaranya Temengeng (1.766 pohon), Padangan Jawa Timur (7.008 pohon), serta ribuan pohon lainnya di kawasan hutan Randublatung, Gundi, Purwodadi, dan Surakarta.

Di petak 1092 A, saat ini, masih ada 1.558 pohon jati berusia di atas 100 tahun dengan tinggi rata-rata 39 meter. Semula tercatat ada 1.766 pohon, tetapi 107 di antaranya mati.

Menurut Transtoto, petak 1092 A memang dijadikan kawasan lindung hutan jati alam. Pohon jati di kawasan tersebut tidak akan dipotong, kecuali karena kejadian luar biasa, seperti mati karena usia dan karena bencana alam.

Keberadaan pohon jati itu dilindungi. "Kami tidak akan menebang pohon tersebut, melainkan kami lelang untuk pemberian nama pohon itu," katanya.

Dia menyatakan, ukuran pohon kayu yang ditebang itu bukan yang terbesar.

Di wilayah hutan Randublatung sendiri masih ada pohon jati yang ukurannya lebih besar. Namanya Jati Denok. ■ RH

Mengawal Karya Leluhur

Kesenian tradisional atau kesenian daerah di Indonesia mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Sayangnya, pemerintah masih belum memperhatikan kesejahteraan para senimannya.

Sebuah wayang kulit yang menggambaran sosok Kresna tampak begitu indah dan agung. Benda yang biasanya dimainkan oleh dalang itu berada di balik kaca berbingkai, direkatkan pada kain beludru merah. Sang empunya dengan bangga menunjukkan betapa rumit sebenarnya pembuatan benda dari kulit sapi itu.

Sore yang cerah itu, Retno Handayani, Suryo Pranoto dan Azizah dari *Berita Indonesia* tengah berkunjung ke kediaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Didampingi Sekjen HISTI Agoes Soeparto, dia mengutarakan pemikirannya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Himpunan Kesenian Tradisional Indonesia (HISTI).

Menteri yang satu ini memang mengandrungi kesenian. Menurutnya, sudah waktunya dilakukan tindakan untuk melestarikan kesenian tradisional yang kian terpinggirkan.

Dia berpendapat, kesenian tradisional memiliki nilai spiritual, edukasi, hiburan dan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Kesenian bisa 'dijual' dalam arti menarik turis dan menumbuhkan pariwisata Tanah Air. Kesenian tradisional juga menarik minat mancanegara, terbukti dengan maraknya berbagai undangan pentas kesenian di luar negeri, juga banyaknya para peneliti kesenian yang belajar di Indo-

nesia.

Kesenian tradisional juga mencakup hal-hal yang bersifat emosional, fisik, spiritual, dan intelektual. Pementasan kesenian tradisional juga memberikan santapan pada jiwa, karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran agama, adat, filsafat hidup yang digambarkan lewat perjuangan seniman dalam melawan kejahatan. Ini membuat penonton berpikir dan menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Kesenian tradisional murni adalah teater di mana antara konsep dan realisasinya serupa. Jadi kesenian tradisional mengarah pada totalitas bermain yang tidak dimiliki oleh kesenian Eropa dan Amerika yang terasa kering dari nilai-nilai.

Sayangnya, saat ini justru luar negeri yang lebih *concern* pada pelestarian dan keberlangsungan kesenian tradisional di Indonesia. Heritage Foundation, misalnya, menghususkan diri melestarikan kraton-kraton di Indonesia yang kondisinya memang memprihatinkan karena lapuk dan tak terurus.

Karena itulah semasa masih menjadi anggota DPR, Erman Suparno menggagas lahirnya HISTI. Pemikiran yang tercetus pada 1996 untuk membentuk suatu wadah kesenian kemudian diwujudkan pada 1998 dengan mendirikan HISTI.

Dia melihat Heritage Foun-



foto-foto: berindo

Berita Indonesia tengah berkunjung ke kediaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno

dation, sebuah yayasan nirlaba asing, justru memberikan dana untuk perbaikan kraton-kraton yang ada di Indonesia. Memang, jika melihat kondisi kraton-kraton yang ada, termasuk Kraton Yogya, sangat memprihatinkan kondisinya. Lapuk di sana-sini. Padahal kraton itu penting untuk sejarah seni budaya dan pariwisata. Tapi tidak ada pembiayaan dari negara untuk perbaikan, padahal semestinya tugas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Peninggalan sejarah seperti Lawang Sewu, misalnya. Malah sempat dijadikan tempat acara uji nyali sebuah stasiun televisi. Padahal kalau diperbaiki, bisa dijadikan obyek pariwisata atau tempat pementasan kesenian.

Eksistensi Kesenian

HISTI didirikan dengan tujuan melestarikan eksistensi seni budaya tradisional Tanah Air dan mengangkat harkat derajat para senimannya. Misinya yang pertama adalah menjadi wadah untuk meng-

himpun semua seniman tradisional agar generasi berikutnya bisa turut melestarikan. Kedua, mengembangkan seni budaya. Secara teori, kebudayaan, termasuk seni didalamnya akan selalu berkembang, tidak statis, menjadi suatu sintesa baru. Yang penting, akar nilainya jangan sampai hilang. Misi ketiga adalah sebagai wadah komunikasi, aktivitas dan advokasi bagi para seniman.

Komitmen utamanya sebagai Ketua Umum HISTI adalah agar seni budaya tradisional bisa lestari dan juga mendorong komitmen yang sama dari pemerintah. Jangan sampai orang luar negeri yang lebih *concern*.

Beberapa program HISTI antara lain menginventarisasi sanggar-sanggar seni budaya yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu memberikan bantuan, bukan hanya uang, namun lebih kepada manajemen dan organisasi supaya tetap eksis.

Kelompok-kelompok seni itu juga diberi akses misalnya berpentas ke mancanegara

serta menumbuhkan pemertanian yang lebih interaktif dengan para penonton. Sehingga kesenian bisa menjadi hiburan yang lebih menarik bagi turis.

Yang terpenting bagi Erman Suparno, adalah kepedulian dan kontribusi dari pemerintah, misalnya ada alokasi dana untuk seni budaya. Memang tak bisa dipungkiri, eksistensi HISTI saat ini tak lepas dari jabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja. Namun sejauh hal itu bisa menimbulkan dampak positif, dia tak keberatan.

Dalam waktu dekat, dia akan mensosialisasikan program-program HISTI pada pejabat-pejabat dan instansi terkait. HISTI juga akan melakukan Musyawarah Nasional. Diinginkan kelompok-kelompok kesenian sudah selesai diinventarisasi dan disosialisasikan ke daerah-daerah. Barulah kemudian akan diadakan festival kesenian tradisional dalam skop nasional.

Perlindungan Seniman

Kesenian, misalnya wayang kulit, musik gamelan dan batik Jawa, serta tari, musik gamelan dan tenun ikat Bali, sepanjang sejarah telah dipraktikkan sebagaimana layaknya kesenian Indonesia lainnya tanpa adanya per-

aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Untuk masalah perlindungan HaKI, HISTI akan membentuk lembaga advokasi. Perlindungan tentunya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Selain advokasi juga perlu adanya perlindungan hukum, misalnya dalam hal hak cipta lagu.

Para pekerja seni juga berhak mendapat perlindungan sosial (*social security*). Dalam kapasitasnya sebagai Menteri, menurutnya para pekerja seni itu merupakan bagian dari golongan pekerja, yang disebut pekerja informal atau pekerja di luar lingkungan kerja.

Mereka wajib dilindungi dengan jaminan sosial meliputi asuransi hari tua, asuransi kecelakaan dan kematian, asuransi kesehatan, yang tercakup dalam Jamsostek. Saat ini para seniman pelawak yang tergabung dalam PASKI telah menjadi anggota Jamsostek.

Nantinya semua anggota HISTI akan mendapat jaminan sosial, karena pekerjaan mereka juga mengandung risiko. Hal ini merupakan program HISTI yang paling pokok. Selain itu, soal hak paten suatu karya seni, baik perorangan, kelompok, maupun daerah, juga akan dibantu perlindungannya. ■ RH



Erman Suparno: Komitmen utama HISTI adalah turut melestarikan seni budaya tradisional bersama pemerintah.

foto: berindo retro



Launching diawali dengan talkshow bersama Tung Desem Waringin.

Mengajak Tertawa dan Menyemangati Pembaca

Kemunculan media baru, *Humor dan Motivasi (H&M)*, disambut antusias saat *launching* perdananya tanggal 29 Agustus 2007 lalu di Hotel Ciputra, Jakarta. Acara ini penuh sesak dihadiri undangan mulai dari kalangan pengusaha, wiraswasta, penulis, wartawan dan sebagainya. *Launching* diawali dengan *talkshow* bersama motivator populer Tung Desem Waringin, yang juga penulis buku *Financial Revolution*, *management trainer* Ellies Sutrisna, dan Direktur Solusi Indonesia dan penulis, Ahmad Bahar.

Sedanya *talkshow* tersebut juga menghadirkan Tukul Arwana, presenter acara *talkshow* Empat Mata, yang kini tengah naik daun. Sayangnya komedian tersebut berhalangan hadir karena sakit. Meski peserta kecewa, namun tak mengurangi semaraknya *talkshow* yang dibarengi seminar bertema *Never Give Up Do A Life Revolution* dan lelang amal buku untuk beasiswa bagi 1.000 anak korban Lumpur Lapindo.

Hadirnya majalah *Humor dan Motivasi (H&M)* yang dijual dengan harga Rp. 20 ribu ini menarik untuk dicermati. Menurut Pemimpin Redaksinya, Ahmad Bahar, 30 persen porsi majalah tersebut adalah humor, sedangkan 70 persennya berisi berbagai artikel yang berkaitan dengan motivasi. Diakuinya, belum banyak media yang membahas humor dan motivasi dalam satu bingkai sekaligus. Karena itu kelebihan majalah H&M antara lain bisa mengajak para pembacanya untuk tersenyum atau tertawa sambil tak lupa memberi motivasi untuk menjalankan hidup lebih baik dan penuh semangat. "Di tengah kehidupan masyarakat yang tengah bangkit dari krisis moneter dan kehidupan penuh tekanan di Ibukota, kami berharap hadirnya majalah ini bisa memberi sedikit hiburan dalam kehidupan sehari-hari, diimbangi pula memberi motivasi supaya lebih bersemangat dalam menjalani hidup," ungkap Ahmad Bahar kepada *Berita Indonesia*.

Bahar yang juga penulis buku biografi "Tukul 'Katro' Arwana" ini mengakui, tidak mudah mengangkat kedua masalah tersebut menjadi topik bahasan majalah. Namun menurutnya, pendiri majalah ini bersama awak redaksinya yakin segmen pasar yang mereka pilih cukup menjanjikan.

Adapun soal strategi pemasaran, H&M yang komisarisnya dijabat oleh Tukul Arwana ini memakai konsep berlangganan. Selain itu, majalah tersebut bekerja sama dengan para motivator, sehingga dapat pula dipasarkan dalam berbagai seminar motivasi. ■ ZAH



Masjid Mutiara Tanah Jawa

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang menjadi salah satu kebanggaan umat Islam di Indonesia kini makin mendunia. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga digunakan sebagai pusat pendidikan, pelayanan masyarakat, pusat aktivitas syiar Islam, dan alternatif wisata religi.

Jawa Tengah memiliki banyak tempat wisata religius dari berbagai agama yang sangat menarik. Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur, yakni monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, terdapat di Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Pawon juga terletak satu kompleks dengan Borobudur. Sedangkan candi Prambanan di perbatasan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno.

Di kawasan pantura barat terdapat masjid Agung Demak yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di kawasan ini terdapat 3 makam wali sanga, yakni Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di kota Kudus, dan Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Kudus juga dikenal sebagai 'kota kretek', dan kota ini juga terdapat museum kretek.

Selain masjid Agung Demak yang legendaris, Jawa Tengah juga semakin dikenal dengan Masjid Agung Jawa Tengah-nya (MAJT). Masjid yang terletak di Jalan Gajah Raya Semarang, Jawa Tengah ini pendiriannya diprakarsai oleh Gubernur Mardiyanto - akhir Agustus ini sudah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia

Bersatu - bersama tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Semenjak diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 November 2006, MAJT menjadi sebuah tempat tujuan yang harus disinggahi setiap kali berkunjung ke Jawa Tengah. Tidak memandang suku dan agama, hampir setiap hari wisatawan domestik dari penjuru Tanah Air, terutama pada hari libur berdatangan ke MAJT untuk melihat lebih dekat kemegahan MAJT yang pembangunannya memakan waktu 5 tahun itu. Umat Islam dan diplomat asing asal Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei Darussalam terbilang paling sering berkunjung dan tak lupa salat di MAJT.

Masjid Agung Jawa Tengah dibangun di areal seluas kurang lebih 10 hektar, dengan luas bangunan induk seluas 7.669 m², dan mampu menampung 6 ribu jamaah. Sedang pelatarannya seluas 7.500 m², dilengkapi 6 payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi di kota Madinah, mampu untuk menampung 10 ribu jamaah. Ke enam payung raksasa ini digunakan untuk melindungi jamaah dari sengatan panas matahari.

Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Arab, dan Yunani. Di bangunan sayap kanan terdapat Convention Hall atau auditorium yang mampu menampung 2.000 jamaah, sedang di sayap kiri dipersiapkan untuk perpustakaan yang nantinya didesain menjadi



foto: faniez.multiply.com

Pelataran MAJT dilengkapi 6 payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi di kota Madinah

perpustakaan modern (*digital library*), serta ruang perkantoran yang disewakan.

Masjid Agung Jawa Tengah ini, selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Untuk menunjang tujuan tersebut, Masjid Agung ini dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas, sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas ini. Karena itu, di samping adanya arena bisnis di sekeliling MAJT, seperti halnya Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah, sangat diharapkan uluran tangan dari kaum "aghniya" (orang kaya) untuk memberikan bantuan material agar MAJT terpelihara kebersihannya, keindahannya, dan dapat berfungsi maksimal.

Daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Asmaul Husna atau Al Husna Tower setinggi 99 meter yang melambangkan nama Allah itu dikonsepsi sebagai replika Menara Kudus. Bagian dasar dari menara ini terdapat Studio Radio Dais (Dakwah Islam). Sedangkan di

lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam, dan di lantai 18 terdapat Kafe Muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang, dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Teropong itu bisa dioperasikan jika pengunjung memasukkan koin. Cukup dengan Rp 1.000 mereka bisa menikmati teropong itu selama 1,5 menit.

Berbagai "memorabilia" yang terkait dengan syiar Islam juga ada di sana, di antaranya Al-Quran raksasa tulisan tangan yang merupakan karya H. Hayatuddin, "khattat" (penulis kaligrafi) dari Universitas Sains dan Ilmu Alquran (Unsyiq) Jateng di Wonosobo. Selain itu, ada pula replika beduk raksasa Purwo-rejo, yang dibuat para santri Pesantren Alfalah Mangunsari, Jatilawang, Banyumas. Pada awalnya, pembangunan masjid ini diperkirakan menelan biaya Rp 30 milyar, tapi dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp198,6 miliar. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan tanggal 6 September 2002. ■ MLP

Martha Tilaar

Pentingnya Memberdayakan Perempuan

Ketika mendapat kesempatan belajar di Academy of Beauty Culture, Indiana, Amerika Serikat, gurunya Van der Hoo yang keturunan Belanda, memperlihatkan padanya sebuah buku kuno mengenai Mangkunegara, terbitan tahun 1856. "Lihatlah, betapa cantik wanita Indonesia," kata Van der Hoo kepada Martha muda. Sejak itu, Martha pun sadar, lalu berjanji pada diri sendiri, untuk mengembangkan seni perawatan tubuh tradisional.

Martha akhirnya memang mendirikan perusahaan kosmetik dan kecantikan yang berbahan baku bahan-bahan tradisional. Menikah dengan Dr. Henry A. Rudolf Tilaar, Martha kini terkenal sebagai pakar kecantikan tradisional di mancanegara.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah dunia pendidikan. Tak mengherankan, karena dulu lulusan IKIP Jakarta pada 1963 ini pernah menjadi guru SD selama dua tahun dan menjadi dosen di almamaternya.

Di perusahaan Martha Tilaar Group yang menampung 6.000 karyawan dia memberi kesempatan seluasnya kepada setiap orang untuk maju. Program pendidikan disediakan supaya tidak ketinggalan dengan negara lain.

Bukan hanya terhadap karyawan perusahaannya, kepeduliannya terhadap perempuan juga tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ketika trend warna Pusako Minang sukses luar biasa di tengah krisis moneter dan banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, Martha menyisihkan sebagian hasilnya. "Saya berterimakasih pada kaum perempuan," cetus peraih berbagai penghargaan dari dunia internasional ini.

Martha bahkan membuat semacam kursus bagi perempuan yang dirinya atau suaminya menjadi korban PHK, supaya perekonomian keluarga tetap jalan.

Perempuan, bagi Martha adalah pemersatu yang sangat besar perannya bagi keutuhan bangsa. Karena itu, dia tidak ingin perempuan terbelakang dalam soal pendidikan.

"Satu hal, kita harus proaktif, inisiatif dan kreatif dalam penjualan tapi mesti ada sharing, kepedulian. Kalau hanya keuntungan



Martha Tilaar

foto: berindo wilson

terus tidak bisa," kata Martha yang juga menulis buku *Leadership Qoutient* berisi profil 17 perempuan pemimpin Indonesia.

Pemberdayaan perempuan juga dilakukan dengan pemberian beasiswa yang disebut sebagai Pendidikan Perempuan Indonesia. Dalam situs Martha Tilaar disebutkan, dari setiap pembelian pemulas bibir Sariayu, akan disisihkan Rp 250/unit guna disumbangkan melalui Yayasan Martha Tilaar untuk beasiswa pendidikan.

Kesejahteraan Perempuan

Pendidikan dan perempuan adalah dua hal yang sangat berkaitan. Tak ada bidang kegiatan yang tertutup bagi perempuan. Termasuk dari pedesaan. Dia ingin men-sejahterakan ibu dan anak. Maka, ibu dari empat anak dan beberapa cucu itu tidak segan-segan merambah pedesaan menyumbangkan pikiran sehingga perempuan di sana juga berhasil.

Community Trade, salah satu bentuk pengembangan masyarakat melalui industri kerajinan berhasil mengumpulkan 142 perajin di Sentolo, Yogyakarta, bernama Prama Pratiwi Martha Gallery. Produk dari perajin ini sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor Prancis, Australia dan Amerika.

Suatu hari di Yogya, dia melihat seorang perempuan muda sedang menyusui anaknya. Di usianya yang masih muda, dia su-

Perempuan, bagi Martha adalah pemersatu yang sangat besar perannya bagi keutuhan bangsa. Karena itu, dia tidak ingin perempuan terbelakang dalam soal pendidikan.

dah terlihat tua karena harus mencari nafkah dengan kerja keras. Itulah awalnya pemikiran membangun *community trade* itu.

Bersama mitranya Emmy Pratiwi, dia tak segan-segan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyediakan segala fasilitas produksi. Hasilnya sangat memuaskan. Ketekunan para perajin dan tekad mau berkembang membuat mereka cepat berhasil.

Martha masih akan terus mencari cara memberdayakan perempuan Indonesia. "Impian saya mengalir terus. Saya yakin itu akan tercapai karena kita menumbuhkan kepercayaan orang," tutur wanita yang masih terlihat menarik ini.

Martha sempat belajar kecantikan di Amerika Serikat saat mengikuti suaminya berdinis disana, lalu bekerja selama tiga tahun di Campes Beauty Salon, Universitas Indiana, AS. Setelah kembali ke Jakarta, 1969, ia membuka salon kecantikan.

Salon kecil di Jalan Dr. Kusumaatmaja, Jakarta, itu kini berkembang menjadi perusahaan kosmetik besar Sari Ayu. Berbagai produknya mampu menembus pasar negara-negara tetangga.

Penerima Upakarti (1991), Satya Lencana Pembangunan dari Pemerintah RI (1993), ASEAN Golden Pin Award (1993) itu menjadi salah satu pelestari ramuan tradisional Indonesia. ■ RH (DARI BERBAGAI SUMBER)

Memasuki Masa Pensiun Yang Berkualitas

Majalah *Gatra* milik pengusaha Mohammad (Bob) Hasan ini lebih menyoroti soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Majalah *Investor* dari kelompok usaha Lippo mengangkat laporan daftar Peringkat Multifinance 2007. Sementara majalah *Trust* milik kelompok Bimantara di bawah kepemimpinan Hary Tanoesudibyo membahas ancaman terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di dua perusahaan raksasa pulp dan kertas, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper yang tergabung dalam Asian Pulp and Paper milik Sinar Mas, dan di PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) milik Raja Garuda Mas (RGM). Sedangkan majalah *Swasembada* membahas tentang pensiun.

Gatra edisi 23-29/8 menulis asumsi pertumbuhan ekonomi 6,5% hingga 6,9% bisa diterima dengan lega dan nada optimis, baik oleh kalangan DPR maupun Pemerintah. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bisa mencapai 6,8%. Melalui RAPBN 2008 ini pemerintah bertekad memelihara pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan program pendidikan serta kesehatan.

Untuk meningkatkan tujuan itu, RAPBN 2008 dirancang meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja barang yang tidak menjadi prioritas. Efisiensi dialihkan untuk menunjang kegiatan sosial.

Sementara Majalah *Investor* (171-9), mengangkat tentang Peringkat Multifinance 2007 yang bergerak pada bidang pembiayaan konsumen khususnya otomotif. Seperti yang disampaikan oleh Wiwie Kurnia, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), *Investor* menulis sekitar 80% perusahaan *multifinance* bermain pada pembiayaan konsumen, terutama otomotif.

Sayangnya, *Investor* hanya memering-

Sejumlah majalah terbitan ibukota aktif mengangkat topik ekonomi dalam terbitannya akhir-akhir ini. Bisa jadi karena isu-isu politik sedang sepi belakangan ini.

Bussan Auto Finance terpilih sebagai perusahaan *multifinance* terbaik untuk katagori aset di atas Rp 4 triliun.

Sedangkan Majalah *Trust* (27 Agus-2 Sept) menyoroti ancaman PHK terkait dengan dua perusahaan besar Asian Pulp and Paper (milik Sinar Mas) dan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) yang tidak bisa memproduksi bahan baku kertas dari bahan kayu. Pasalnya, sumber bahan baku kayu dan peralatan mereka telah diberi tanda garis polisi atau *police line*. Peristiwa ini terkait dengan perseteruan antara Departemen Kehutanan dan Kepolisian RI yang salah dalam menafsirkan operasi pembalakan liar.

Pihak Kepolisian memberikan *police line* karena menganggap kayu yang ditemukan di aliran sungai Gaung, Riau berjumlah 1 juta meter kubik merupakan hasil penebangan liar.

Sedangkan Departemen Kehutanan terbalik, menganggap kepolisian sudah bertindak berlebihan karena merazia kayu-kayu hasil tebangan resmi dan berizin. Karena belum selesainya masalah ini, dengan alasan kehabisan persediaan bahan baku kayu kedua perusahaan terancam tidak bisa lagi memproduksi bahan baku kertas sejak Oktober 2007 ini.

Merancang Masa Depan Pensiun adalah tema menarik yang diangkat oleh majalah *Swasembada* (23 Agustus-2 Sept). Ketika seseorang memasuki masa pensiun terdapat dua hal yang mereka takuti: Menurunnya masalah kesehatan dan pendapatan berkurang.

Untuk menghadapi persoalan itu diperlukan kiat-kiat jitu agar hidup lebih bermakna dan tetap berkualitas. Gordon F Streib dan Clement J. Schneider, yang menuangkan idenya dalam buku *Retirement in American Society* dan *Impact and Process*, membahas bahwa seseorang yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan dengan baik masa pensiun, dia akan cenderung lebih tenang dan percaya diri, dan yang ditunjang pula dengan kesehatan yang baik, akan merupakan modal terpenting untuk menyesuaikan diri di masa pensiun.

Jadi dengan berbekal persiapan yang matang dan sempurna siap-siaplah memasuki masa pensiun yang berkualitas dengan penuh kegembiraan. ■ ZAH



demikian saringan cukup ketat didasarkan dari laporan keuangan 152 perusahaan *multifinance*. Tujuh kriteria penilaian yang ditentukan adalah *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *debt to equity ratio* (DER), pertumbuhan laba 2005-2006, pertumbuhan aset 2005-2006, pertumbuhan pendapatan 2005-2006 dan rasio efisiensi dan rasio pembiayaan berbanding aset.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY